

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN

No.20, Maret 2013

Penerbit:

Bank Indonesia
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta
Indonesia

Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mewujudkan misi #mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan.

KSK diterbitkan secara semesteran dengan tujuan untuk:

- *Meningkatkan wawasan publik dalam memahami stabilitas sistem keuangan*
- *Mengkaji risiko-risiko potensial terhadap stabilitas sistem keuangan*
- *Menganalisa perkembangan dan permasalahan dalam sistem keuangan*
- *Merekomendasi kebijakan untuk mendorong dan memelihara sistem keuangan yang stabil.*

Informasi dan Order:

KSK ini terbit pada bulan Maret 2013 dan didasarkan pada data dan informasi per Desember 2012, kecuali dinyatakan lain.

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain.

Dokumen KSK lengkap dalam format pdf tersedia pada web site Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>

Permintaan, komentar dan saran harap ditujukan kepada:

Bank Indonesia
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Grup Stabilitas Sistem Keuangan
Jl.MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia
Telepon: (+62-21) 381 8902, 381 8075
Fax: (+62-21) 351 8629
Email: BSSK@bi.go.id

Kajian Stabilitas Keuangan

(No.20, Maret 2013)



BANK INDONESIA

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Grup Stabilitas Sistem Keuangan

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Kata Pengantar.....	vii
Gambaran Umum	3
Bab 1. Kondisi Eksternal dan Internal	7
1.1. Potensi Kerawanan Eksternal.....	9
1.2. Potensi Kerawanan Internal.....	10
Boks 1.1. <i>Stress Test</i> Dampak Penurunan Ekspor terhadap Eksportir dan Pelemahan Kurs terhadap Importir ..	21
Bab 2. Ketahanan Sistem Keuangan.....	27
2.1. Struktur dan Ketahanan Sistem Keuangan	27
2.2. Risiko di Sistem Perbankan	28
2.3. Risiko Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lembaga Keuangan Bukan Bank	42
Bab 3. Tantangan dan Prospek Stabilitas Sistem Keuangan	55
3.1. Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan	55
3.2. Dampak Terhadap Sistem Perbankan	59
3.3. Prospek Ketahanan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan	63
Bab 4. Topik Khusus	67
4.1. Kerangka Pengawasan dan Pengaturan Shadow Banking.....	67
Boks 4.1. Bentuk <i>Shadow Banking</i> di Cina	69
4.2. Penguatan Infrastruktur Sistem Keuangan.....	70
Artikel.....	81
Artikel 1 Penetapan Suku Bunga Kredit Dalam Kerangka Basel II di Pasar Perbankan Indonesia.....	83
Artikel 2 Determinan Suku Bunga Kredit Modal Kerja Bank Umum di Indonesia	91

Daftar Tabel dan Grafik

Tabel

1.1	PDB Dunia	8
1.2	PDB Negara di Kawasan Euro	9
1.3	Pinjaman Luar Negeri Pemerintah	13
1.4.	Rasio Kemampuan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	13
1.5.	Hasil <i>Probability of Default</i> dengan Metode <i>Contigent Claim Analysis</i>	15
Tabel Boks 1.1.1	Kondisi Perkreditan Sektor Ekonomi Dengan Kandungan Komponen Impor Tinggi	21
Tabel Boks 1.1.2	Asumsi Penurunan Laba Importir Akibat Depresiasi Rupiah pada Masing-masing Sektor	23
Tabel Boks 1.1.3	Hasil <i>Stress Test</i> Pelemahan Nilai Tukar Terhadap Industri Perbankan	23
2.1.	Jumlah Lembaga Keuangan	27
2.2.	Indeks Tekanan Perbankan	28
2.3.	Perkembangan LDR Bank Umum	34
2.4.	Komposisi Alat Likuid Perbankan	34
2.5.	Perkembangan Laba/Rugi Industri Perbankan	35
2.6.	Perkembangan Profitabilitas dan Kredit per Kelompok Bank.....	36
2.7.	Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%)	37
2.8.	Perkembangan Permodalan Perbankan berdasarkan Kelompok Bank	39
2.9.	Perkembangan CAR berdasarkan Kelompok Bank	40
2.10.	Matriks Keterkaitan Antar Bank	42
2.11.	Kepemilikan SBN yang Dapat Diperdagangkan	45
2.12.	Sumber Pembiayaan dari Pasar Modal	49
2.13.	Indikator Keuangan PP	51
2.14.	Total Pembiayaan dan NPL Per Jenis Pembiayaan	51
2.15.	Perkembangan 11 Perusahaan Asuransi yang <i>Listing</i> pada KSEI	52
2.16.	Profil Asuransi	52
3.1.	Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	56
3.2.	CAR dan NPL	59
3.3.	<i>Heatmap</i> ITP dan Indikator Pembentuk ITP	63

Grafik

1.1	Perkembangan PDB Dunia.....	7
1.2	Perkembangan Total Ekspor dan Impor Indonesia	10
1.3	Perkembangan Harga Komoditas Dunia	10
1.4	Neraca Pembayaran Indonesia.....	10
1.5.	Peralihan Pangsa Ekspor Indonesia	11
1.6.	Inflasi Beberapa Negara ASEAN.....	11
1.7.	Komposisi Investasi Langsung dan Investasi Portofolio ke Indonesia.....	12
1.8.	Neraca Pembayaran Indonesia	12
1.9.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah	12
1.10.	Perkembangan Volatilitas Nilai Tukar Rupiah ..	12
1.11.	Pertumbuhan ROA dan ROE Perusahaan <i>Non-Financial yang Go Public</i>	14
1.12.	Perkembangan DER dan TL/TA Perusahaan <i>Non-Financial yang Go Public</i>	14
1.13.	Indikator Kunci Keuangan Korporasi	14
1.14.	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen..	16
1.15.	Indeks Ekspektasi Harga Pada 6 Bulan Yang Akan Datang	17
1.16.	Pertumbuhan Kredit & NPL ke Sektor Rumah Tangga	17
1.17.	Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya	18
1.18.	Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga yang Utama	18
1.19.	Perkembangan NPL Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya	19
1.20.	Komposisi Total Pengeluaran Rumah Tangga 2011 fi 2012	19
1.21.	Komposisi Aset Rumah Tangga	20
1.22.	Komposisi Sumber Utang Rumah Tangga	20
2.1.	Komposisi Aset Lembaga Keuangan	27
2.2.	Indeks Tekanan Perbankan	28
2.3.	Pertumbuhan Kredit Per Valuta	28
2.4.	Pertumbuhan Kredit Ekspor dan Impor.....	29
2.5.	Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan.....	29
2.6.	Pertumbuhan Kredit Per Sektor Ekonomi.....	29
2.7.	Pertumbuhan dan Pangsa Kredit Properti	30
2.8.	<i>Non-Performing Loans (NPL)</i>	30
2.9.	Pertumbuhan NPL Per Jenis Penggunaan.....	31
2.10.	Rasio NPL Per Jenis	31
2.11.	Rasio NPL Per Sektor Ekonomi	31
2.12.	Pertumbuhan NPL Per Valuta	31
2.13.	Rasio NPL Per Valuta	31
2.14.	Rasio NPL Kredit Properti	32
2.15.	Pangsa Pendanaan dan Pembiayaan Bank	32

Grafik

2.16.	Pertumbuhan DPK per Semester	33
2.17.	Pertumbuhan DPK Berdasarkan Golongan Pemilik	33
2.18.	Komposisi Deposito Valuta berdasarkan Jangka Waktu	33
2.19.	Komposisi Alat Likuid Perbankan	34
2.20.	Pangsa Penempatan Bank pada Bank Indonesia	35
2.21.	Pangsa Alat Likuid	35
2.22.	Komposisi Laba/Rugi Perbankan	36
2.23.	Komposisi Pendapatan Bunga Industri Perbankan (%)	36
2.24.	<i>Spread</i> Suku Bunga Rupiah Perbankan (%) ...	37
2.25.	Perkembangan Rasio ROA dan NIM Perbankan (%)	38
2.26.	Perkembangan Komponen Permodalan Perbankan	38
2.27.	Perkembangan CAR per Kelompok Bank.....	38
2.28.	Perkembangan Rasio BOPO (%)	40
2.29.	Pertumbuhan Kredit MKM (yoy)	41
2.30.	Perkembangan NPL Gross Kredit MKM Perbankan (%)	41
2.31.	Peta Stabilitas Pasar Keuangan	42
2.32.	Flows Non Residen: Saham, SBN, SBI	43
2.33.	Volatilitas PUAB Rupiah.....	43
2.34.	Volatilitas PUAB Valas	43
2.35.	Yield Curve SUN.....	44
2.36.	Harga SUN FR Benchmark	44
2.37.	VaR SUN per Tenor	45
2.38.	Pergerakan yield SUN	45
2.39.	<i>Maturity Profile</i> SUN	45
2.40.	IHSG dan Indeks Harga Saham Global	46
2.41.	IHSG Sektoral	46
2.42.	Volatilitas Saham Sektor Perbankan.....	46
2.43.	Volatilitas Bursa Saham Kawasan	47
2.44.	Kinerja Reksadana	47
2.45.	Aktivitas Reksadana	47
2.46.	Perkembangan pembiayaan kredit dan pasar modal	48
2.47.	Penerbitan surat-surat berharga melalui pasar modal	49
2.48.	Kinerja Perusahaan Pembiayaan	50
2.49.	Pangsa Pembiayaan PP	50
2.50.	Sumber Pendanaan PP	50
2.51.	Pangsa 10 Perusahaan Asuransi <i>Go Public</i>	52

Grafik

3.1.	Perkembangan Aliran Investasi Langsung (<i>Private Direct Investment</i>)	57
3.2.	Perkembangan Aliran Investasi Portofolio (<i>Private Portfolio</i>)	57
3.3.	Volume Perdagangan Dunia.....	58
3.4.	<i>Stress test</i> risiko kredit	59
3.5.	<i>Maturity profile</i> rupiah	60
3.6.	<i>Stress test</i> suku bunga	60
3.7.	<i>Stress test</i> harga obligasi negara	61
3.8.	Posisi Devisa Netto per kelompok bank	61
3.9.	<i>Stress test</i> nilai tukar	61
3.10.	Hasil <i>stress test</i> kelompok bank	62
3.11.	Proyeksi Indeks Tekanan Perbankan Setelah <i>Stress Test</i>	62
3.12.	Pertumbuhan Kredit (%yoy)	63
3.13.	Pertumbuhan DPK (%yoy)	63
3.14.	Perkembangan NPL (%)	64
3.15.	Proyeksi Indeks Tekanan Perbankan	64
	Grafik Box 4.1.1. Model operasional bisnis <i>bank-trust</i>	69
4.1.	Perkembangan Fraud Pemalsuan Kartu Kredit Sebelum dan Sesudah Penggunaan Teknologi <i>Chip</i>	72
4.2.	Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS	72
4.3.	Perkembangan Transaksi BI-SSS	73
4.4.	Perkembangan Transaksi SKNBI	73
4.5.	Perkembangan Transaksi Kartu ATM/Debet ...	73
4.6.	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	74
4.7.	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	74

Daftar Singkatan

ADB	<i>Asian Development Bank</i>	IMF	<i>International Monetary Fund</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	IOSCO	<i>International Organization of Securities Commissions</i>
AS	Amerika Serikat	JCI	<i>Jakarta Composite Index</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>	JPSK	Jaring Pengaman Sistem Keuangan
ATMR	Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
Bapepam- LK	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	KI	Kredit Investasi
BCBS	<i>Basel Committee on Banking Supervisory</i>	KK	Kredit Konsumsi
BIS	<i>Bank for International Settlement</i>	KMK	Kredit Modal Kerja
BNM	Bank Negara Malaysia	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
BOPO	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	LBU	Laporan Bulanan Bank Umum
BPD	Bank Pembangunan Daerah	LC	<i>Letter of Credit</i>
BPR	Bank Perkreditan Rakyat	LDR	<i>Loan to Deposit Ratio</i>
BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	L/R	Laba Rugi
bps	<i>basis point</i>	MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
BRC	<i>BPD Regional Champion</i>	MKM	Mikro, Kecil, dan Menengah
BRIC	Brazil, Rusia, India, dan China	NAB	Nilai Aktiva Bersih
BUS	Bank Umum Syariah	NII	<i>Net Interest Income</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	NIM	<i>Net Interest Margin</i>
CC	<i>Code of Conduct</i>	NPF	<i>Non Performing Financing</i>
CCP	<i>Central Counter Parties</i>	NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
CDS	<i>Credit Default Swap</i>	NPL	<i>Non Performing Loan</i>
CRA	<i>Credit Rating Agency</i>	OPEC	<i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
CRBC	<i>China Banking Regulations Commissions</i>	OTC	<i>Over the Counter</i>
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>	PD	<i>Probability of Default</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga	PDB	Produk Domestik Bruto
DSM	Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter	PDN	Posisi Devisa Neto
EFSF	<i>European Financial Stability Facility</i>	PIIGS	<i>Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain</i>
ETF	<i>Exchange-Traded Fund</i>	PLN	Pinjaman Luar Negeri
EU	<i>European Union</i>	PMA	Penanaman Modal Asing
FASB	<i>Financial Accounting Standard Board</i>	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
FSA	<i>Financial Service Authority</i>	PMK BI	Protokol Manajemen Krisis Bank Indonesia
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>	PNS	Pegawai Negeri Sipil
FSB	<i>Financial Supervisory Board</i>	PP	Perusahaan Pembiayaan
FSI	<i>Financial Stability Index</i>	RBB	Rencana Bisnis Bank
G20	<i>The Group of Twenty</i>	ROA	<i>Return on Asset</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>	ROE	<i>Return on Equity</i>
GIM	Gerakan Indonesia Menabung	SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
G-SIFI	<i>Global Systemically Important Financial Institutions</i>	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
GWM	Giro Wajib Minimum	SBN	Surat Berharga Negara
IAIS	<i>International Association of Insurance Supervisor</i>	SIFI	<i>Systemically Important Financial Institutions</i>
IASB	<i>International Accounting Standard Board</i>	SUN	Surat Utang Negara
IDMA	<i>Inter-dealer Market Association</i>	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
IHK	Indeks Harga Konsumen	TL/TA	Rasio total kewajiban terhadap total aset
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	TPI	Tim Pengendalian Inflasi
		TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
		UMP	Upah Minimum Provinsi

Kata Pengantar

Kajian Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) diterbitkan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam penerbitan KSK No.20, Maret 2013 ini, diulas berbagai situasi dan kondisi yang melingkupi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia, serta respon kebijakan yang telah ditempuh Bank Indonesia di semester II 2012 untuk memelihara kestabilan sistem keuangan.

Di tengah ekonomi yang terus berekspansi dan ketidakseimbangan global, Bank Indonesia menghadapi tantangan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah yang lebih produktif dan menghindari potensi kerawanan pada perekonomian, seperti dari pertumbuhan kredit yang terlalu tinggi atau gelembung harga aset. Oleh karena itu, selain tetap mempertahankan BI rate di level 5,75 persen sejak Maret 2012, Bank Indonesia juga menerapkan instrumen-instrumen makroprudensial, seperti *Loan to Value Ratio* (LTV) dan *Down Payment* (DP), dan berbagai kombinasi kebijakan lainnya untuk mengelola permintaan domestik. Selain itu, untuk penguatan struktur pasokan devisa yang bersumber dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), termasuk DHE migas, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*).

Selanjutnya dalam kerangka pemeliharaan stabilitas sistem keuangan ini pula, Bank Indonesia telah mengembangkan protokol manajemen krisis nilai tukar dan perbankan, serta menyempurnakan ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Protokol manajemen krisis Bank Indonesia ini telah terintegrasi dengan protokol manajemen krisis tingkat nasional, dibawah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Namun pada hakikatnya FKSSK dan penanganan krisis di sektor keuangan ini masih perlu dipayungi oleh UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), agar lebih optimal dalam mengantisipasi dan menanggulangi krisis keuangan yang bersifat sistemik.

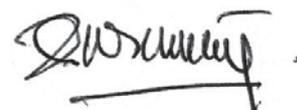
Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan ekonomi makro di tahun 2013 masih akan berhadapan dengan risiko global dan kompleksitas permasalahan domestik yang begitu besar, Bank Indonesia akan terus melakukan kalibrasi bauran kebijakan yang terdiri dari instrumen suku bunga, nilai tukar, dan makroprudensial. Selain itu, dalam upaya membangun perekonomian yang efisien, inovatif, dan tumbuh berkesinambungan, Bank Indonesia juga akan terus mengoptimalkan pemerataan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat (inklusif).

Bank Indonesia patut untuk tetap optimis, karena Indonesia memiliki modal dasar yaitu perekonomian yang telah teruji stabil, permintaan domestik dengan basis kelas menengah yang tengah tumbuh, serta ketersediaan *policy space* yang cukup memadai untuk meredam risiko global. Besarnya tantangan yang akan dihadapi pada tahun-tahun kedepan tidaklah lebih mudah dari tahun-tahun yang telah berlalu. Namun, kita tidak boleh kehilangan harapan untuk bersikap optimis. Potensi kemampuan dan sumber daya sebagai bangsa masih begitu besar.

Semoga hasil pemantauan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bidang stabilitas sistem keuangan yang dimuat dalam KSK ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada *stakeholders*. Selanjutnya, Bank Indonesia tetap terbuka terhadap saran, komentar dan kritik dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan kajian, *assessment* dan pemantauan sistem keuangan di masa datang.

Jakarta, Maret 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA



Darmin Nasution

halaman ini sengaja dikosongkan

Gambaran Umum

halaman ini sengaja dikosongkan

Gambaran Umum

Ketahanan dan kestabilan sistem keuangan di semester II 2012 cukup terjaga walaupun masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan risiko makroekonomi yang meningkat.

Berkaitan dengan dinamika tersebut, perbankan dan pelaku di industri/pasar keuangan diharapkan untuk terus mewaspadai kemungkinan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat dari ketidakpastian penanganan krisis di Eropa dan kekhawatiran *fiscal cliff* di Amerika Serikat, dan turunnya harga komoditas ekspor di pasar global. Selain itu, perlu juga diperhatikan potensi meningkatnya risiko kelangkaan likuiditas dollar di pasar keuangan global dan domestik. Bank-bank di Indonesia, khususnya yang memiliki ketergantungan tinggi pada *global wholesale funding* perlu melakukan *stress test* dan merevisi *liquidity contingency plan* dalam rangka memantau dan memitigasi risiko likuiditasnya.

Risiko kredit sektor korporasi dan rumah tangga di semester II 2012 masih rendah, dan diperkirakan masih akan terjaga kecuali sektor yang mengalami penurunan ekspor. *Non-performing loan* perbankan dan *probability of default* dari sektor korporasi harus diwaspadai karena dapat berpotensi meningkat. Hal ini akan mengakibatkan kerentanan beberapa sektor ekonomi sehingga memunculkan potensi kerawanan. Berkaitan dengan hal ini, pelaku usaha dan perbankan diharapkan untuk mewaspadai kemungkinan meningkatnya risiko kredit tersebut agar tidak mengganggu kinerja korporasi dan perbankan.

Fungsi intermediasi perbankan masih tumbuh cukup tinggi namun dengan tingkat pertumbuhan yang cenderung melambat. Penyaluran kredit oleh

perbankan kepada sektor riil khususnya kepada sektor produktif perlu untuk terus ditingkatkan khususnya kredit investasi dan modal kerja. Berkaitan dengan hal ini, perbankan dan pelaku usaha agar berupaya untuk terus meningkatkan fungsi intermediasi di sektor-sektor produktif, terutama sektor pertanian, industri manufaktur, dan infrastruktur; dan agar fokus dalam meningkatkan kualitas kredit sehingga dapat menjaga *non-performing loan* kredit investasi dan modal kerja tetap berada pada level yang rendah.

Dari sisi likuiditas, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat namun kredit yang meningkat diperkirakan akan berdampak kepada ketersediaan likuiditas di beberapa bank dan peningkatan kompetensi untuk memperoleh dana pihak ketiga. Untuk itu, perbankan dan pelaku di pasar keuangan diharapkan agar menjaga kecukupan likuiditas dan mewaspadai timbulnya keketatan di pasar uang dan melakukan inovasi yang kondusif dalam mencari dana.

Dari pemantauan sistem keuangan semester II ini dapat disimpulkan bahwa meskipun ketidakpastian perekonomian dunia terus meningkat namun ketahanan sistem keuangan diperkirakan masih akan terjaga di semester I 2013. Hal ini terutama didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan lebih baik walau tidak seoptimis perkiraan sebelumnya. Pelaku usaha harus tetap optimis namun berhati-hati terhadap potensi tekanan eksternal yang masih berlanjut dan risiko makroekonomi Indonesia yang berimplikasi kepada turunnya kinerja sektor keuangan.

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1

Kondisi Eksternal dan Internal

halaman ini sengaja dikosongkan

Setelah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9% yoy di 2011, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 kembali mengalami perlambatan menjadi sebesar 3,2% yoy atau lebih rendah dibandingkan prediksi IMF yang sebesar 3,3%. Perlambatan ini terutama didorong oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kawasan Eropa yang cukup dalam di 2012 menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara maju di 2012 hanya tumbuh 1,3% yoy dari 1,6% yoy di 2011. Kontraksi pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh negara-negara berkembang di Asia yang merupakan mitra dagang utama Indonesia yaitu Cina dan India, yang pada tahun 2012 hanya tumbuh masing-masing sebesar 7,8% dan 4,5%. Kondisi ini meningkatkan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia dan struktur keuangan walaupun masih terjaga.

1.1. POTENSI KERAWANAN EKSTERNAL

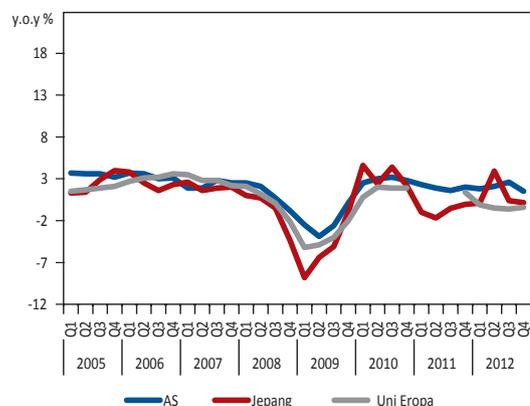
1.1.1 Kondisi Ekonomi Global

Perekonomian dunia di 2012 berjalan lebih lambat dibandingkan 2011. Hal ini utamanya disebabkan oleh ekonomi Eropa yang masih mengalami kontraksi akibat krisis utang. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat (AS) mulai membaik meskipun masih rentan dan dibayangi isu keterbatasan stimulus fiskal (*fiscal cliff*).

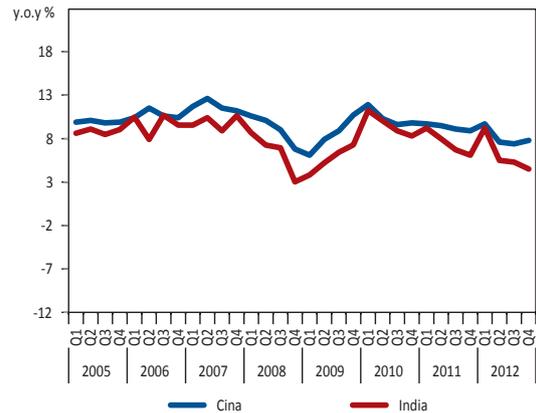
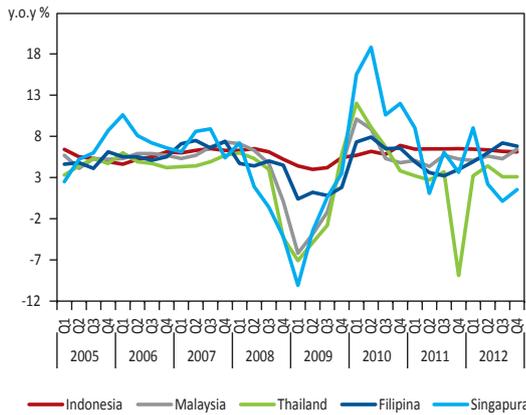
Perlambatan ekonomi di negara maju tersebut yang juga diikuti dengan penurunan harga komoditas menekan kinerja ekspor negara berkembang sehingga

mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang khususnya Cina dan India. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Cina dan India masing-masing sebesar 7,8% yoy dan 4,5% yoy, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 9,3% yoy dan 7,9% yoy. Berbeda dengan negara berkembang lainnya, permintaan domestik yang masih tetap tinggi di negara ASEAN-5 dan mulai membaiknya kegiatan produksi di negara-negara *Middle East* dan Afrika Utara menyebabkan pertumbuhannya justru tumbuh lebih tinggi di 2012 dibandingkan 2011. Kenaikan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara ASEAN, *Middle East* dan Afrika Utara tersebut cukup mampu menahan penurunan yang lebih dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Sehingga pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi negara berkembang tumbuh sebesar 5,1% yoy, lebih lambat dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,3% yoy.

Grafik 1.1 (a)
Perkembangan PDB Dunia



Grafik 1.1 (b)
Perkembangan PDB Dunia



Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Tabel 1.1
PDB Dunia

dalam %, yoy

Kategori	2011	2012	Proyeksi	
			2013	2014
World Output ¹⁾	3,9	3,2	3,5	4,1
Advanced Economies	1,6	1,3	1,4	2,2
United States	1,8	2,3	2,0	3,0
Euro Area	1,4	(0,4)	(0,2)	1,0
Germany	3,1	0,9	0,6	1,4
France	1,7	0,2	0,3	0,9
Italy	0,4	(2,1)	(1,0)	0,5
Spain	0,4	(1,4)	(1,5)	0,8
Japan	(0,6)	2,0	1,2	0,7
United Kingdom	0,9	(0,2)	1,0	1,9
Canada	2,6	2,0	1,8	2,3
Other Advanced Economies ²⁾	3,3	1,9	2,7	3,3
Newly Industrialized Asian Economies	4,0	1,8	3,2	3,9
Emerging & Developing Countries ³⁾	6,3	5,1	5,5	5,9
Central and Eastern Europe	5,3	1,8	2,4	3,1
Commonwealth of Independence States	4,9	3,6	3,8	4,1
Russia	4,3	3,6	3,7	3,8
Excluding Russia	6,2	3,9	4,3	4,7
Developing Asia	8,0	6,6	7,1	7,5
China	9,3	7,8	8,2	8,5
India	7,9	4,5	5,9	6,4
ASEAN-5 ⁴⁾	4,5	5,7	5,5	5,7
Latin America & the Caribbean	4,5	3,0	3,6	3,9
Brazil	2,7	1,0	3,5	4,0
Mexico	3,9	3,8	3,5	3,5
Middle East & North Africa	3,5	5,2	3,4	3,8
Sub-Saharan Africa ⁵⁾	5,3	4,8	5,8	5,7
South Africa	3,5	2,3	2,8	4,1

Keterangan:

Sumber: World Economic Outlook, Januari 2013

- 1) The quarterly estimates and projections account for 90 percent of the world purchasing -power- parity weights,
- 2) Excludes the G7 (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States) and Euro Area countries,
- 3) The quarterly estimates and projections account for approximately 80 percent of the emerging market and developing economies,
- 4) Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam,
- 5) Regional and global aggregates include South Sudan,

1.1.2. Kondisi Eropa

Ekonomi kawasan Euro di triwulan akhir 2012 **masih berkontraksi yang didorong oleh pelemahan semua komponen PDB**. Kontraksi ekonomi Eropa diperkirakan akan terus berlanjut sampai dengan triwulan IV 2013. Diperkirakan akan terjadi penurunan PDB di semua negara kawasan termasuk negara inti Euro yang selama ini menjadi penopang ekonomi kawasan seperti Prancis, Spanyol, dan Italia, kecuali Jerman. Kontraksi didorong oleh seluruh komponen PDB. *Sovereign debt crisis* yang terus memburuk di Kawasan Euro diperkirakan semakin memperburuk sektor tenaga kerja dan menggerus daya beli masyarakat sehingga konsumsi masyarakat semakin menurun. Sejalan dengan itu, **investasi juga menurun** akibat meningkatnya ketidakpastian dan sentimen negatif pelaku usaha dan menurunnya aktivitas ekonomi negara di kawasan Euro dan global. **Krisis perbankan** yang terjadi yang berdampak negatif pada penyaluran pembiayaan semakin membuat perekonomian Kawasan Euro berkontraksi.

Tabel 1.2
PDB Negara di Kawasan Euro

Negara	2009	2010	Proyeksi IMF				2012*				2013*			
			WEO-Apr-12		WEO-Okt-12		TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
			2012	2013	2012	2013								
Kawasan Euro	-4.3	1.8	-0.3	0.9	-0.4	0.2	-0.1	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.4	-0.1	0.5
Jerman	-5.1	3.6	0.6	1.5	0.9	0.9	1.2	1.0	0.7	1.0	0.5	0.5	0.7	1.3
Perancis	-2.6	1.4	0.5	1.0	0.1	0.4	0.2	0.3	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.3
Italia	-5.2	1.3	-1.9	-0.3	-2.3	-0.7	-1.3	-2.5	-2.8	-2.4	-1.8	-1.1	-0.7	-0.2
Spanyol	-3.7	-0.1	-1.8	0.1	-1.5	-1.3	-0.7	-1.4	-1.6	-2.1	-2.2	-2.0	-1.7	-0.8
Yunani	-2.3	-4.4	-4.7	0	-6.0	-4.0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Portugal	-2.5	1.3	-3.3	0.3	-3.0	-1.0	-2.3	-3.3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Irlandia	-7.0	-0.4	0.5	2.0	0.4	1.4	1.2	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: World Economic Outlook – IMF

1.1.3. Kondisi Asia

Kinerja eksternal negara emerging Asia juga cenderung masih melambat. **Perlambatan pertumbuhan ekspor** terjadi di hampir seluruh negara Asia khususnya di Cina, India, Jepang, Singapura, dan Indonesia. Beberapa negara seperti India, Jepang, dan Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekspor yang negatif. Dari berbagai negara di Asia, Thailand justru mencatat pertumbuhan ekspor yang terus meningkat yang didorong oleh membaiknya kondisi industri dan jalur produksi pasca banjir besar di akhir 2011. Rendahnya kinerja ekspor tersebut sejalan dengan **pelemahan perekonomian Kawasan Eropa dan belum begitu pulihnya perekonomian AS dan negara maju lainnya**. Pelemahan ekspor ke negara maju tersebut juga memberikan dampak terhadap melemahnya ekspor antarnegara kawasan di Asia yang sebelumnya diharapkan masih dapat tumbuh tinggi. Resiliensi perekonomian ASEAN akan menghadapi tantangan sejalan dengan masih lemahnya perekonomian global khususnya di negara-negara yang tergantung pada penerimaan ekspor seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

1.1.4. Kondisi Jepang

Perekonomian Jepang yang diharapkan kembali pulih pasca bencana 2011 juga menunjukkan **perkembangan yang cenderung memburuk**. Berbagai data aktivitas

perekonomian terkini menunjukkan tren aktivitas ekonomi yang menurun. Data *Coincident index* terus menurun untuk kali ke tujuh berurutan dan di Oktober 2012 menurun sebesar 0,9 poin mtm ke tingkat 90,6. Data indeks produksi yang terus mengalami kontraksi sejak Mei 2012, di November kembali berkontraksi sebesar 5,8% yoy. Para pengamat memperkirakan penurunan indeks ini adalah gambaran ekonomi Jepang yang mengarah ke resesi. Hal itu juga didukung oleh hasil survei Tankan Desember 2012 yang juga mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi memburuk baik di sektor manufaktur maupun nonmanufaktur. Selain itu, **beberapa indikator konsumsi lain masih belum menunjukkan pergerakan ke arah yang positif**. Indikator penjualan kendaraan masih berada pada tingkat deselerasi 3,3% yoy pada November 2012. Kondisi tersebut mendorong Bank of Japan (BOJ) untuk semakin melonggarkan kebijakan moneter melalui peningkatan program pembelian aset sebesar JPY 10 triliun. Dengan demikian total program pembelian aset BOJ hingga akhir 2013 berjumlah JPY 101 triliun.

1.2. POTENSI KERAWANAN INTERNAL

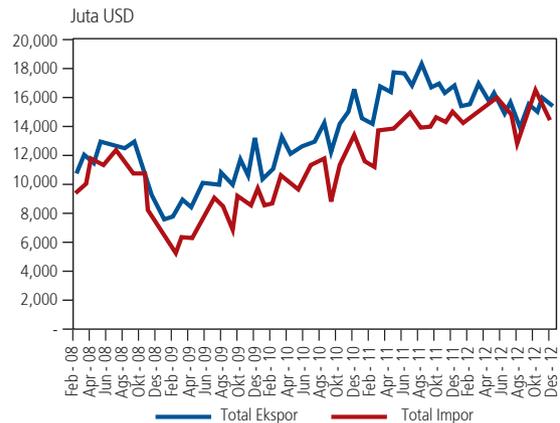
1.2.1. Kondisi Makroekonomi dan Sektor Riil

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, kinerja ekspor Indonesia pada 2012 menurun sementara impor masih tinggi. Namun

demikian, konsumsi domestik serta investasi yang cukup kuat mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya perdagangan dunia, terutama di negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Cina dan India sebagai dampak ketidakpastian kondisi perekonomian global, terus menekan kinerja ekspor Indonesia. Dibandingkan dengan angka ekspor 2011, kinerja ekspor selama 2012 menurun. Sampai dengan Desember 2012, total ekspor mencapai USD188,2 miliar atau turun 6,2% dibanding tahun sebelumnya, apabila dibandingkan dengan semester I 2012, ekspor semester II 2012 menurun sebesar 3,8%. Penurunan ekspor dipengaruhi oleh melemahnya permintaan dari beberapa negara mitra dagang Indonesia dan menurunnya harga komoditas ekspor terutama yang berbasis sumber daya alam (SDA) seperti komoditas hasil pertanian (kelapa sawit) dan batubara (Grafik 1.2).

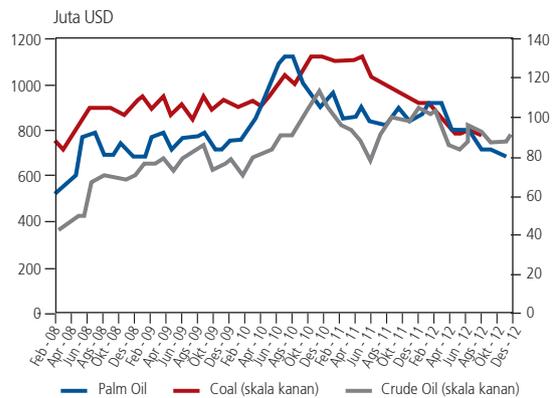
Sementara ekspor mengalami penurunan, impor Indonesia masih tetap tinggi seiring dengan tetap kuatnya permintaan domestik dan masih tingginya kegiatan investasi yang memerlukan komponen impor. Kinerja impor selama 2012 mencapai USD179,7 miliar, tumbuh 7,8% jika dibandingkan dengan 2011 yang mencapai USD166,7 miliar. Namun demikian, pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan di 2011 di mana impor tumbuh 30,8%. Sedangkan bila dibandingkan dengan semester sebelumnya, impor di semester II 2012 mengalami penurunan sebesar 3,1%. Pertumbuhan impor yang tinggi di tengah-tengah perlambatan ekspor dan konsumsi BBM dalam negeri yang meningkat, menyebabkan defisit transaksi berjalan di akhir semester II 2012 mencapai USD13,1 miliar. Angka defisit ini lebih besar dibandingkan dengan defisit pada akhir semester I 2012 yaitu sebesar USD11,1 miliar. Di tahun 2012 defisit transaksi berjalan mencapai USD24,2 miliar atau 2,7% dari PDB.

Grafik 1.2
Perkembangan Total Ekspor dan Impor Indonesia



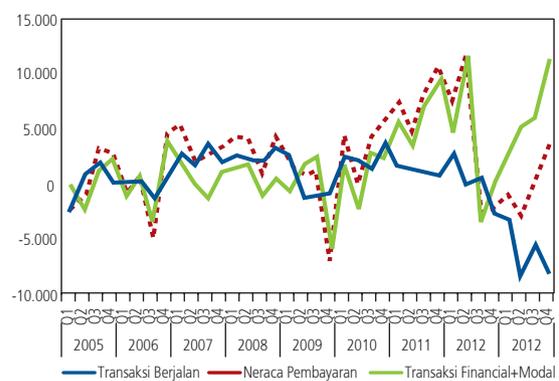
Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Grafik 1.3
Perkembangan Harga Komoditas Dunia



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.4
Neraca Pembayaran Indonesia

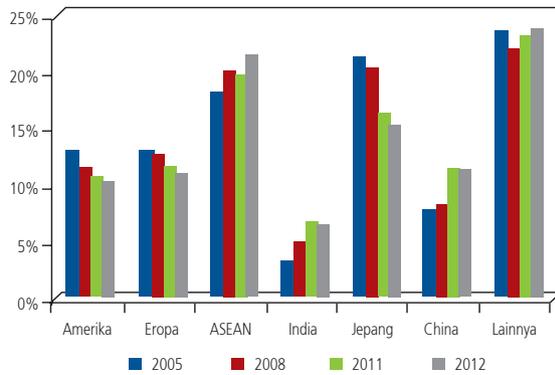


Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Dalam upaya untuk meminimalisir menurunnya ekspor dan memperkecil defisit transaksi berjalan, dilakukan diversifikasi tujuan ekspor Indonesia yang semula ditujukan ke negara-negara maju serta beberapa negara *emerging market* seperti Cina dan India, kini juga mulai

diarahkan ke negara-negara ASEAN dan negara lainnya seperti Korea Selatan dan Taiwan (Grafik 1.5).

Grafik 1.5
Peralihan Pangsa Ekspor Indonesia

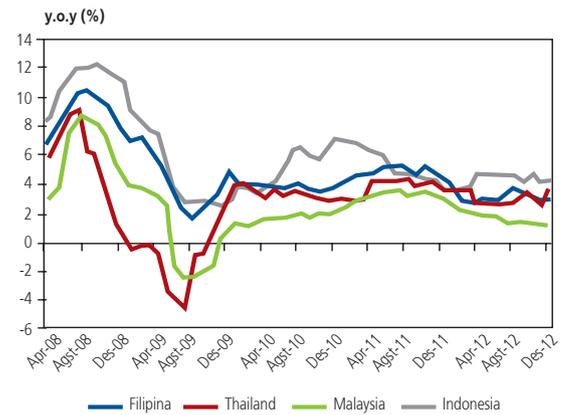


Sumber: SEKI, Bank Indonesia

Pergeseran negara tujuan ekspor komoditas produksi Indonesia, konsumsi domestik serta investasi yang cukup kuat masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2012 sebesar 6,2% menunjukkan penurunan dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2011. Namun, pertumbuhan tersebut masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata negara ASEAN 5 sebesar 5,7%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik tersebut salah satunya ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang cukup besar, yang antara lain ditunjukkan oleh masih relatif tingginya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2012 yaitu sebesar 116,4 (IKK Desember 2011 sebesar 116,6).

Di sisi harga, tekanan inflasi selama tahun 2012 cenderung menurun. Pada akhir semester II 2012, inflasi IHK mencapai level 4,3% (yoy), masih berada di kisaran target inflasi 2012 sebesar 4,5% plus minus 1 (Grafik 1.6). Penurunan tingkat inflasi juga dialami oleh beberapa negara kecuali Jepang, namun Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat inflasi tertinggi di negara-negara ASEAN-5.

Grafik 1.6
Inflasi Beberapa Negara ASEAN



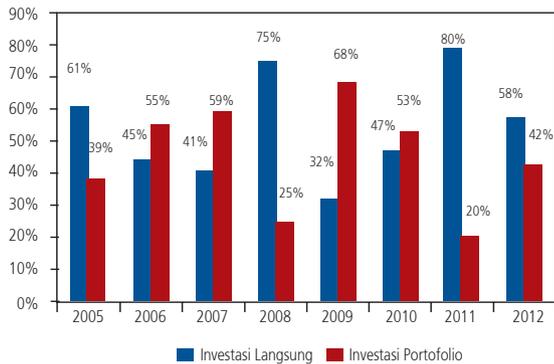
Sumber: Bloomberg

1.2.2. Investasi dan Neraca Pembayaran

Selama 2012 aliran investasi masuk ke Indonesia mencapai USD34,5 miliar atau naik 42,2% dibandingkan 2011. Derasnya arus investasi yang masuk ke Indonesia dipengaruhi oleh relatif stabilnya kondisi makroekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Di samping itu, masuknya investasi ke Indonesia juga didukung oleh iklim usaha yang kondusif, tingginya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menunjukkan masih tingginya daya beli konsumen serta dimasukkannya Indonesia ke peringkat investment grade oleh beberapa lembaga pemeringkat internasional di akhir tahun 2011 dan 2012. Berdasarkan pangsaannya, selama 2012 pangsa investasi langsung (FDI) terhadap total investasi ke Indonesia menurun dari sebesar 80% di tahun 2011 menjadi 58% di 2012, sementara porsi investasi portofolio naik dari 20% di 2011 menjadi 42% di tahun 2012 (Grafik 1.7).

Selama tahun 2012, sektor yang memperoleh tambahan investasi langsung adalah sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar USD955 juta, diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar USD828 juta dan sektor transportasi, pergudangan & komunikasi sebesar USD413 juta.

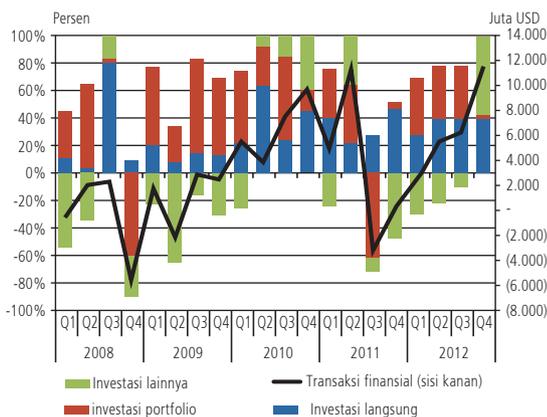
Grafik 1.7
Komposisi Investasi Langsung dan Investasi Portofolio ke Indonesia



Sumber: SEKI-Bank Indonesia

Meski terdapat tekanan krisis keuangan global, secara keseluruhan selama tahun 2012, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mencatat surplus sebesar USD0,2 miliar. Angka surplus NPI ini menurun signifikan jika dibandingkan dengan kondisi NPI selama tahun 2011 di mana mencatat surplus sebesar USD11,9 miliar. Cadangan devisa Indonesia pada posisi akhir semester II 2012 tercatat sebesar USD112,8 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan posisi akhir semester I 2012 sebesar USD106,5 miliar atau setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

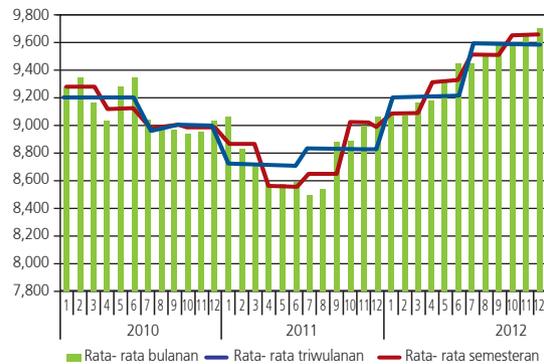
Grafik 1.8
Neraca Pembayaran Indonesia



Sumber: Bloomberg

Ketidakpastian kondisi global turut memberikan tekanan pada pergerakan nilai tukar rupiah sehingga selama semester II 2012, nilai tukar rupiah mengalami depresiasi, yakni turun sekitar 381 poin dibandingkan semester sebelumnya hingga berada pada level Rp9.578 per dollar AS (Grafik 1.9).

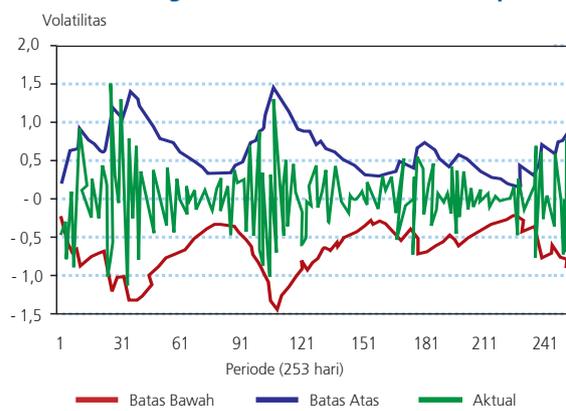
Grafik 1.9
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah



Sumber: Bloomberg, diolah

Namun, depresiasi nilai tukar rupiah sedikit tertahan di akhir semester II 2012 seiring dengan langkah Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Rata-rata volatilitas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS selama semester II 2012 relatif sama dibandingkan dengan semester sebelumnya yaitu sebesar 0,19% (Grafik 1.10).

Grafik 1.10
Perkembangan Volatilitas Nilai Tukar Rupiah



Sumber: Bloomberg, diolah

1.2.3. Kondisi Sektor Pemerintah

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masih berada dalam batas aman (di bawah 3% dari PDB). APBN untuk semester II 2012 mengalami defisit Rp146 Triliun (1,77% terhadap PDB). Angka defisit ini masih berada di bawah target defisit yang diperkirakan yaitu sebesar Rp190,1 Triliun (2,23% terhadap PDB). Meningkatnya defisit anggaran jika dibandingkan dengan defisit tahun 2011 terutama karena adanya kenaikan belanja negara untuk subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai 141,3% dari pagu APBN-P 2012.

Sementara itu, pinjaman luar negeri Pemerintah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan semester I 2012. Pada akhir semester II 2012, pinjaman luar negeri Pemerintah telah mencapai USD126,1 miliar atau setara dengan Rp1.223 triliun dengan kurs Rp9.700 per USD atau mencapai 14,3% dari PDB 2012.

Tabel 1.3
Pinjaman Luar Negeri Pemerintah

Juta dolar AS

	Jun 2011	Sep 2011	Des 2011	Mar 2012	Jun 2012	Sep 2012	Des 2012 ***
Pemerintah Pusat	114,887	112,962	112,427	112,502	112,869	115,037	116,187
Otoritas Moneter	13,222	10,272	6,215	5,880	5,298	5,603	9,932
Total	128,109	123,234	118,642	118,382	118,167	120,640	126,119

Sumber: SEKI-Bank Indonesia

***) Angka sementara (sumber: Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Februari 2013)

Tekanan yang diakibatkan menurunnya ekspor menyebabkan penurunan kemampuan membayar utang luar negeri Pemerintah yang ditunjukkan oleh peningkatan angka *Debt Service Ratio* (rasio antara pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor) dari 36,7% (akhir semester I 2012) menjadi 39,5% (akhir semester II 2012).

1.2.4. Kondisi Sektor Korporasi

Meskipun tekanan penurunan *demand* ekspor masih berlanjut akibat krisis ekonomi global, pelaku usaha masih optimis bahwa akan tetap ada ekspansi bisnis. Tekanan inflasi yang terkendali dan stabilitas nilai tukar meningkatkan optimisme pelaku usaha terhadap situasi bisnis untuk 6 bulan ke depan sebagaimana tercermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (akhir semester II 2012).

Namun, melambatnya aktivitas perdagangan dunia mulai memberikan pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan-perusahaan publik *non financial*. Hal ini tercermin dari melemahnya kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut yang antara lain terlihat dari menurunnya rasio ROA dan ROE pada triwulan III 2012 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2012, ROA perusahaan publik *non financial* adalah 1,77%. Angka ini turun 5,4% (yoy) dibandingkan ROA pada triwulan III 2011 sebesar 1,88%. Penurunan ROA juga diiringi dengan penurunan ROE yang turun dari 3,88% pada triwulan III 2011 menjadi

Tabel 1.4
Rasio Kemampuan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah

Juta dolar AS

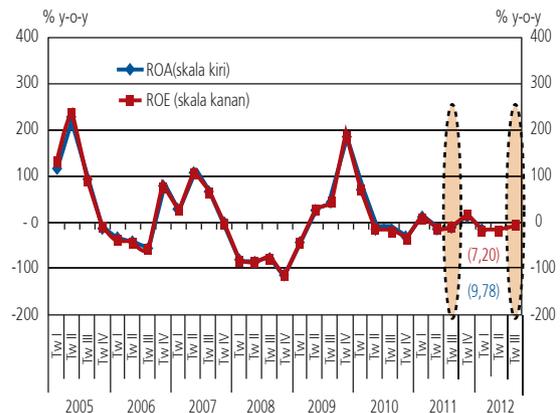
	2010				2011				2011			
	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4	Tw.1	Tw.2	Tw.3	Tw.4
Cadangan devisa	71,823	76,321	86,551	96,207	105,709	119,655	114,503	110,123	110,493	106,502	110,172	112,781
Dalam bulan impor	6,7	6,0	6,9	7,2	7,4	7,2	7,1	6,4	6,2	5,8	6,1	6,1
<i>Debt Service Ratio</i> (%)	21,2%	23,2%	20,3%	23,7%	18,4%	21,9%	19,8%	23,9%	30,3%	36,7%	34,9%	39,5%

Sumber: SEKI-Bank Indonesia

3,67% pada triwulan III 2012 atau mengalami penurunan sebesar 5,4% (Grafik 1.11). Melemahnya kinerja profitabilitas juga terlihat di beberapa indikator operasional seperti meningkatnya *collection period* dari 146 hari (triwulan III 2011) menjadi 183 hari (triwulan III 2012) yang mengindikasikan bahwa waktu penerimaan *cash* yang menjadi lebih lama, serta turunnya *inventory turn over ratio* dari sebelumnya 1,9 (triwulan III 2011) menjadi 1,8 (triwulan III 2012) yang mengindikasikan turunnya volume penjualan. Namun, likuiditas perusahaan terlihat membaik yang tercermin dari peningkatan *current ratio* dari semula 149,5% (triwulan III 2011) menjadi 154,2% (triwulan III 2012) dan *quick ratio* juga menunjukkan peningkatan dari 109,7% (triwulan III 2011) menjadi 110,8% (triwulan III 2012). Peningkatan likuiditas ditopang oleh adanya peningkatan aset lancar yang didominasi oleh peningkatan *inventory* sebesar 23,8%. Meskipun kondisi likuiditas meningkat, namun peningkatan likuiditas yang didominasi oleh kenaikan *inventory* menunjukkan kinerja penjualan perusahaan yang melambat.

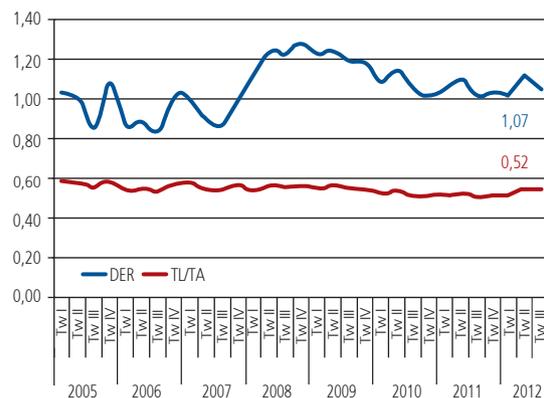
Dalam hal pembiayaan, sektor korporasi publik masih berhati-hati dalam menggunakan dana pinjaman untuk mendukung peningkatan usahanya. Komposisi utang jangka pendek secara agregat sedikit lebih besar dari utang jangka panjang dan komposisi ini relatif tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa utang korporasi publik masih relatif terjaga. Hal ini terlihat dari relatif stabilnya rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 1,1 (triwulan III 2012) dan rasio solvabilitas (total liabilities terhadap total aset) sebesar 0,5 (triwulan III 2012) (Grafik 1.12).

Grafik 1.11
Pertumbuhan ROA dan ROE Perusahaan Non-Financial yang Go Public



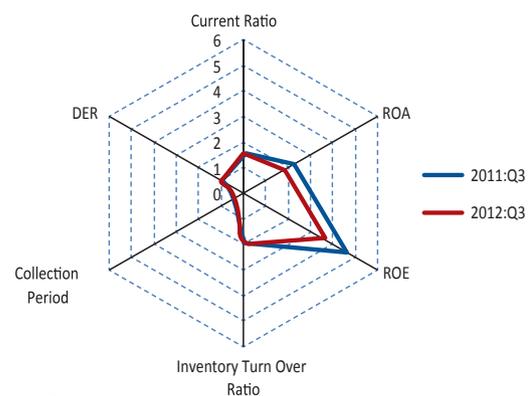
Sumber: Bloomberg

Grafik 1.12
Perkembangan DER dan TL/TA Perusahaan Non-Financial yang Go Public



Sumber: Bloomberg

Grafik 1.13
Indikator Kunci Keuangan Korporasi



Sumber: Bloomberg, diolah

Di waktu mendatang, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 masih dibayangi oleh perlambatan ekonomi global. Namun demikian, masih kuatnya daya beli masyarakat, tingginya keyakinan konsumen dan cukup besarnya investasi mampu mendorong kinerja korporasi untuk tetap tumbuh positif.

Terdapat beberapa faktor sumber kerawanan yang perlu terus diantisipasi karena dapat mengancam kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam kaitannya dengan stabilitas sistem keuangan di antaranya adalah risiko kredit dan risiko nilai tukar. Berdasarkan perhitungan *probability of default* perusahaan publik *non financial*, *probability of default* untuk posisi triwulan III 2012 adalah sebesar 1,8%. Angka ini menurun dibandingkan *probability of default* pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,4% (Tabel 1.5). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi keuangan korporasi publik *non financial* menunjukkan perbaikan dalam kemampuannya menyelesaikan kewajiban keuangan. Meskipun secara agregat *probability of default* mengalami perbaikan, namun perlu diwaspadai beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan *probability of default* antara lain sektor pertambangan dan properti.

Sejalan dengan penurunan harga beberapa komoditas ekspor Indonesia yang berbasis sumber daya alam seperti batubara dan kelapa sawit, kinerja keuangan korporasi yang bergerak di sektor pertambangan dan CPO pun mengalami penurunan.

Secara agregat, korporasi publik di sektor pertambangan¹ mengalami penurunan kinerja keuangan yang terlihat dari penurunan profitabilitas, ditunjukkan dengan turunnya ROA dari 7,6% (triwulan III 2011) menjadi 2,4% (triwulan III 2012) dan penurunan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, terjadi peningkatan kewajiban korporasi yang ditunjukkan dengan peningkatan *Debt to Equity Ratio* (DER) dari 1,3 (triwulan III 2011) menjadi 1,5 (triwulan III 2012).

Penurunan kinerja juga dialami oleh korporasi publik yang terkait dengan CPO² yang ditunjukkan oleh penurunan profitabilitas dan likuiditas. Penurunan profitabilitas terlihat dari turunnya ROA dari 8,3% (triwulan III 2011) menjadi 6,1% (triwulan III 2012). Penurunan likuiditas korporasi publik sektor CPO jangka pendek maupun jangka panjang terlihat dari turunnya *current*

- 1 Kinerja keuangan korporasi publik yang bergerak di sektor pertambangan diwakili oleh 35 (tiga puluh lima) korporasi
2 Kinerja keuangan korporasi publik yang bergerak di komoditi CPO diwakili oleh 9 (sembilan) korporasi

Tabel 1.5
Hasil *Probability of Default* dengan Metode *Contigent Claim Analysis*

Sektor	2010 Q3	2010 Q4	2011 Q1	2011 Q2	2011 Q3	2011 Q4	2012 Q1	2012 Q2	2012 Q3
Pertanian	0,92%	0,72%	2,37%	2,01%	0,00%	2,12%	0,16%	0,23%	0,27%
Industri Bahan Dasar	2,40%	2,62%	1,70%	0,89%	2,49%	1,80%	1,97%	1,31%	0,88%
Industri Bahan Konsumsi	0,39%	0,85%	1,15%	0,62%	0,89%	0,61%	0,67%	0,89%	0,50%
Infrastuktur	0,99%	1,01%	0,96%	0,79%	0,25%	1,36%	0,55%	0,51%	0,61%
Industri Lain-lain	3,49%	1,63%	2,18%	6,23%	6,63%	7,40%	7,67%	8,89%	5,51%
Pertambangan	2,14%	2,11%	1,72%	0,77%	1,38%	1,48%	1,40%	1,18%	3,13%
Properti	1,79%	1,62%	1,70%	0,88%	0,00%	2,68%	2,95%	3,40%	1,98%
Perdagangan	4,82%	4,69%	4,88%	2,84%	2,78%	3,32%	2,62%	1,90%	2,04%
Agregate (keseluruhan korporasi)	2,31%	2,25%	2,38%	1,78%	2,44%	2,60%	2,25%	2,16%	1,82%

Sumber: Bloomberg, diolah

*) perhitungan *probability of default* menggunakan Metode *Contingent Claim Analysis*

***) perhitungan periode tw.II 2012 hanya diwakili oleh 202 perusahaan

ratio dan solvabilitas. Sementara itu, sumber pembiayaan korporasi yang bersumber dari utang juga menunjukkan peningkatan yang terlihat dari naiknya rasio DER dari 0,7 (triwulan III 2011) menjadi 0,8 (triwulan III 2012).

Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa pelemahan ekspor yang berkelanjutan akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan eksportir dan berdampak pada kemampuannya memenuhi kewajiban kepada perbankan, namun pelemahan ekspor hanya terjadi pada ekspor dengan negara tujuan Amerika dan Eropa sehingga masih terdapat peluang untuk mengalihkan ekspor ke negara tujuan lainnya serta memperkuat pasar dalam negeri mengingat pasar domestik masih cukup kuat.

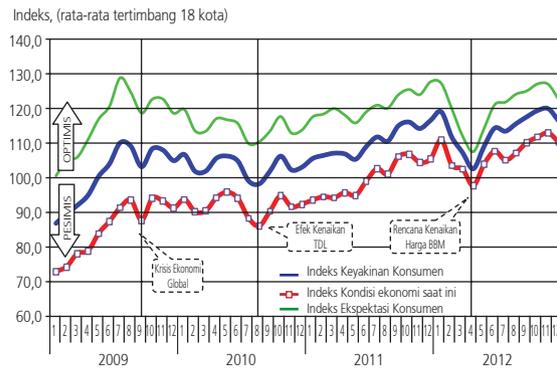
Pemantauan yang ketat terhadap kinerja dan aspek-aspek kerawanan korporasi ini terus dilakukan mengingat faktor eksternal yang masih *volatile* sehingga pemantauan diharapkan dapat memitigasi potensi risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan.

1.2.5. Kondisi Sektor Rumah Tangga

Penurunan indeks keyakinan konsumen pada akhir tahun 2012 dipicu oleh rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) secara berkala mulai Januari 2013. Selama semester II 2012 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) memiliki tren yang meningkat, namun IKK pada bulan Desember 2012 melemah 3,7 poin dari 120,1 menjadi 116,4. Penurunan ini disebabkan karena penurunan kedua komponen pembentuk IKK, yakni Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE) yang turun sebesar 2,8 poin, serta penurunan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) akan kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang sebesar 4,6 poin. Penurunan IKE serta IEK pada akhir tahun disinyalir disebabkan oleh rencana kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL)³ secara berkala mulai Januari 2013.

³ Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 30 tahun 2012, Pemerintah kembali menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada tahun 2013. Kenaikan TTL dilakukan secara bertahap, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2013, 1 April 2013, 1 Juli 2013 dan 1 Oktober 2013, khusus untuk pelanggan dengan daya di atas 900 VA. Kenaikan tarif tenaga listrik berlaku untuk pelanggan rumah tangga, bisnis dan industri dengan besaran yang bervariasi. Kenaikan TTL akan berdampak pada naiknya pengeluaran rumah tangga.

Grafik 1.14
Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



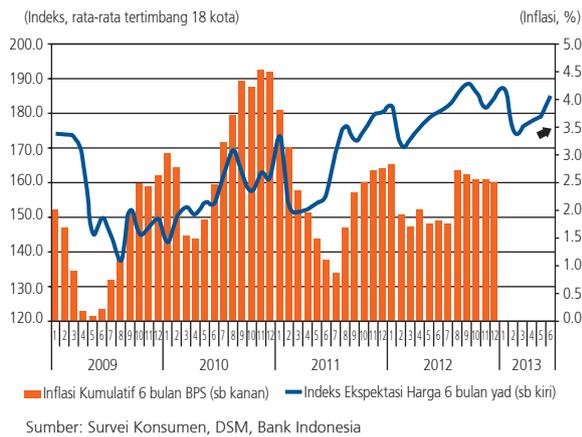
Sumber: Survei Konsumen, DSM, Bank Indonesia

Berdasarkan hasil Survei Khusus Sektor Rill Bank Indonesia (2013), porsi pengeluaran biaya listrik rumah tangga mayoritas berkisar 6-10% terhadap total pengeluaran untuk berbagai tingkat pendapatan. Beberapa upaya yang dilakukan rumah tangga untuk merespon kenaikan TTL antara lain dengan melakukan penghematan pemakaian listrik, mengurangi tabungan, dan melakukan penyesuaian pengeluaran. Kenaikan TTL yang dianggap wajar oleh mayoritas responden adalah 1-5% dalam setahun.

Tekanan kenaikan harga 3 bulan dan 6 bulan ke depan diperkirakan meningkat mengingat pelaksanaan musim panen yang belum merata serta rencana pengurangan subsidi listrik. Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan mendatang (Maret 2013) tercatat sebesar 178,8 atau naik 3,7 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan terhadap ekspektasi harga tersebut terjadi pada semua kelompok barang dan jasa, dengan peningkatan tertinggi di kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,4 poin, diikuti kelompok sandang (7,0 poin). Sementara itu tekanan harga yang tertinggi diperkirakan masih berasal dari kelompok bahan makanan (indeks 179,1), hal ini antara lain ditengarai karena pelaksanaan musim panen yang belum serentak terjadi di beberapa daerah

Sementara itu, IEH 6 bulan mendatang (Juni 2013) mengalami peningkatan sebesar 4,9 poin yaitu dari indeks 179,9 menjadi 184,8. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada bulan sebelumnya (1,9 poin), yang antara lain disebabkan adanya pencabutan subsidi listrik secara bertahap oleh pemerintah. Ekspektasi kenaikan harga pada 12 bulan yang akan datang (Desember 2013) juga diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 3,1 poin, dari 186,4 menjadi 189,4. Hal ini ditengarai didorong oleh pengurangan subsidi listrik oleh pemerintah dan adanya hari besar keagamaan.

Grafik 1.15
Indeks Ekspektasi Harga Pada 6 Bulan Yang Akan Datang



Dampak Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP)

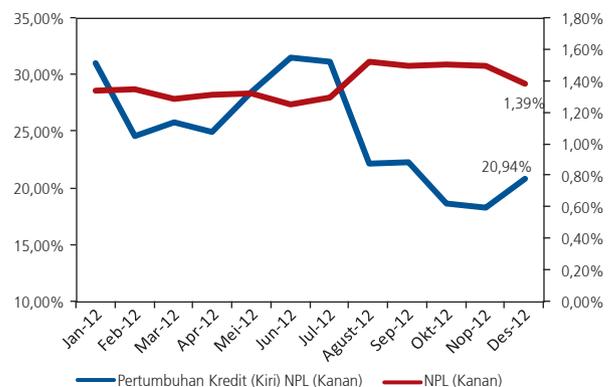
Pada tanggal 20 November 2012, Gubernur DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 menetapkan UMP tahun 2013 di Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000,-. Nilai UMP tersebut naik sebesar 44% dibandingkan UMP tahun 2012. Keputusan Gubernur DKI untuk menaikkan UMP DKI dengan cukup signifikan tersebut, memberikan *precedent* bagi daerah-daerah lain untuk menuntut besaran kenaikan UMP yang tinggi.

Meningkatnya UMP tersebut diharapkan memberikan dampak positif pada meningkatnya daya beli masyarakat. Namun demikian, reaksi kalangan pengusaha dalam mengantisipasi kenaikan UMP perlu dicermati. Kenaikan

UMP berarti peningkatan biaya bagi pengusaha. Pengalihan lokasi usaha ke tempat lain dengan tingkat UMP lebih rendah, penggunaan teknologi otomasi sampai dengan kenaikan impor yang menggantikan proses produksi dimungkinkan dapat terjadi untuk menekan biaya. Bila hal ini terjadi maka perlu diwaspadai potensi timbulnya kerawanan baru.

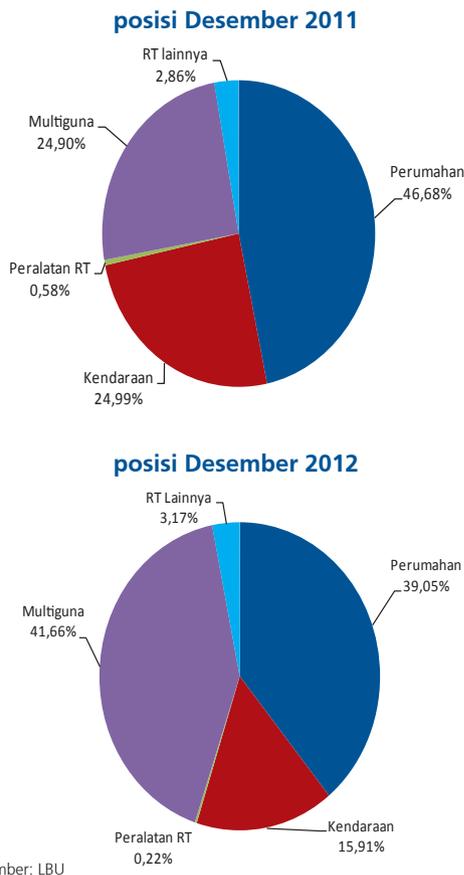
Kredit rumah tangga menunjukkan tren yang meningkat diikuti dengan rasio NPL yang relatif stabil. Posisi Desember 2012 kredit ke sektor rumah tangga adalah sebesar Rp619,1 triliun atau tumbuh 20,94% yoy. Namun demikian sektor rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan kredit dibanding tahun sebelumnya (posisi Desember 2011) yang mengalami pertumbuhan sampai 33,23% yoy. Selama tahun 2012 pangsa kredit rumah tangga juga mengalami penurunan terhadap total kredit perbankan yaitu dari 23,27% pada Desember 2011 menjadi 22,86% pada Desember 2012. Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya dominasi penyaluran kredit untuk keperluan konsumsi. Sementara itu, *Non Performing Loan* (NPL) kredit ke sektor rumah tangga sempat mengalami peningkatan pada triwulan III 2012 hingga mencapai 1,50% namun menunjukkan penurunan pada akhir tahun 2012 dengan rasio relatif rendah yaitu sebesar 1,39%.

Grafik 1.16
Pertumbuhan Kredit dan NPL ke Sektor Rumah Tangga



Berbeda dengan kondisi di akhir tahun 2011, di akhir tahun 2012, kredit kepada sektor rumah tangga mayoritas adalah dalam bentuk kredit multiguna (41,66%), diikuti oleh kredit perumahan (39,05%), kredit kendaraan (15,91%), kredit rumah tangga lainnya (3,17%) dan kredit peralatan rumah tangga (0,22%).

Grafik 1.17
Komposisi Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya



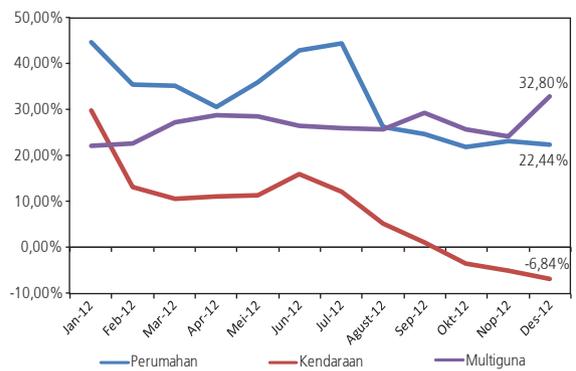
Sumber: LBU

Berdasarkan jenis penggunaannya, secara umum kredit ke sektor Rumah Tangga masih mengalami pertumbuhan kecuali kredit kepemilikan kendaraan. Pada tahun 2012 kredit perumahan tumbuh sebesar 22,44% dan kredit multiguna tumbuh sebesar 32,80%. Namun demikian, dibandingkan tahun sebelumnya, kredit rumah tangga untuk perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu dari 32,90% (2011) menjadi 22,44% (2012). Sedangkan kredit ke sektor rumah tangga untuk

pembelian kendaraan bahkan mengalami penurunan dari 32,12% (2011) menjadi -6,84%. Melambatnya kredit rumah tangga untuk perumahan dan kendaraan ini diperkirakan terutama disebabkan oleh berkurangnya permintaan kredit karena terbitnya ketentuan *Loan to Value* (LTV) pada Kredit Pemilikan Rumah dan *Down Payment* (DP) pada Kredit Kendaraan Bermotor.

Meski secara umum kredit rumah tangga masih mengalami pertumbuhan, namun rasio NPL kredit sektor RT masih stabil pada angka yang rendah <5%. Hal ini menandakan bahwa kredit pada sektor rumah tangga masih tumbuh dengan tingkat risiko yang aman.

Grafik 1.18
Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga yang Utama



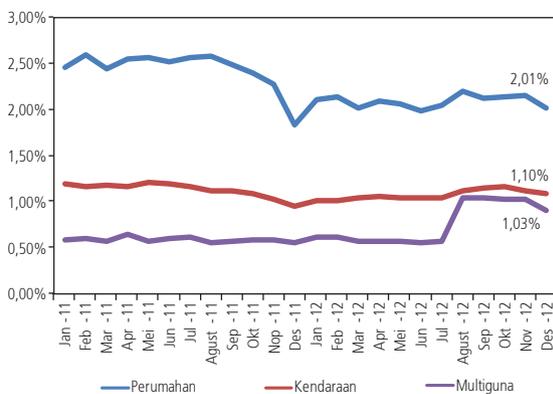
Sumber: LBU

Selanjutnya, berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa penurunan kredit perumahan dan kredit kendaraan terjadi pada periode Juli - Agustus 2012, yaitu setelah efektif berlakunya ketentuan yang mengatur besarnya *Loan to Value* (LTV) bagi kredit pemilikan rumah serta uang muka (*Down Payment*) bagi kredit kendaraan bermotor.

Berdasarkan konfirmasi dengan perbankan yang memiliki pangsa kredit multiguna besar, kredit multiguna umumnya digunakan untuk keperluan renovasi rumah, pendidikan, usaha dan pengobatan. Kredit multiguna umumnya berkinerja baik, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio NPL yang rendah di kisaran 1,03% per Desember 2012. Hal ini dikarenakan kredit multiguna umumnya

dijamin dengan aset seperti properti atau dengan pendapatan debitur (bank memiliki hak untuk memotong gaji debitur guna pembayaran kewajiban). Kenaikan kredit multiguna terjadi di bulan Juli dan akhir tahun yang dikarenakan faktor musiman. Bulan Juli merupakan tahun ajaran baru bagi anak sekolah / mahasiswa dan mendekati lebaran di mana sebagian masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan, pertumbuhan kredit multiguna di akhir tahun umumnya bersamaan dengan pembayaran bonus perusahaan yang mendorong masyarakat juga mengambil kredit multiguna sebagai pelengkap dana tambahan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Grafik 1.19
Perkembangan NPL Kredit Sektor Rumah Tangga Menurut Jenisnya



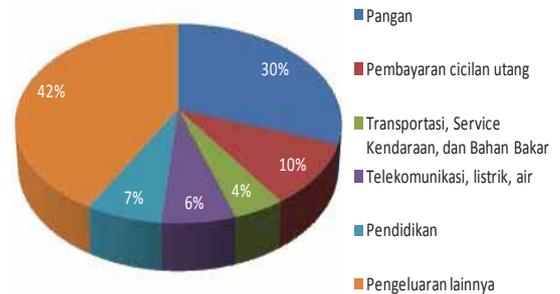
Sumber: LBU

Kondisi Keuangan Rumah Tangga
Pengeluaran Rumah Tangga

Pada tahun 2012 porsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Berdasarkan hasil Survei Neraca Rumah Tangga tahun 2012, peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan dasar terjadi pada produk pangan, transportasi serta telekomunikasi, listrik dan air. Alokasi pengeluaran rumah tangga untuk pembayaran cicilan utang dan pendidikan sedikit menurun di tahun 2012. Sementara itu, pengeluaran untuk kebutuhan lainnya cenderung stabil.

Grafik 1.20
Komposisi Total Pengeluaran Rumah Tangga 2011 - 2012

2011



2012

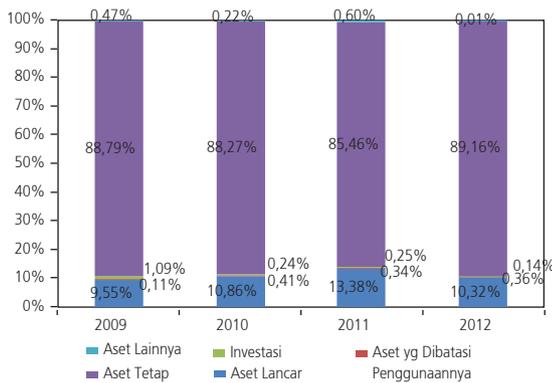


Sumber: LBU

Aset Rumah Tangga

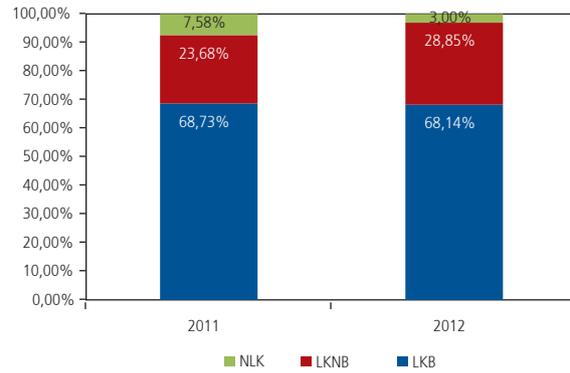
Di tahun 2012 aset rumah tangga masih didominasi oleh aset tetap dengan komposisi yang meningkat. Aset rumah tangga pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 3,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan komposisinya, sebagian besar aset rumah tangga adalah berupa aset tetap yang terdiri atas rumah, tanah, kendaraan, peralatan RT tahan lama, termasuk pakaian/fashion yang bersifat tahan lama. Sementara itu, komposisi aset lancar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 13,38% di tahun 2011 menjadi 10,32% di tahun 2012. Aset lancar terdiri dari uang tunai, tabungan, giro, deposito, emas, perhiasan, piutang, peralatan rumah tangga tidak tahan lama dan hewan ternak

Grafik 1.21
Komposisi Aset Rumah Tangga



Sumber: Survei Rumah Tangga, Bank Indonesia

Grafik 1.22
Komposisi Sumber Utang Rumah Tangga



Sumber: Survei Rumah Tangga, Bank Indonesia

Utang Rumah Tangga

Sumber utang rumah tangga didominasi oleh utang dari Bank. Berdasarkan komposisinya, sebagian besar utang rumah tangga masih berasal dari bank, meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 68,73% (2011) menjadi 68,14% (2012). Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang kepada Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) dari 23,68% (2011) menjadi 28,85% (2012). Adapun yang terus mengalami penurunan yang cukup signifikan adalah utang dari Non Lembaga Keuangan (NLK) yakni dari 7,58% (2011) menjadi 3,00%. Hal ini menunjukkan tingkat inklusi keuangan di lembaga keuangan semakin besar.

Boks 1.1**Stress Test Dampak Shock Nilai Tukar Terhadap Korporasi Dengan Kandungan Komponen Impor Yang Tinggi****Latar Belakang**

Tekanan dari perdagangan internasional merupakan salah satu fenomena perekonomian Indonesia di tahun 2012. Tekanan tersebut bersumber dari risiko peningkatan biaya impor dan peningkatan jumlah kewajiban importir kepada bank yang muncul dari kemungkinan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sektor ekonomi di Indonesia memiliki kandungan komponen impor yang tinggi dalam menghasilkan produknya. Contoh dari korporasi-korporasi tersebut antara lain adalah korporasi di bidang makanan-minuman, pulp and paper, transportasi, tekstil, makanan ternak bahan kimia, mesin dan plastik. Sejak Januari 2012 hingga Desember 2012, nilai tukar rupiah terhadap USD telah mengalami depresiasi sebesar 6%. Tekanan tersebut secara umum berpengaruh tidak hanya terhadap kinerja keuangan korporasi, namun juga berpotensi mempengaruhi kemampuan korporasi dalam memenuhi kewajiban keuangannya.

Stress Test Pelemahan Nilai Tukar Terhadap Korporasi

Per Desember 2012, terdapat sekitar 7.000 korporasi dengan kandungan komponen impor yang tinggi. Kredit seluruh korporasi tersebut sebesar Rp161.8 Triliun, tersebar dalam 25.700 rekening di 109 Bank dengan angka *Non-Performing Loan* (NPL) masih berada di dalam koridor aman (<5%) yaitu 3.1% (Lihat Tabel Boks 1.1.1). Jumlah NPL terbesar berada pada Sektor *Basic Industry* yaitu sebesar 4.1%. Data perkreditan tersebut menunjukkan indikasi bahwa kinerja kredit korporasi dengan kandungan komponen

impor yang tinggi masih dapat dikategorikan aman jika dilihat dari sisi NPL.

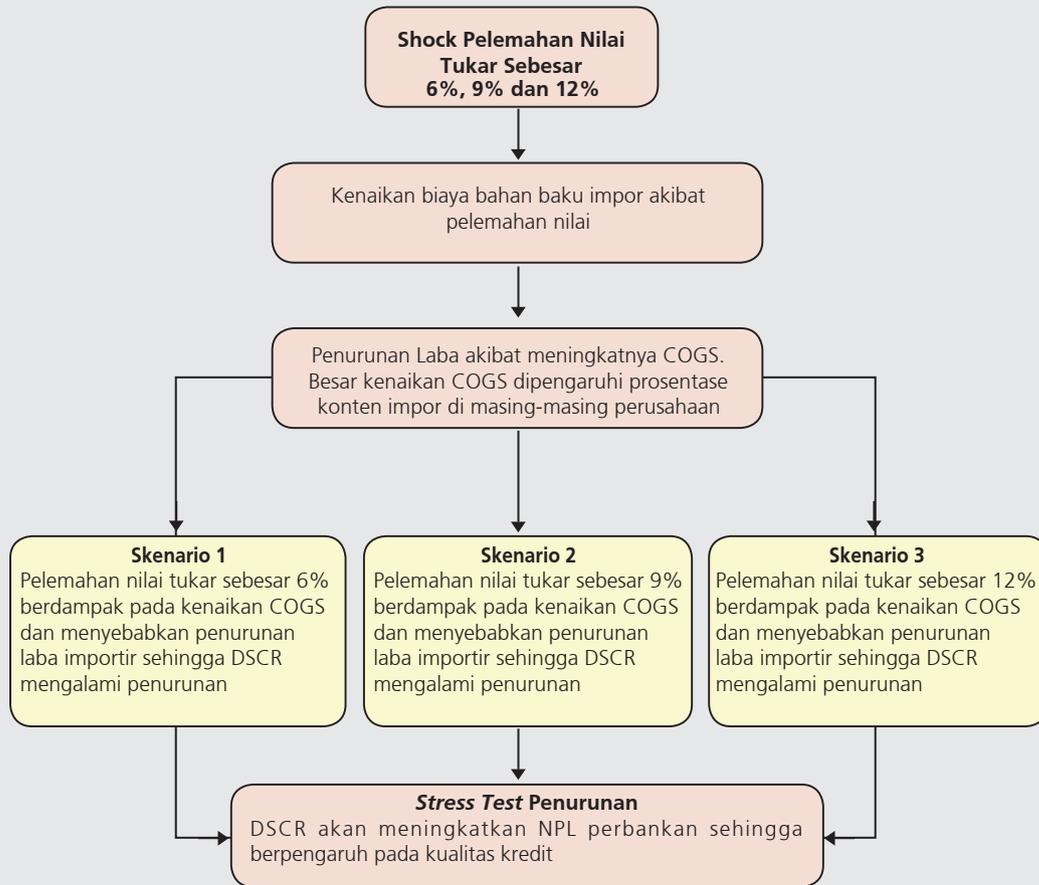
Tabel Boks 1.1.1
Kondisi Perkreditan Sektor Ekonomi Dengan Kandungan Komponen Impor Tinggi

Sektor	Baki Debet (IDR M)	NPL (IDR M)	NPL (%)	Rata-rata Kandungan impor (%)
<i>Basic Industry</i>	83.249	3.523	4,2%	16,04
<i>Consumer Goods</i>	2.538	25	1,0%	4,27
<i>Infrastructure</i>	45.102	828	1,8%	13,94
<i>Miscellaneous industries</i>	30.801	480	1,6%	23,97
<i>Trading</i>	120	-	0,0%	4,22
Total	161.809	4.856	3,0%	

Sumber: Sistem Informasi Debitur (SID) dan Tabel I-O BPS

Untuk mengetahui kekuatan korporasi tersebut dalam menghadapi *shock* pelemahan nilai tukar rupiah, maka dilakukan analisis melalui *stress test* terhadap 7.000 korporasi yang merupakan debitur bank. Alur pikir *stress test* yang digunakan di dalam analisis ini dapat dilihat pada Bagan Boks 1.1.1

Bagan Boks 1.1.1
Alur Pikir Stress Test



Terdapat 3 skenario yang digunakan, yaitu Skenario 1 adalah terjadinya pelemahan nilai tukar sebesar 6% sesuai dengan tingkat depresiasi kurs rupiah dari tanggal 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2012, Skenario 2 adalah terjadinya pelemahan nilai tukar sebesar 9% atau 1,5 kali depresiasi pada Skenario 1 dan Skenario 3 adalah terjadinya pelemahan nilai tukar sebesar 12% atau 2 kali depresiasi pada Skenario 1. Depresiasi tersebut kemudian diasumsikan menyebabkan kenaikan biaya bahan baku impor sehingga *Cost of Goods Sold* (COGS) pada masing-masing sektor meningkat sesuai dengan persentase kandungan impor dari sektor tersebut. Akibatnya, terjadi penurunan laba importir yang menyebabkan

korporasi mengalami penurunan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dan mengakibatkan penurunan kinerja kreditnya di bank yang berdampak pada CAR dan NPL perbankan.

Tabel Boks 1.1.2
Asumsi Penurunan Laba Importir Akibat Depresiasi Rupiah pada Masing-masing Sektor

Sektor	Import Content (%)	Skenario 1. Depresiasi Rupiah 6 %		Skenario 2. Depresiasi Rupiah 9 %		Skenario 3. Depresiasi Rupiah 12 %	
		Asumsi Penurunan Laba Importir	Penurunan DSCR	Asumsi Penurunan Laba Importir	Penurunan DSCR	Asumsi Penurunan Laba Importir	Penurunan DSCR
Basic Industry	16%	0.96%	0.11%	1.44%	0.16%	1.93%	0.22%
Consumer Goods	4%	0.26%	0.06%	0.38%	0.10%	0.51%	0.13%
Infrastructure	14%	0.84%	0.07%	1.25%	0.10%	1.67%	0.14%
Miscellaneous Industries	24%	1.44%	0.10%	2.16%	0.14%	2.88%	0.19%
Trading	4%	0.25%	0.10%	0.38%	0.15%	0.51%	0.20%

Catatan: Penurunan DSCR dilakukan dengan sampling terhadap beberapa korporasi go-public di masing-masing sektor. Sumber data berasal dari Laporan Keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia

Hasil perhitungan *stress test* ketiga skenario tersebut menunjukkan bahwa CAR industri perbankan turun masing-masing sebesar -0,006%, -0.007% dan -0.008% sedangkan NPL mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0.010%, 0.013% dan 0.016% (Tabel boks 1.1.3). Skenario depresiasi tidak menyebabkan

CAR perbankan turun dibawah *threshold* 8% dan juga tidak menyebabkan NPL meningkat diatas *threshold* 5%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dampak depresiasi lebih lanjut nilai tukar Rupiah terhadap kinerja NPL dan CAR perbankan masih relatif terbatas.

Tabel Boks 1.1.3
Hasil Stress Test Pelemahan Nilai Tukar Terhadap Industri Perbankan

	Skenario 1 Depresiasi Rupiah 6%			Skenario 2 Depresiasi Rupiah 9%			Skenario 3 Depresiasi Rupiah 12%		
	Sebelum	Sesudah	△	Sebelum	Sesudah	△	Sebelum	Sesudah	△
Total CAR	17.32%	17.314%	-0.006%	17.32%	17.313%	-0.007%	17.32%	17.312%	-0.008%
Total NPL	1.94%	1.950%	0.01%	1.94%	1.953%	0.013%	1.94%	1.956%	0.016%

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Ketahanan Sistem Keuangan

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Ketahanan Sistem Keuangan

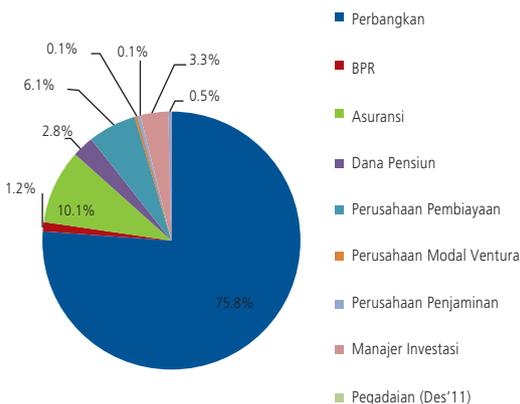
Secara umum ketahanan sektor keuangan selama semester II 2012 masih terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dari risiko kredit, likuiditas dan pasar yang masih rendah. Intermediasi perbankan dan industri keuangan non bank masih tumbuh namun cenderung melambat sebagai dampak perkembangan ekonomi global sementara likuiditas masih memadai.

2.1. STRUKTUR SISTEM KEUANGAN DAN KETAHANAN PERBANKAN

Industri perbankan masih memegang peranan terbesar dalam sistem keuangan Indonesia. Pangsa pasar industri perbankan semester II 2012 sebesar 75,8%, meningkat dibandingkan semester lalu yang mencapai 75,6%. Peningkatan pangsa tersebut terjadi karena peningkatan aset perbankan yang lebih tinggi

dibandingkan aset industri keuangan non bank. Peningkatan pangsa perbankan tersebut antara lain terkait dengan masih cukup tingginya permintaan kredit ke sektor produktif. Ke depan, peran industri keuangan bukan bank di Indonesia diharapkan dapat semakin meningkat dengan upaya *financial deepening* dan pasar keuangan.

Grafik 2.1
Komposisi Aset Lembaga Keuangan



Sumber: Bank Indonesia dan Bapepam-LK, diolah

Tabel 2.1
Jumlah Lembaga Keuangan

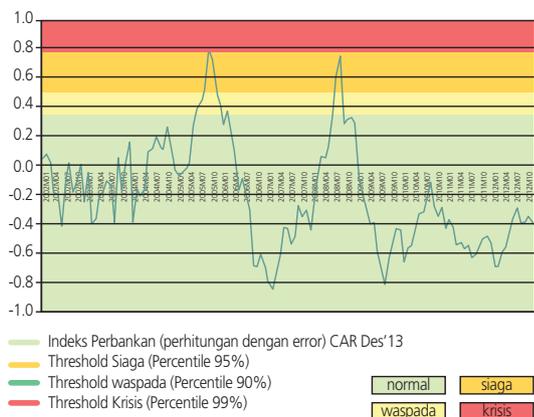
Lembaga Keuangan	Jumlah Lembaga Keuangan
Perbankan	120
BPR	1,653
Asuransi	137
Dana pensiun	269
Perusahaan Pembiayaan	200
Perusahaan Modal Ventura	89
Perusahaan Penjaminan	6
Manager Investasi	754
Pegadaian	1

Sumber: Bank Indonesia dan Bapepam-LK, diolah

Peningkatan aktivitas usaha lembaga keuangan lain dan perbankan serta keterkaitannya perlu dipantau dalam konteks risiko sistemik. Jumlah aset perbankan yang besar serta keterkaitannya dengan lembaga keuangan lain seperti Perusahaan Pembiayaan dan asuransi harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Sementara itu, **tekanan pada lembaga perbankan relatif rendah**. Hal tersebut tercermin dari Indeks Tekanan Perbankan (ITP) sepanjang 2012 yang masih berada dalam kondisi normal. ITP pada semester II 2012 lebih rendah dibandingkan semester sebelumnya sejalan dengan penurunan tekanan pada lembaga perbankan. Penurunan ITP tersebut didukung oleh menurunnya NPL, relatif terjaganya permodalan, meningkatnya profitabilitas dan terjaganya alat likuid perbankan.

Grafik 2.2
Indeks Tekanan Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

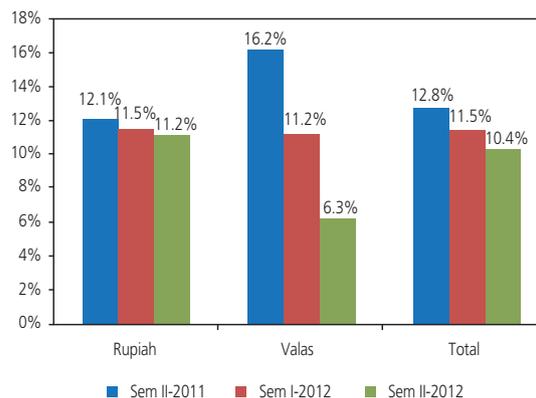
2.2. RISIKO DI SISTEM PERBANKAN

2.2.1. Perkembangan dan Risiko Kredit

Perkembangan Kredit

Kredit perbankan tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan. Selama semester II 2012, kredit berhasil tumbuh sebesar 10,4% atau tumbuh 23,1% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut melambat dibandingkan dengan semester lalu yang mencapai 12,8%. Hal tersebut sejalan dengan tren pertumbuhan PDB yang cenderung melambat pada dua semester terakhir. Berdasarkan jenis valuta, pertumbuhan kredit pada semester II 2012 terutama didukung peningkatan kredit rupiah (11,2%). Pertumbuhan kredit tersebut tidak terlepas dari masih kondusifnya kondisi perekonomian yang memungkinkan perbankan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya walaupun terjadi perlambatan dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Kredit Per Valuta



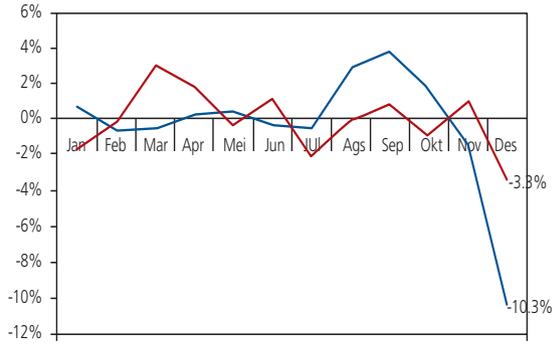
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.2
Indeks Tekanan Perbankan

Parameter	Threshold	2012											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Indeks Tekanan Perbankan	0.35												
	0.50	(0.80)	(0.77)	(0.60)	(0.56)	(0.44)	(0.37)	(0.29)	(0.40)	(0.39)	(0.35)	(0.39)	(0.46)
	0.75												
NPL (%)	3.00												
	5.00	2.79	2.78	2.79	2.76	2.71	2.49	2.52	2.57	2.44	2.50	2.38	2.29
	7.00												
CAR (%)	13.00												
	10.50	18.44	18.45	18.28	17.97	17.87	17.49	17.33	17.24	17.33	17.22	17.46	17.32
	8.00												
ROA (%)	2.00												
	1.00	2.94	2.83	3.05	2.98	3.05	3.16	3.07	3.04	3.06	3.06	3.06	3.08
	0.00												
Alat Likuid (%)	-6.85												
	-7.35	(0.13)	0.00	(1.10)	(1.17)	(2.32)	(3.08)	(3.60)	(2.39)	(2.66)	(2.89)	(2.79)	(2.56)
	-9.85												

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.4
Pertumbuhan Kredit Ekspor dan Impor



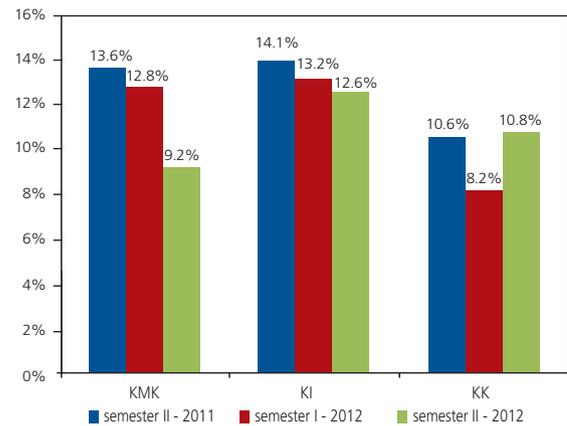
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Penurunan ekspor akibat krisis global serta pelemahan nilai tukar rupiah turut mendorong perlambatan kredit valas. Kredit valas pada semester ini tumbuh sebesar 6,27%, cenderung melambat dibandingkan dua semester sebelumnya (masing-masing sebesar 11,22% dan 16,24%). Perlambatan kredit valas tersebut antara lain terkait dengan pertumbuhan kredit ekspor yang pada semester ini juga pertumbuhannya turun sebesar -10,3% (yoy). Penurunan kredit ekspor tersebut terutama terkait dengan melemahnya permintaan beberapa negara mitra dagang utama Indonesia dan menurunnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam (SDA) seperti komoditas hasil pertanian (kelapa sawit) dan batubara.

Risiko kredit valas yang perlu diantisipasi oleh perbankan adalah penurunan ekspor pelemahan nilai tukar rupiah secara persisten sejak pertengahan 2011. Hal tersebut diperkirakan dapat menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang pada akhirnya dapat berpotensi menyebabkan peningkatan kredit bermasalah.

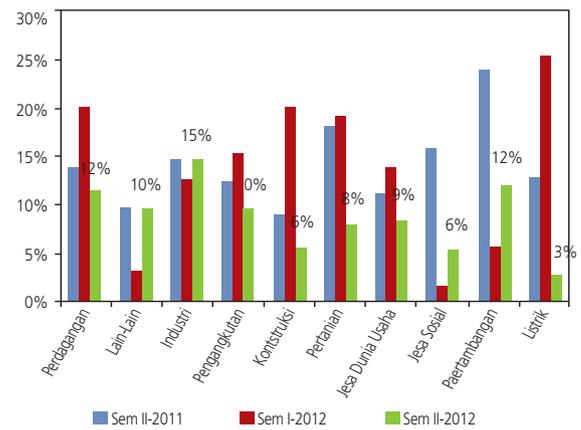
Peranan kredit ke sektor produktif tetap dominan selama semester II 2012. Dibandingkan sebelumnya, pertumbuhan kredit investasi cenderung melambat dari 14,1% menjadi 12,6% pada semester ini. Sementara itu, kredit modal kerja pada semester ini tumbuh 9,2% menjadi Rp1.316,7 triliun, namun melambat dibandingkan pertumbuhan pada semester II 2011 yang

Grafik 2.5
Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.6
Pertumbuhan Kredit Per Sektor Ekonomi



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

mencapai 13,6%. Kredit konsumsi masih tumbuh sebesar 10,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada semester II 2011 sebesar 10,6%. Walaupun secara umum kredit melambat, namun kredit investasi masih tumbuh lebih tinggi dibanding kedua jenis kredit lainnya. Masih tingginya pertumbuhan kredit investasi diharapkan dapat mendorong sektor riil dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, perbankan perlu mewaspadai risiko kredit investasi terutama dari sisi sumber dana perbankan yang mayoritas masih berjangka waktu pendek sementara jangka waktu kredit investasi umumnya lebih panjang.

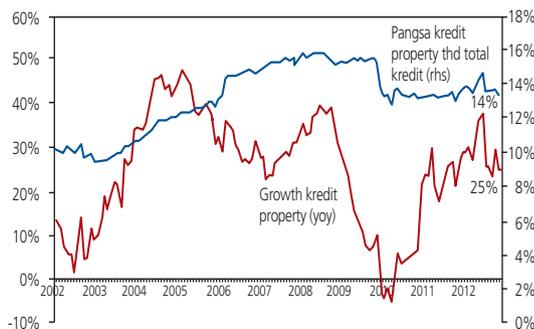
Jika dilihat secara sektoral, secara umum penyaluran kredit ke sebagian besar sektor produktif tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan pada

semester I 2012, kecuali sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa sosial. Perlambatan tersebut diduga terkait dengan penurunan kinerja sebagian korporasi domestik seiring dengan penurunan permintaan global. Selain itu, penurunan likuiditas perbankan yang disertai dengan proses revitalisasi kredit juga mendorong tren perlambatan tersebut.

Meskipun harga komoditas batubara secara umum mengalami penurunan, namun penyaluran kredit ke sektor pertambangan tetap meningkat pada semester ini. Hal tersebut disebabkan perbankan melakukan penyaluran kredit secara selektif khususnya kepada perusahaan tambang batubara kalori tinggi (karena harganya tetap bertahan) dan beberapa perusahaan tambang yang mengkompensasi penurunan harga tersebut dengan peningkatan volume produksi.

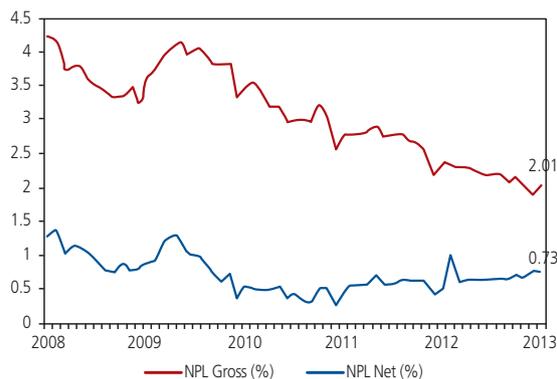
Pertumbuhan kredit properti cenderung mengalami perlambatan selama semester II 2012. Pertumbuhan kredit properti selama semester II 2012 melambat menjadi 1,7% dibandingkan pertumbuhan pada semester I 2012 sebesar 20,4% maupun semester II 2011 sebesar 18,6%. Pangsa kredit properti terhadap total kredit perbankan saat ini masih relatif tidak terlalu besar, yaitu sekitar 8,9% sedikit menurun dibanding semester lalu yang mencapai 9,7% terhadap total kredit. Ketentuan LTV yang mulai berlaku sejak Juni 2012 memberikan dampak perlambatan pertumbuhan kredit properti.

Grafik 2.7
Pertumbuhan dan Pangsa Kredit Properti



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.8
Non-Performing Loans (NPL)



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

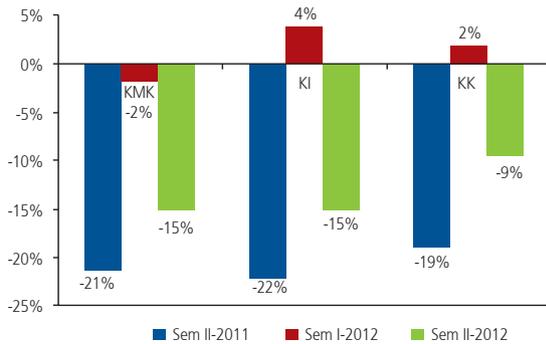
Risiko Kredit 1

Risiko kredit perbankan menunjukkan tren penurunan. Pada akhir semester II 2012, rasio NPL *gross* perbankan mencapai 1,87%, menurun dibandingkan posisi Juni 2012 sebesar 2,18% dan semester II 2011 sebesar 2,17%. Penurunan tersebut terutama disebabkan peningkatan jumlah NPL kredit yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhannya serta adanya hapus buku kredit yang bermasalah.

Apabila dilihat dari jenis kreditnya, penurunan persentase kredit bermasalah terjadi pada semua jenis kredit, dengan penurunan tertinggi secara persentase pada kredit modal kerja. Kredit bermasalah untuk jenis kredit modal kerja selama semester II 2012 menurun dari 2,6% menjadi 2,2%. Sedangkan NPL *gross* kredit investasi menurun menjadi 1,7% dari 2,0% pada semester I 2012 dan NPL *gross* kredit konsumsi menurun menjadi 1,5% dari 1,6%.

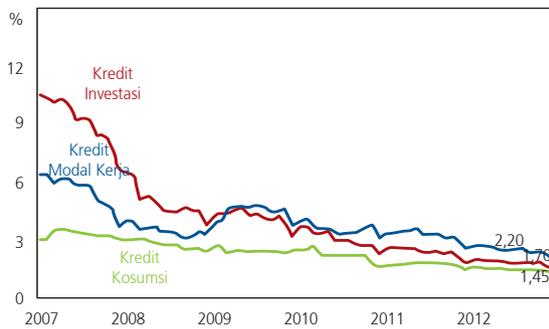
1 Tanpa kredit penerusan (*channeling*), kecuali dinyatakan lain

Grafik 2.9
Pertumbuhan NPL Per Jenis Penggunaan



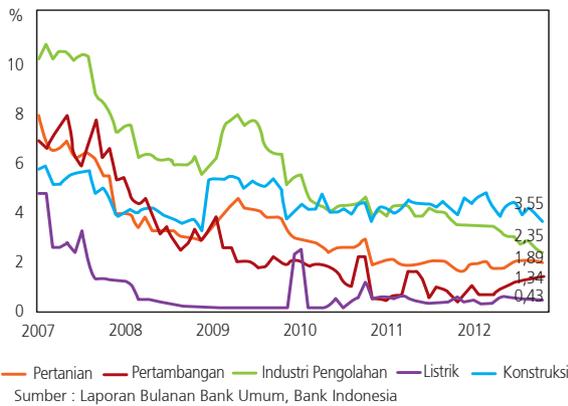
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.10
Rasio NPL Per Jenis

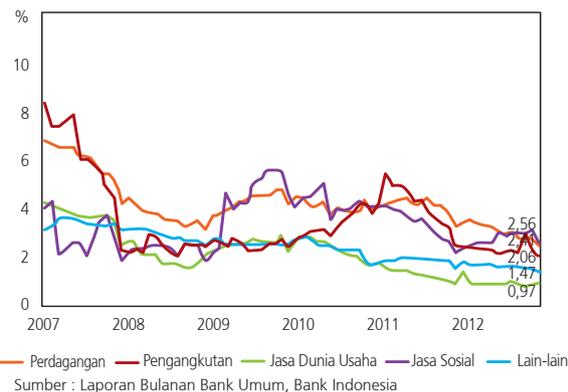


Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.11
Rasio NPL Per Sektor Ekonomi



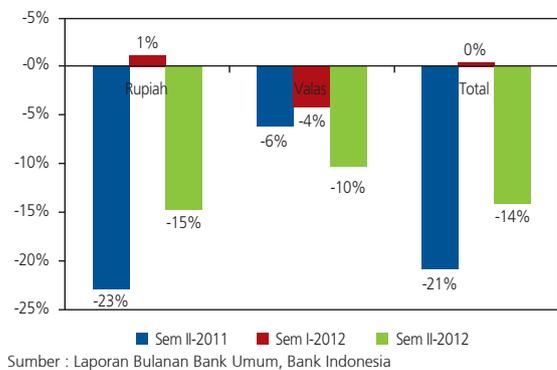
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

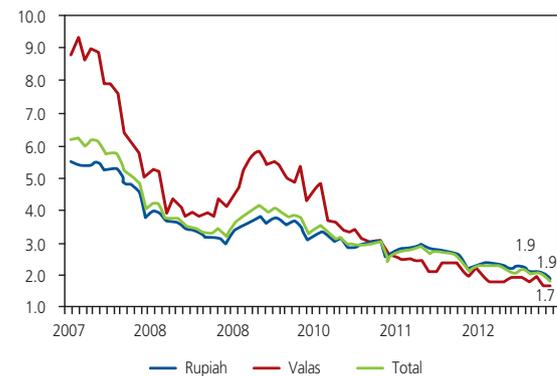
Selain itu, perbankan tetap harus memperhatikan **potensi risiko kredit valas**. Rasio NPL kredit valas secara historis krisis (1997/1998) pernah mencapai diatas 30% (jauh di atas NPL Rupiah). Sejak itu, kinerja kredit valas dalam beberapa periode terakhir telah menunjukkan perbaikan yang signifikan. Rasio NPL kredit valas sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2012 telah berada di bawah rasio NPL kredit rupiah. Rasio NPL kredit valas per Desember 2012 mencapai 1,75% sementara rasio NPL kredit rupiah tercatat sebesar 1,89%.

Grafik 2.12
Pertumbuhan NPL Per Valuta



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.13
Rasio NPL Per Valuta

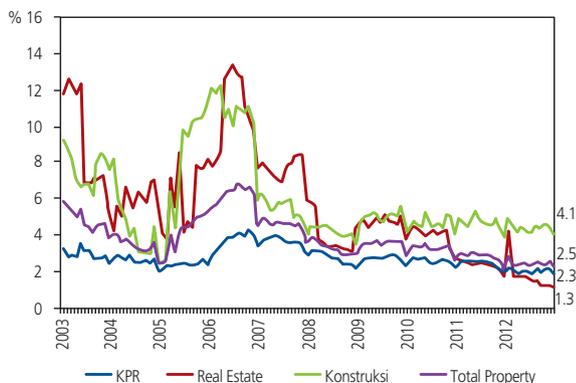


Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Selama semester II 2012, secara sektoral, kredit bermasalah menurun pada sebagian besar sektor. Hanya terdapat dua sektor yang mengalami peningkatan yaitu pertambangan dan pertanian yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 42,8% dan 12,3% dibanding semester sebelumnya. Kredit bermasalah di

sektor lainnya justru mengalami penurunan, dimana penurunan terbesar pada sektor industri (25,7%), perdagangan (21,6%) dan listrik (20,5%). Risiko kredit dari sektor ekonomi lain yang perlu diwaspadai adalah mulai meningkatnya NPL kredit di sektor pertambangan dan jasa sosial.

Grafik 2.14
Rasio NPL Kredit Properti



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Risiko penyaluran kredit properti mengalami penurunan pada semester II 2012. Rasio NPL kredit properti menurun dari 2,4% pada bulan Juni 2012 menjadi 2,3% pada bulan Desember 2012. Sedangkan dibandingkan rasio NPL pada bulan Desember 2011 (2,2%), terdapat kenaikan tipis. Penurunan NPL pada semester II 2012 terutama disebabkan penurunan pada NPL kredit *real estate* dan konstruksi, walaupun terdapat peningkatan pada kredit KPR.

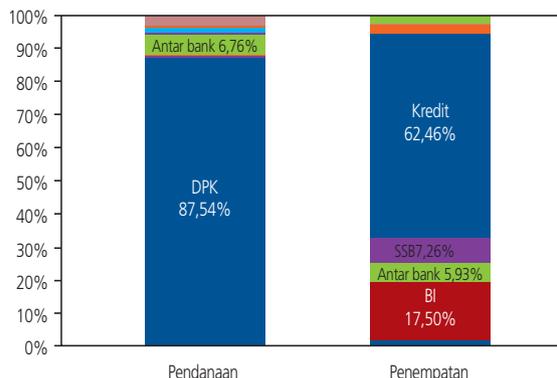
2.2.2. Pendanaan dan Risiko Likuiditas Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Struktur pendanaan bank masih didominasi oleh Dana Pihak Ketiga. DPK masih menempati porsi utama bagi perbankan sebagai sumber pembiayaan kredit walaupun pertumbuhannya cenderung melambat. Sampai dengan semester II 2012, komposisi struktur pendanaan bank masih didominasi pangsa dana pihak ketiga (DPK) dengan pangsa 87,54% dibandingkan semester sebelumnya

(87,67%) maupun tahun lalu (87,66%). Sedangkan sumber dana lainnya seperti antar bank menyumbang 6,76% (turun tipis dibandingkan semester sebelumnya yang mencapai 7,11%). Komponen-komponen lain pendanaan menyumbang porsi yang sangat kecil, yaitu: pinjaman (1,21%), Surat-surat Berharga (SSB) (0,93%), kewajiban lainnya (0,76%) serta kewajiban pada Bank Indonesia dan setoran jaminan masing-masing sebesar 0,11% dan 0,14%. Pertumbuhan DPK yang cukup tinggi tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap likuiditas bank.

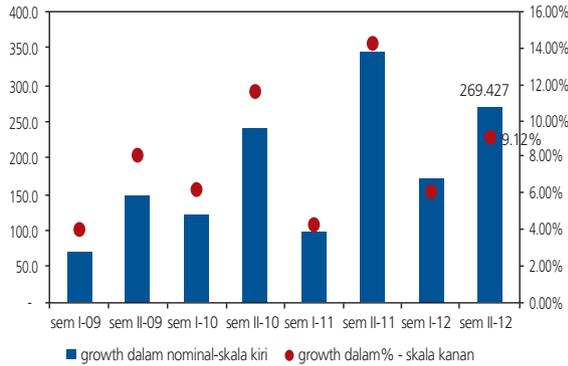
Pertumbuhan DPK meningkat tinggi pada semester II, namun melambat dibanding dua tahun sebelumnya. Selama semester II 2012, DPK perbankan meningkat Rp269,43 triliun atau 9,12% sehingga menjadi Rp3.225,2 triliun. Kenaikan DPK pada semester ini lebih tinggi dari kenaikan DPK pada semester I 2012 yang mencapai sebesar Rp170,92 triliun atau 6,14%. Peningkatan ini sejalan dengan tren yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu adanya percepatan pertumbuhan DPK pada akhir tahun yang terutama disebabkan oleh realisasi APBN yang dilakukan oleh Pemerintah. Meskipun demikian, pertumbuhan pada semester ini melambat dibandingkan pertumbuhan pada semester II 2011 yang tercatat sebesar 14,23%.

Grafik 2.15
Pangsa Pendanaan dan Pembiayaan Bank



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.16
Pertumbuhan DPK per Semester



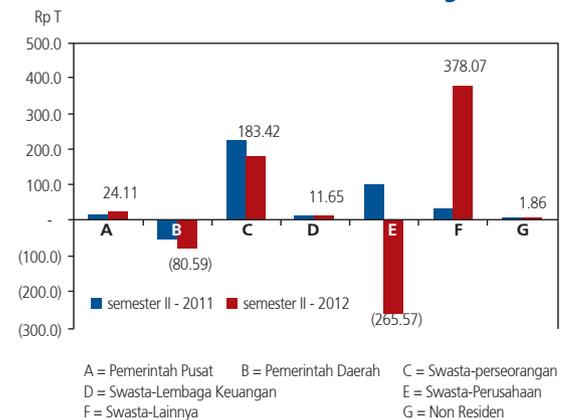
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Dari sisi golongan pemilik, pertumbuhan DPK lebih bertumpu pada golongan individu swasta (lainnya dan perseorangan). Pertumbuhan DPK tertinggi terdapat pada golongan swasta lainnya sebesar Rp378,07 triliun atau 100,02% diikuti oleh golongan pemerintah pusat sebesar Rp24,11 triliun atau 56,05%. Sebaliknya, golongan pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 44,87% setelah pada semester sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 124,02%.

Berdasarkan jenis komponennya, seluruh komponen DPK meningkat, dengan peningkatan tertinggi pada komponen tabungan dan deposito, yaitu masing-masing sebesar Rp137,63 triliun (14,65%) dan Rp83 triliun (6,39%). Sementara pada semester sebelumnya, peningkatan DPK tertinggi terjadi pada komponen giro dan deposito, yaitu masing-masing sebesar Rp65,62 triliun (10,05%) dan Rp64,33 triliun (5,21%). Pengalihan dari giro menjadi tabungan sejalan dengan pertumbuhan swasta perorangan.

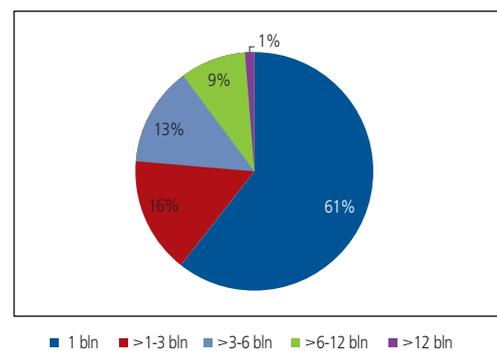
Sementara berdasarkan valuta, pertumbuhan DPK terutama disumbang oleh DPK rupiah. Selama periode laporan, DPK rupiah telah bertambah sebesar Rp240,9 triliun atau 9,57% dari total pertumbuhan DPK, sedangkan DPK valas bertambah sebesar Rp28,5 triliun atau 6,49% dari total pertumbuhan DPK. Peningkatan DPK rupiah ini lebih tinggi daripada semester sebelumnya yang mengalami peningkatan sebesar Rp118,1 triliun.

Grafik 2.17
Pertumbuhan DPK Berdasarkan Golongan Pemilik



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.18
Komposisi Deposito Valuta berdasarkan Jangka Waktu



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

DPK masih menempati porsi utama bagi perbankan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hal ini tercermin dari *rasio Loan to Deposit Ratio* (LDR) selama semester II 2012 sebesar 83,96% yang semakin meningkat dibandingkan semester I 2012 yang hanya tercatat sebesar 82,99% maupun semester II 2011 sebesar 79%. Apabila dilihat secara valuta, LDR Valas tetap menempati posisi lebih tinggi dibandingkan LDR Rupiah. Pada bulan Desember 2012, LDR Valas tercatat 91,27% lebih tinggi dibandingkan LDR Rupiah sebesar 82,72%. Demikian juga pada Desember 2011 dan Juni 2012, LDR Valas tercatat sebesar 93,45% dan 91,46% lebih tinggi dibandingkan LDR Rupiah sebesar 76,67% dan 81,51%.

LDR Valas yang tinggi tersebut mencerminkan bahwa DPK Valas merupakan sumber utama pembiayaan kredit valas disamping komponen antar kantor dan kewajiban lainnya. Sebagian besar (60,65%) sumber pendanaan kredit valas masih berasal dari dana jangka pendek yaitu deposito dengan jangka waktu sampai dengan 1 bulan, sehingga perbankan perlu menerapkan strategi khusus untuk menggeser produk pendanaan valas ke jangka yang lebih lama dan ekspansi penggalangan dana valas murah. Meskipun beberapa bank memiliki sumber pendanaan dari pemegang saham pengendali yang berada di luar negeri, namun secara umum perbankan harus tetap berhati-hati dalam mengelola sumber pendanaan kredit valas, karena terdapat potensi terjadinya *mismatch* yang berpotensi menimbulkan kerugian tambahan dari selisih nilai tukar.

Tabel 2.3
Perkembangan LDR Bank Umum

	Des,,11	Jun,,12	Des,,12
LDR	79%	82,99%	83,96%
LDR Rupiah	76,67%	81,51%	82,72%
LDR Valas	93,45%	91,46%	91,27%

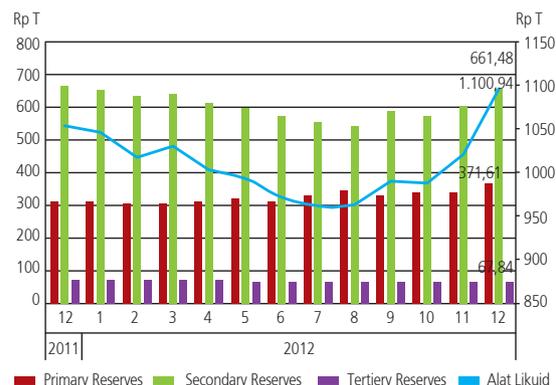
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas relatif terjaga karena terdapat peningkatan alat likuid. Selama semester II 2012, total alat likuid perbankan naik 13,17% sehingga menjadi Rp1.100,94 triliun. Peningkatan alat likuid bersumber dari peningkatan *primary reserves* yang terdiri dari Kas dan Giro di Bank Indonesia yaitu sebesar 14,44% dan *secondary reserves* yang terdiri dari SBI, Penempatan pada Bank Indonesia lainnya, SUN *Trading* dan SUN AFS sebesar 14,16%. Sementara itu, selama semester II 2012, *tertiary reserves* perbankan turun sebesar 1,21% yang disebabkan oleh menurunnya SUN HTM.

Peningkatan alat likuid perbankan di semester ini terjadi karena adanya realisasi anggaran pemerintah yang ditempatkan pada kelompok bank Persero yang menyebabkan peningkatan pada *primary reserve*.

Grafik 2.19
Komposisi Alat Likuid Perbankan



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Tabel 2.4
Komposisi Alat Likuid Perbankan

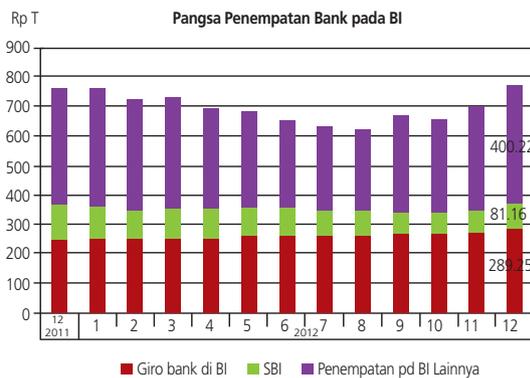
	Posisi Des,,12	Pertumbuhan Semester		Pertumbuhan yoy	
	(Rp T)	Nominal (Rp T)	%	Nominal (Rp T)	%
Primary Reserves	371,61	46,89	14,44	57,64	18,36
Secondary Reserves	661,48	82,05	14,16	-7,32	-1,09
Tertiary Reserves	67,84	-0,83	-1,21	-2,82	-3,99
Total	1,100,94	128,11	13,17	47,50	4,51

*Komponen alat likuid di atas belum menguakan kewajiban GWN
Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Kemampuan likuiditas perbankan masih memadai untuk memenuhi kewajibannya namun terdapat risiko likuiditas yang perlu diwaspadai. Rasio AL/NCD per Desember 2012 (setelah dikurangi GWM) tercatat sebesar 115,40% naik dibandingkan posisi Juni 2012 sebesar 108,70%. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan Desember 2011, rasio AL/NCD per Desember 2012 mengalami penurunan sebesar 18,03% disebabkan oleh peningkatan NCD yang semula Rp566,73 Triliun pada Desember 2011 menjadi Rp661,29 triliun pada Desember 2012 tanpa diikuti oleh kenaikan AL yang signifikan. AL yang relatif stagnan tersebut perlu dimitigasi oleh bank yang memiliki portofolio SBN dalam jumlah besar. Jumlah bank dengan rasio AL/NCD >100% berjumlah 67 bank pada Desember 2012 sementara pada Juni 2012 berjumlah 53 bank.

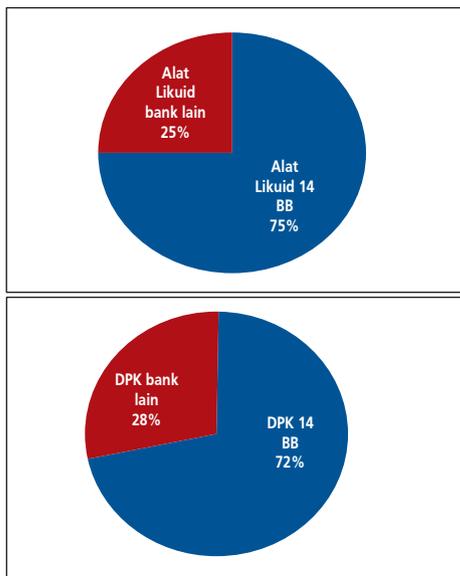
Sementara itu, apabila ditinjau dari penyebaran likuiditas dan kepemilikannya, dana yang tersedia masih menunjukkan kondisi yang kurang merata. Mayoritas alat likuid dan DPK masih dimiliki oleh 14 bank besar dengan pangsa lebih dari 70%, sedangkan 106 bank lain memiliki pangsa kurang dari 30%. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan kondisi pada akhir Desember 2011, kecukupan likuiditas individual bank dalam mengcover kebutuhan penarikan *non-core deposit*-nya juga masih memadai. Dalam hal ini, masih jauh lebih banyak bank dengan rasio alat likuid (AL) terhadap *non-core deposit* (NCD) di atas 100% dibandingkan bank dengan rasio AL/NCDnya <50%.

Grafik 2.20
Pangsa Penempatan Bank pada Bank Indonesia



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.21
Pangsa Alat Likuid



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

2.2.3. Profitabilitas dan Permodalan

Ketahanan perbankan masih terjaga karena bank masih dapat mempertahankan laba yang cukup tinggi sehingga CAR masih tinggi.

Profitabilitas

Seiring dengan kondisi perekonomian Indonesia yang relatif terjaga, industri perbankan mampu mencatatkan profit yang cukup besar. Selama semester II 2012 Perbankan membukukan laba bersih sebesar Rp47,1 triliun. Laba tersebut lebih tinggi dibandingkan pencapaian laba pada semester sebelumnya maupun posisi yang sama tahun 2011 yang masing-masing hanya mencapai sebesar Rp45,7 triliun dan Rp38,0 triliun. Kenaikan laba tersebut antara lain didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga kredit dengan kontribusi sebesar 72,2% dari total pendapatan bunga. Secara tahunan, pendapatan bunga kredit mengalami pertumbuhan mencapai 13,5%.

Tabel 2.5
Perkembangan Laba/Rugi Industri Perbankan

	Jun 2011	Des 2011	Jun 2012
L/R Operasional	89,3	55,8	144,7
L/R Non Operasional	7,8	2,3	1,7
L/R sebelum Pajak	97,1	58,2	119,5
L/R setelah Pajak	75,1	45,7	92,8

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

Jika dilihat per kelompok bank, porsi terbesar penyumbang laba bersih Perbankan terdapat pada kelompok bank Persero yang mencapai 44,0%, disusul BUSN 37,1%, BPD 9,6%, KCBA 5,5% dan Campuran 3,7%.

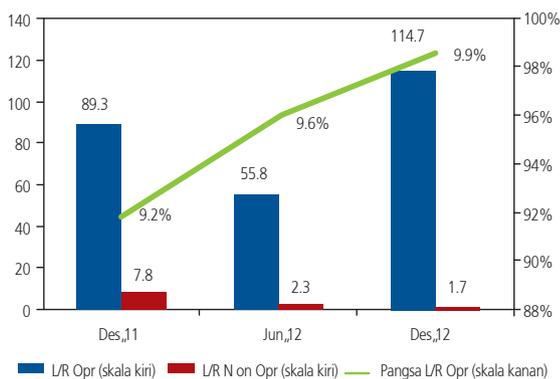
Sebagaimana periode-periode sebelumnya, perolehan laba perbankan sampai dengan akhir semester II 2012 masih didominasi oleh laba operasional. Pada Desember 2012, laba operasional perbankan tercatat sebesar Rp114,7 triliun, meningkat dibanding laba operasional semester yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp89,3 triliun.

Tabel 2.6
Perkembangan Profitabilitas dan Kredit per Kelompok Bank

Kelompok Bank	L/R Setelah Pajak (T Rp)			Growth Kredit (% YOY)			NIM (%)		
	Des-11	Jun-12	Des-12	Des-11	Jun-12	Des-12	Des-11	Jun-12	Des-12
1 Persero	32,7	19,0	40,8	20,9%	20,2%	23,5%	6,6	5,8	6,0
2 Swasta	26,7	17,3	34,5	28,7%	28,2%	20,8%	5,7	5,3	5,4
3 BPD	8,0	4,6	8,9	22,3%	22,9%	26,2%	8,1	6,4	6,7
4 Campuran	2,4	1,8	3,4	22,7%	46,9%	33,2%	3,9	3,6	3,6
5 KCBA	5,3	3,1	5,1	20,8%	28,7%	26,6%	3,6	3,5	3,5
Industri	75,1	45,1	92,8	24,5%	25,7%	23,1%	5,9	5,4	5,5

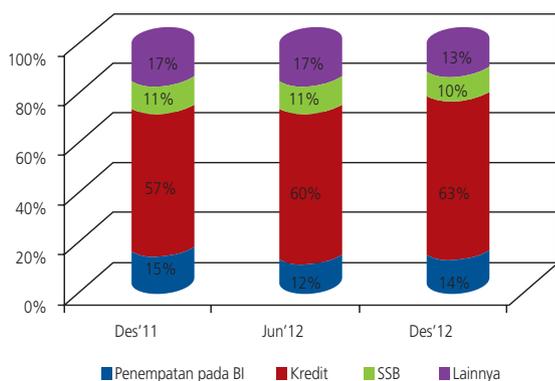
Sumber :Statistik Perbankan Indonesia dan Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Grafik 2.22
Komposisi Laba/Rugi Perbankan



Sumber :Statistik Perbankan Indonesia

Grafik 2.23
Komposisi Pendapatan Bunga Industri Perbankan (%)



Sumber :Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Labanya operasional yang diperoleh perbankan masih didominasi oleh pendapatan bunga bersih atau **Net Interest Income (NII)** dengan tren yang

meningkat. Pencapaian rata-rata NII bulanan perbankan selama semester II 2012 tercatat sebesar Rp18,3 triliun, lebih tinggi dari perolehan di semester I 2012 sebesar Rp16,3 triliun dan semester II 2011 sebesar Rp15,9 triliun.

Dari sisi sumber pendapatan bunga, porsi pendapatan bunga kredit masih menduduki posisi teratas dari total pendapatan bunga dengan kecenderungan meningkat. Pada Semester II 2012, pendapatan bunga kredit tercatat sebesar 72,2% dari total pendapatan bunga. Pencapaian di semester ini lebih tinggi dibandingkan semester sebelumnya yang mencapai 70,3% pada Juni 2012 dan 67,6% pada Desember 2011. Tingginya pendapatan bunga kredit tersebut sejalan dengan meningkatnya jumlah penyaluran kredit perbankan. Pendapatan bunga kredit tersebut cenderung meningkat walaupun *spread* suku bunga sedikit menurun pada Semester II 2012. Penurunan *spread* suku bunga tersebut disebabkan peningkatan suku bunga deposito yang disertai penurunan suku bunga kredit. Kondisi ini umumnya terjadi pada semester II yang kemudian akan meningkat kembali pada semester I tahun berikutnya.

Sementara itu, **Net Interest Margin (NIM)** perbankan pada akhir semester II 2012 relatif stabil. Pada posisi Desember 2012, NIM perbankan tercatat 5,5% relative stabil dibandingkan NIM posisi Juni 2012 sebesar

5,4%. Peningkatan NIM pada semester ini disebabkan oleh persentase peningkatan pendapatan bunga bersih yang lebih tinggi daripada persentase peningkatan rata-rata total aset produktif. Hal ini didorong oleh pendapatan dari kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Pencapaian NIM di bulan Desember 2012 lebih rendah dibandingkan semester yang sama tahun sebelumnya disebabkan adanya penurunan pendapatan dari beberapa aktiva produktif lain di luar kredit.

Spread suku bunga dalam semester ini cenderung menyempit sejalan penurunan suku bunga kredit. Selama semester II 2012, suku bunga kredit menunjukkan tren menurun, hal ini mengindikasikan fungsi intermediasi perbankan telah berjalan dengan efisien. Aspek yang mendorong penurunan suku bunga kredit adalah ketentuan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang dikeluarkan Bank Indonesia pada bulan Maret 2011. Trend SBDK cenderung menurun sejak Maret 2011 dan terjadi pada semua segmen terutama disebabkan oleh menurunnya komponen HPDK. Dibandingkan posisi Maret 2011, SBDK Desember 2012 tercatat lebih rendah dengan kisaran 66-91 bps, yaitu 91 bps untuk segmen Non KPR diikuti segmen Korporasi 82 bps, 75 bps untuk segmen KPR dan 66 bps untuk segmen Retail. Sedangkan pada semester II 2012 terdapat penurunan SBDK pada 3 segmen dan 1 segmen lainnya mengalami sedikit kenaikan. Penurunan terbesar tercatat pada segmen Non

KPR sebesar 34 bps, selanjutnya segmen Korporasi 12 bps dan penurunan terendah pada segmen KPR sebesar 9 bps. Sedikit peningkatan terjadi pada segmen Retail sebesar 5 bps.

Return on Asset (ROA) mengalami penurunan tipis. ROA pada Desember 2012 menurun tipis 3 bps dibandingkan Juni 2012 dari 3,11% menjadi 3,08%. Penurunan ROA di semester ini lebih kecil dibandingkan peningkatan ROA secara yoy sebesar 8 bps dari 2,99% pada Desember 2011. Penurunan yang terjadi pada semester II 2012 terutama karena pertumbuhan laba industri perbankan yang lebih kecil daripada pertumbuhan rata-rata total aset perbankan. Hal tersebut sejalan dengan penurunan SBDK dan spread suku bunga rupiah perbankan dibandingkan semester lalu.

Grafik 2.24
Spread Suku Bunga Rupiah Perbankan (%)



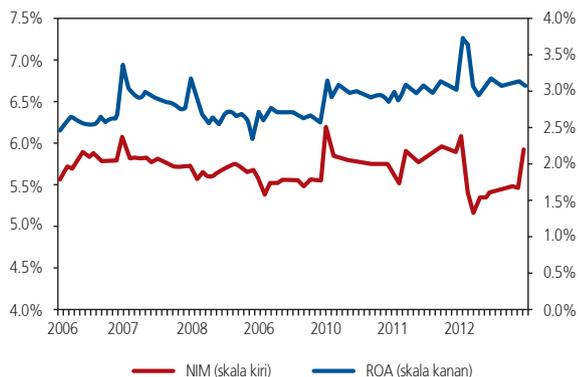
Sumber : Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum, diolah

Tabel 2.7
Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%)

Segmen Kredit	Seluruh Sampel								qtq	Mar 11- Des 12	Jun 12- Des 12
	2011				2012						
	Mar	Jun	Sep	Des	Mar	Jun	Sep	Des			
Korporasi	10,51	10,72	10,51	10,18	9.86	9,81	9,75	9,69	(0,06)	(0,82)	(0,12)
Retail	11,80	11,91	12,04	11,61	11.23	11,08	11,03	11,14	0,11	(0,66)	0,05
KPR	11,16	11,38	11,04	10,71	10.61	10,50	10,45	10,41	(0,04)	(0,75)	(0,09)
Non KPR	11,56	11,86	11,88	11,51	11.05	10,99	10,67	10,65	(0,03)	(0,91)	(0,34)

Sumber : Laporan Berkala Bank Umum, Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.25
Perkembangan Rasio ROA dan NIM Perbankan (%)



Sumber : Bank Indonesia, Laporan Bulanan Bank Umum, diolah

Permodalan

Ketahanan perbankan nasional masih terjaga yang tercermin dari masih tingginya rasio CAR. Sejalan dengan peningkatan laba yang dicapai, maka ketahanan perbankan yang tercermin dari rasio CAR² pada Desember 2012 mencapai 17,32%. Secara rata-rata, CAR pada semester II 2012 tercatat sebesar 17,27% lebih tinggi dibandingkan rata-rata CAR pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selama semester II 2012, CAR bergerak cukup stabil dengan level tertinggi yang mencapai 17,35% dan level terendah sebesar 17,16%. Rasio CAR tersebut sedikit turun dibandingkan semester lalu (17,45%) terkait dengan ekspansi kredit yang berdampak pada peningkatan ATMR (6,95%) yang lebih tinggi dari peningkatan modal (6,54%).

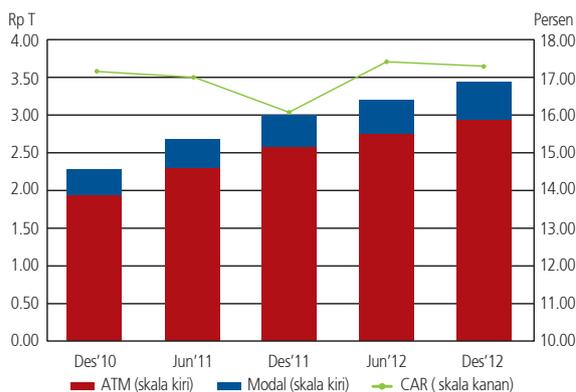
Meskipun CAR mengalami penurunan dibandingkan semester sebelumnya, namun CAR pada akhir 2012 masih tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir 2010 dan 2011. Struktur permodalan bank juga mengalami penguatan sebagaimana tercermin pada komposisi ekuitas tier 1 yang naik menjadi sebesar Rp455,79 T sehingga pangsa Tier 1 terhadap total modal mencapai 89,28%³ (pada semester I 2012 sebesar 89,14%). Sementara itu, pangsa komponen modal lainnya yaitu Tier 2 dan Tier 3 turun menjadi 10,76% dan 0,006% dari 10,89% dan 0,011%

2 CAR sudah termasuk CAR bank syariah dan konvensional (Pada KSK sebelumnya hanya membahas CAR bank konvensional yaitu 109 bank tanpa Bank Syariah)
3 Pangsa Tier 1 dihitung menggunakan total modal setelah dikurangi penyertaan sebagai pembilang

pada semester I 2012. Peningkatan komposisi ekuitas Tier 1 mengindikasikan semakin baiknya ketahanan bank dalam menyerap potensi risiko yang berasal dari aktivitas usaha bank ataupun perubahan lingkungan bisnis.

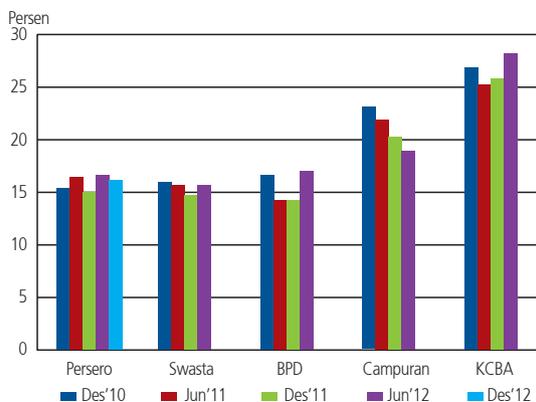
Berdasarkan kelompok bank, penurunan CAR selama semester II 2012 terutama berasal dari penurunan CAR Persero, Swasta dan Campuran dengan penurunan masing-masing sebesar 41 bps, 37 bps dan 32 bps. Sementara itu, terdapat 2 kelompok bank yang CARnya tercatat meningkat yaitu KCBA (253 bps) dan BPD (102 bps). Kedua kelompok bank tersebut telah mengalami tren peningkatan CAR sejak tiga semester terakhir. Pada KCBA, faktor turunnya ATMR pada semester II 2012 berkontribusi terhadap kenaikan CAR yang signifikan disamping pertumbuhan modal yang juga naik cukup signifikan.

Grafik 2.26
Perkembangan Komponen Permodalan Perbankan



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum, diolah

Grafik 2.27
Perkembangan CAR per Kelompok Bank



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum, diolah

Pergerakan CAR kelompok bank Persero dan Swasta menunjukkan kecenderungan yang hampir serupa. Di lain sisi, kelompok bank Campuran telah mengalami tren penurunan CAR sejak empat semester terakhir. Hal ini terjadi dikarenakan pola kenaikan ATMR yang konsisten melebihi peningkatan modalnya. Meskipun mayoritas kelompok bank mencatat penurunan CAR pada semester II 2012, CAR seluruh kelompok bank tersebut masih relatif tinggi yaitu diatas 15%.

CAR masih berada dalam level aman dan diatas level minimum yang dipersyaratkan Basel. Dari sisi size bank berdasarkan total aset per Desember 2012, mayoritas bank Besar dan Menengah memiliki CAR yang berkisar antara 10% s.d 25%. Sementara itu, CAR mayoritas bank Kecil berada pada kisaran yang lebih tinggi yaitu antara 25% s.d 50%. Adapun hanya sebagian kecil (7,50%) yang memiliki CAR dengan kisaran 50% s.d 100% dan hanya 1 bank yang memiliki CAR diatas 100%.

Tabel 2.8
Perkembangan Permodalan Perbankan berdasarkan Kelompok Bank

	Growth (%)							
	Des-10	Jun-11	Des-11	Jun-12	Des-12	sem I-2012	sem II-2012	2012
Modal (Rp M)								
Persero	101,47	128,14	132,85	156,96	166,30	18,15	5,95	25,17
Swasta	137,52	158,86	168,52	193,65	205,14	14,91	5,94	21,73
BPD	25,09	26,69	28,90	30,97	35,20	7,15	13,66	21,79
Campuran	23,47	26,84	28,38	29,93	30,77	5,44	2,82	8,41
KCBA	45,28	49,90	57,34	67,49	73,09	17,71	8,29	27,47
Total	323,25	380,46	404,70	466,13	496,63	15,18	6,54	22,72
ATMR (Rp M)								
Persero	660,56	780,11	883,08	946,90	1028,29	7,23	8,60	16,44
Swasta	869,98	1110,76	1144,08	1219,72	1322,92	6,61	8,46	15,63
BPD	150,39	187,39	201,67	182,19	195,32	(9,66)	7,21	(3,15)
Campuran	100,55	122,00	139,54	157,72	195,32	13,03	4,58	18,21
KCBA	167,21	197,32	220,53	237,97	236,59	7,91	(0,58)	7,28
Total	1881,53	2237,53	2520,96	2662,71	2850,00	5,70	6,95	13,05
	Delta (%)							
ATMR (Rp M)								
Persero	15,36	16,43	15,04	16,58	16,17	1,53	(0,41)	1,13
Swasta	15,99	15,72	14,73	15,88	15,51	1,15	(0,37)	0,78
BPD	16,68	14,24	14,33	17,00	18,02	2,67	1,02	3,69
Campuran	23,34	22,00	20,34	18,97	18,65	(1,37)	(0,32)	(1,69)
KCBA	27,08	25,29	26,00	28,36	30,89	2,36	2,53	4,89
Total	17,18	17,00	16,05	17,49	17,43	1,44	0,07	1,37

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum, diolah

Tabel 2.9
Perkembangan CAR berdasarkan Kelompok Bank

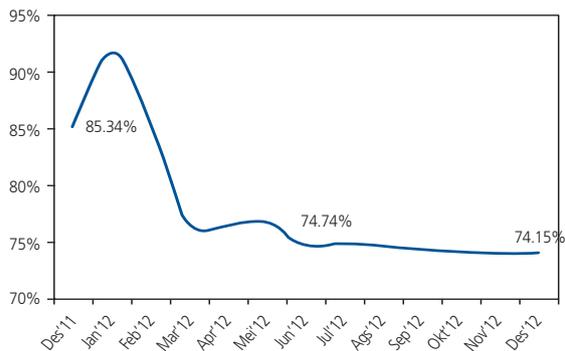
Posisi Des 2012	Bank Besar (TA > Rp10 T)	Bank Menengah (Rp1T < TA < Rp10 T)	Bank Kecil (TA < Rp1 T)	Total
CAR < 10%	0	0	0	0
10% < CAR < 25%	48	39	1	88
25% < CAR < 50%	3	12	7	22
50% < CAR < 100%	1	6	2	9
CAR > 100%	0	0	1	1
TOTAL	52	57	10	120

Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum, diolah

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi global dan dalam rangka menjaga ketahanan perbankan, bank diharapkan dapat menjaga CAR pada level yang tinggi dan menambah modal sesuai dengan peningkatan profil risiko dan kegiatan usaha bank terutama ditengah masih berlanjutnya dampak krisis global. Disamping itu, penguatan modal kedepannya masih akan terus dilakukan terutama dalam rangka persiapan pemenuhan kewajiban permodalan yang baru berdasarkan Basel III.

Penguatan modal berdasarkan Basel III mencakup diantaranya redefinisi modal termasuk komponen pembentuk modal inti (*Tier 1*), modal pelengkap (*Tier 2*) dan penghapusan *Tier 3* capital, penguatan modal minimum 8% melalui penetapan modal disetor sebesar 4,5% dan modal inti sebesar 6%. Disamping itu, juga terdapat beberapa tambahan kewajiban modal yang mencakup *mandatory capital conservation buffer* sebesar 2,5%, *discretionary counter-cyclical buffer* sebesar 2,5% pada saat pertumbuhan Kredit tinggi serta *capital surcharge* bagi bank yang dinyatakan sistemik.

Grafik 2.28
Perkembangan Rasio BOPO (%)



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Efisiensi

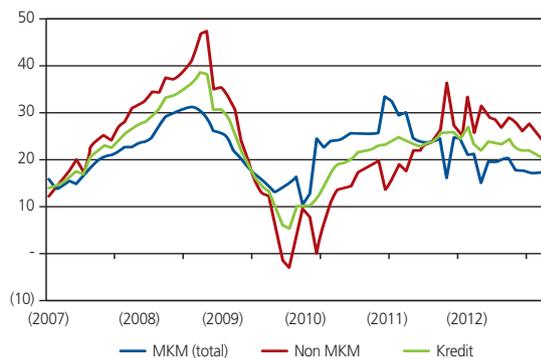
Efisiensi perbankan selama semester II 2012 cenderung semakin membaik. Hal ini tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang mencapai 74,15%. Rasio tersebut membaik dibandingkan semester I-2012 sebesar 74,7% maupun posisi yang sama tahun lalu 85,34%. Kondisi tersebut disebabkan peningkatan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan biaya operasional. Efisiensi tersebut sejalan dengan penurunan SBDK yang ditopang oleh penurunan Harga Perolehan Dana Kredit (HPDK) kredit KPR, Korporasi, dan non KPR (masing-masing sebesar 28 bps, 28 bps dan 21 bps) serta penurunan *Overhead Cost* kredit non KPR dan Ritel sebesar 29 bps dan 8 bps. Selain itu, efisiensi perbankan yang semakin membaik juga tercermin dari terus meningkatnya pendapatan bunga sebagai dampak dari kredit yang bertumbuh dan cenderung menurunnya beban bunga perbankan.

Perkembangan Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)

Kredit MKM sedikit menurun namun masih merupakan penyumbang terbesar terhadap total kredit perbankan. Pada Desember 2012, pangsa kredit MKM tercatat sebesar 49,52%, lebih rendah dari Juni

2012 (50,28%) dan Desember 2011 (51,92%). Penurunan pangsa tersebut disebabkan pertumbuhan kredit MKM yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit non MKM. Penurunan pertumbuhan kredit MKM tersebut tercermin dari penurunan pertumbuhan kredit MKM dan Non MKM. Selama semester II 2012, kredit MKM tumbuh hanya sebesar 8,67%, sementara kredit non MKM tumbuh lebih tinggi yaitu 12,02%. Pada semester ini pertumbuhan kredit MKM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan semester I 2012 sebesar 7,94% namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan semester II 2011 sebesar 11,23%. Sama halnya dengan kredit non MKM, pertumbuhan pada semester II 2012 sebesar 12,02% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Semester I 2012 yang mencapai 15,25%. Secara yoy, pertumbuhan kredit MKM tahun 2012 sebesar 17,30% jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2011 yang pertumbuhannya mencapai 24,24%, sebaliknya untuk Non MKM tumbuh lebih tinggi pada tahun 2012 yaitu 29,10% dibandingkan tahun 2011 sebesar 26,94%.

Grafik 2.29
Pertumbuhan Kredit MKM (yoy)



Sumber :Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia

Risiko kredit MKM masih terjaga. Rasio NPL *gross* di semester II 2012 tercatat sebesar 2,35% per Desember 2012. Dibandingkan semester sebelumnya, terdapat penurunan risiko kredit MKM yaitu posisi Juni 2012 sebesar 2,51% namun mengalami peningkatan dibandingkan

posisi semester II 2011 sebesar 2,27%. Meskipun demikian rasio NPL *gross* tetap terjaga di bawah *threshold* 5%. Penurunan NPL *gross* terdapat pada semua jenis kredit (KMK, KI dan KK), yaitu per Desember 2012 tercatat KMK (3,61%), KI (2,92%) dan KK (1,39%), sedangkan per Juni 2012 sebesar KMK (3,77%), KI (3,09%) dan KK (1,52%).

Grafik 2.30
Perkembangan NPL Gross Kredit MKM Perbankan (%)



Sumber : Laporan Bulanan Bank Umum, Bank Indonesia, diolah

Analisis risiko sistemik

Analisis sistemik perbankan dilakukan untuk mengetahui indikasi potensi dampak sistemik kegagalan suatu bank terhadap bank lainnya melalui eksposur penempatan antar bank. Berdasarkan hasil *stress test* dengan asumsi ekstrim yang dilakukan pada posisi Desember 2012 terlihat bahwa apabila lima bank pemicu (bank peminjam) mengalami *default* sehingga tidak dapat membayar kewajiban antar banknya, terdapat sembilan bank yang permodalannya berpotensi tertekan (*single failure impact*). Dampak selanjutnya (*multiple failure*) menyebabkan permodalan lima bank lainnya berpotensi ikut tertekan (*second round impact*). Dengan adanya saling keterkaitan antar bank tersebut, bank harus lebih berhati-hati dalam beroperasi untuk menghindari terjadinya potensi sistemik.

Tabel 2.10
Matriks Keterkaitan Antar Bank

		Bank Pemicu				
		A	B	C	D	E
Bank Terkena Dampak	F					
	G					
	H					
	I					
	J					
	K					
	L					
	M					
	N					

2.3. POTENSI RISIKO PASAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

2.3.1. Risiko Pasar Keuangan

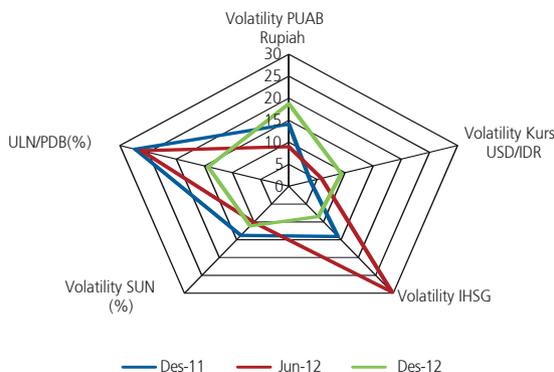
Pada semester II 2012, risiko pasar keuangan dan risiko nilai tukar sedikit meningkat dibanding semester sebelumnya sebagaimana terlihat dari kenaikan volatilitas pasar uang dan volatilitas nilai tukar. Namun secara umum sistem keuangan relatif stabil sebagaimana ditunjukkan oleh volatilitas SUN, dan IHSG yang menurun. Demikian pula dengan rasio ULN/PDB yang berada pada level yang memadai.

Peta Stabilitas Pasar Keuangan menunjukkan bahwa secara umum kondisi pasar keuangan masih terkendali sebagaimana ditunjukkan oleh volatilitas SUN, dan IHSG yang menurun (Grafik 2.31). Demikian pula dengan rasio ULN/PDB yang berada pada level yang cukup aman. Walaupun demikian, untuk pasar uang dan nilai tukar risikonya meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh volatilitas PUAB meningkat dibandingkan semester sebelumnya, yaitu dari 9% menjadi 19%. Demikian pula volatilitas kurs USD/IDR juga meningkat dari 5,83% menjadi 9,32% (volatilitas 20 hari). Dalam hal ini, ketidakseimbangan perekonomian global dan ketidakpastian dalam penyelesaian krisis di Eropa khususnya telah memberikan tekanan pada gejolak pasar keuangan di dalam negeri.

Sedangkan tekanan pada nilai tukar bersumber dari siklus defisit transaksi berjalan di dalam negeri yang melebar (*trade balance* dalam neraca pembayaran) disertai dengan permintaan valas di pasar cukup tinggi.

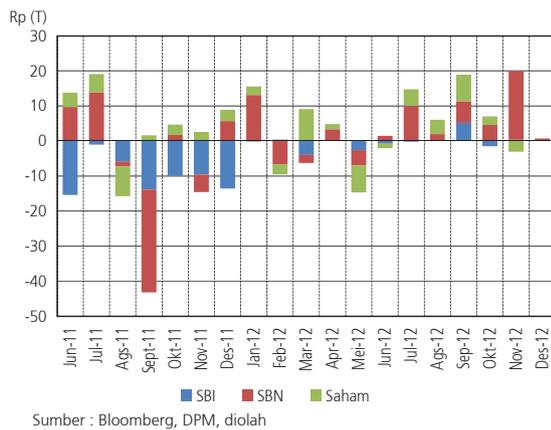
Sementara itu, transaksi non residen pada saham, SBN dan SBI hanya bergerak pada kisaran yang tipis dengan volatilitas yang menurun (Grafik 2.32). Sebagian besar investor non residen menempatkan investasinya (*capital inflow*) pada Surat Berharga Negara (SBN), sementara itu peningkatan *inflow* lainnya berasal dari saham dan sejumlah SBI yang jatuh tempo pada semester II 2012. Secara total, untuk akhir semester II 2012 untuk aliran dana pada saham, SBN dan SBI, non residen tercatat melakukan *net inflow* sebesar Rp0,79 triliun dibandingkan dengan semester sebelumnya yaitu *net outflow* sebesar Rp 0,58 triliun. Saham yang berasal dari non residen selama semester II 2012 tercatat *net inflow* sebesar Rp0,12 triliun sementara pada semester I 2012 masih mengalami *net outflow* sebesar Rp1,28 triliun. Selain itu, *net inflow* SBI pada semester II 2012 adalah sebesar Rp0,41 triliun, sedangkan pada semester sebelumnya tercatat *net outflow* sebesar Rp0,77 triliun. Disisi lain, transaksi non residen untuk SBN mengalami *net inflow* paling besar yaitu Rp0,66 triliun pada akhir semester dan pernah mencapai 19,52 triliun pada bulan November 2012, dimana pada akhir semester I 2011 masih tercatat Rp1,47 triliun.

Grafik 2.31
Peta Stabilitas Pasar Keuangan



Sumber :Bloomberg, LHBU, Statistik ULN Indonesia, diolah

Grafik 2.32
Flows Non Residen: Saham, SBN, SBI



Grafik 2.34
Volatilitas PUAB Valas

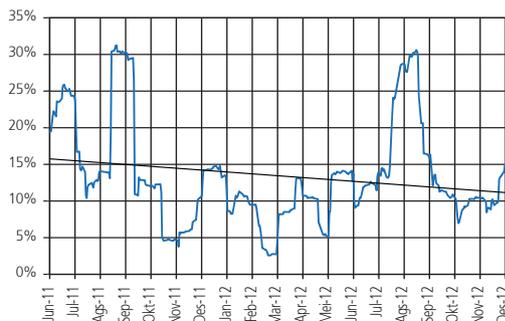


Risiko Pasar Uang

Secara umum stabilitas pasar uang antar bank (PUAB) Rupiah dan valas masih cukup terkendali.

Pada semester II 2012 volatilitas PUAB Rupiah cenderung hanya mengalami penurunan tipis (Grafik 2.33) namun volatilitas PUAB Valas masih cenderung meningkat (Grafik 2.34). Walaupun demikian, kebutuhan likuiditas untuk transaksi Rupiah dan Valas masih terus terpenuhi oleh sistem perbankan domestik terutama untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dibandingkan semester sebelumnya, rata-rata suku bunga PUAB Rupiah pada semester II 2012 cenderung meningkat tipis. Keadaan tersebut tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas suku bunga pada PUAB Rupiah melalui operasi moneter dan juga dukungan bauran kebijakan dengan instrumen moneter lainnya, antara lain ekspansi dari kebijakan pengelolaan SBN yang juga berperan dalam mendukung kestabilan pasar keuangan.

Grafik 2.33
Volatilitas PUAB Rupiah



Untuk itu, upaya menjaga suku bunga PUAB dan ketersediaan likuiditas perbankan baik dalam bentuk Rupiah dan valas memerlukan dukungan kebijakan serta respon operasi moneter yang tepat serta disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Upaya Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan likuiditas dalam Rupiah dan Valas serta memonitor lalulintas devisa melalui kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) merupakan respon yang positif untuk menjaga kestabilan pasar uang.

Risiko Pasar Surat Utang Negara (SUN)

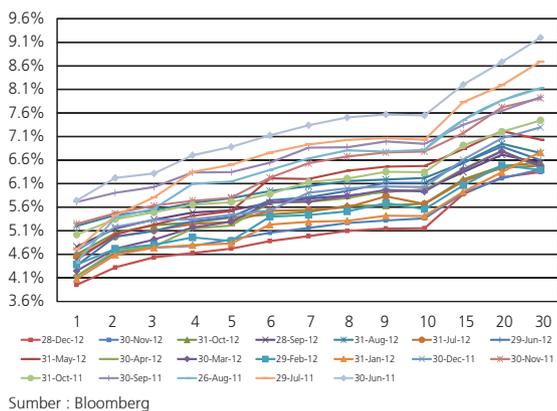
Pada semester II 2012, secara umum kondisi pasar SUN terus menunjukkan peningkatan dibandingkan semester sebelumnya.

Kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan otoritas keuangan pemerintah diperkuat dengan peningkatan rating obligasi Indonesia pada *investment grade rating* mampu melanjutkan peningkatan transaksi SUN yang juga terjadi pada semester sebelumnya sehingga stabilitas pasar SUN tetap terjaga. Melimpahnya likuiditas pada *emerging market countries* selama semester II 2012 telah mendorong peningkatan aliran dana investasi asing pada pasar Surat Utang Negara Indonesia. Hal tersebut tercermin dengan terus meningkatnya transaksi pasar SUN. Selain itu, indikator makroekonomi Indonesia yang stabil juga turut mendorong kinerja yang lebih baik dari obligasi yang

diterbitkan pemerintah Indonesia terhadap obligasi lainnya dalam kawasan regional.

Selama semester II 2012, kurva yield SUN hanya meningkat tipis untuk semua tenor, walaupun terdapat kecenderungan menurun untuk tenor jangka panjang pada akhir semester (Grafik 2.35). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan keuangan nasional yang dan iklim investasi domestik berdampak pada sempitnya volatilitas SUN dan pergerakan yield SUN yang terjaga. Stabilitasnya indikator perekonomian nasional telah memberikan meningkatkan kepastian pasar terhadap pengelolaan sistem keuangan di Indonesia.

Grafik 2.35
Yield Curve SUN



Selama semester II 2012, harga SUN hanya bergejolak tipis, terutama pada awal semester dan kemudian bergerak stabil sampai dengan akhir semester. Fluktuasi hanya terjadi pada harga SUN dengan tenor jangka pendek, sedangkan pada pada tenor lainnya cenderung bergerak stabil sepanjang semester. Namun demikian, tren duntuk tenor jangka panjang mulai meningkat kembali pada triwulan terakhir semester II 2012. Harga beberapa SUN yang dijadikan acuan perdagangan domestik cenderung berperilaku sama sepanjang semester, namun terus bergerak stabil pada akhir semester II 2012 (Grafik 2.36). *Trend* pergerakan harga bertendensi searah, diiringi dengan interval *spread* yang sama untuk beberapa seri SUN tertentu. Secara garis besar, perkembangan harga

dan kinerja SUN yang dijadikan *benchmark* sepanjang semester dimaksud dapat disimpulkan stabil.

Grafik 2.36.
Harga SUN FR Benchmark

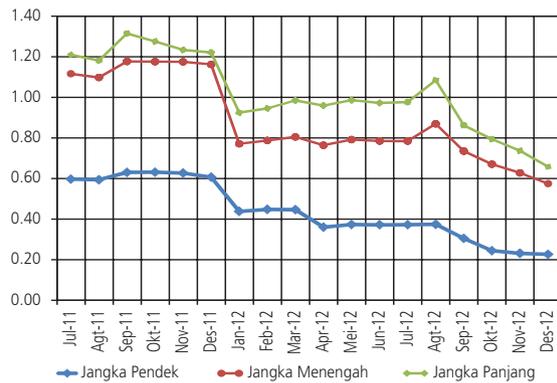


Level risiko SUN sempat berfluktuasi pada awal semester II 2012 berangsur membaik dan kemudian terus menurun pada akhir semester II 2012. Hal ini tercermin dari *Value at Risk* (VaR) yang menurun untuk semua tenor (Grafik 2.37). Gap fluktuasi yang cenderung mengecil pada bulan terakhir semester II 2012 lebih merupakan dampak dari membaiknya kinerja keuangan domestik dan minimnya imbas krisis global pada perekonomian nasional. Disamping itu itu, meningkatkannya kepercayaan investor terhadap prospek stabilitas perekonomian serta didukung oleh kebijakan-kebijakan perekonomian dari otoritas keuangan dan Bank Indonesia nasional dalam rangka mempermudah proses penanaman investasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, secara langsung maupun tidak langsung meminimalkan tingkat risiko investasi.

Pergerakan yield SUN secara rata-rata memiliki arah yang sama yaitu menurun selama semester II 2012 dibandingkan dengan semester sebelumnya (Grafik 2.38). *Trend* pergerakan SUN bertenor lebih dari 5 (lima) tahun cenderung lebih stabil dibandingkan yield tenor kurang dari 10 tahun dan juga semester sebelumnya. Namun demikian, *trend* yang lebih berfluktuatif justru terjadi pada SUN bertenor 1 tahun dan pada pertengahan semester II 2012

cenderung meningkat lebih tinggi dibanding dengan awal semester II 2012 yang disebabkan oleh sentimen eksternal dan isu domestik yang terkait dengan keperluan likuiditas jangka pendek dalam rangka hari raya keagamaan.

Grafik 2.37.
VaR SUN per Tenor



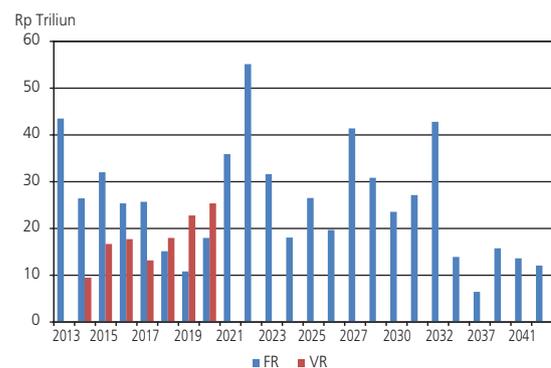
Sumber : Bloomberg diolah

Grafik 2.38
Pergerakan yield SUN



Sumber : Bloomberg diolah

Grafik 2.39.
Maturity Profile SUN



Sumber : DJPU-Kemenkeu, diolah

Tabel 2.11.
Kepemilikan SBN yang Dapat Diperdagangkan

Kepemilikan SBN (Rp triliun)					
	Juni 2011	Des 2011	Juni 2012	Des 2012	Perubahan
Perbankan	226,54	265,03	297,98	299,66	1,68
BI	3,12	7,84	20,36	3,07	-17,29
Reksadana	48,76	47,22	48,6	43,19	-5,41
Asing	234,99	222,86	224,42	270,52	46,1
Asuransi	93,6	93,09	106,86	83,42	-23,44
Dana Pensiun	36,69	34,39	34,56	56,46	21,9
Sekuritas	0,07	0,14	0,27	0,3	0,03
Lainnya	47,44	53,05	58,14	63,64	5,5
Total	691,629	723,62	791,19	820,26	29,07

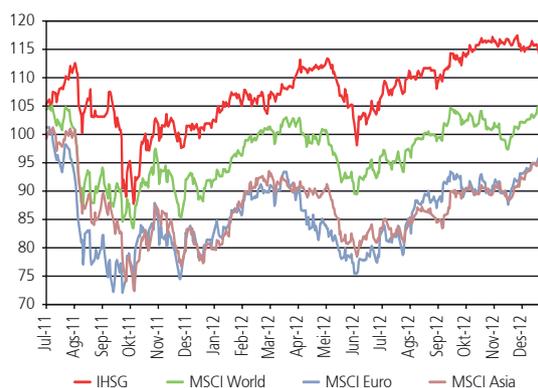
Sumber : DJPU-Kemenkeu, diolah

Risiko Pasar Saham

Kinerja indeks pasar saham domestik selama semester II 2012 menunjukkan peningkatan dan bergerak stabil pada akhir semester sejalan dengan perkembangan perekonomian domestik yang membaik. Walaupun pergerakan indeks harga saham global cenderung searah, indeks harga saham gabungan (IHSG) menunjukkan *trend* pergerakan yang lebih baik. Resiliensi serta dampak yang minim dari krisis global terhadap perekonomian nasional telah memupuk kepercayaan investor untuk masuk dalam pasar saham Indonesia dan bertransaksi didalamnya. Meningkatnya ketidakseimbangan perekonomian dunia mengakibatkan ekspek likuiditas pada *emerging market countries* dan secara tidak langsung menyebabkan pasar modal Indonesia menjadi salah satu sasaran penempatan investasi. Penguatan perekonomian kawasan melalui strategi kerjasama ekonomi ikut memperkuat IHSG sehingga pernah menyentuh level 116,67 pada bulan November 2012. Kondisi penguatan indeks terus berlangsung dengan *rally* fluktuasi yang tipis. (Grafik 2.40).

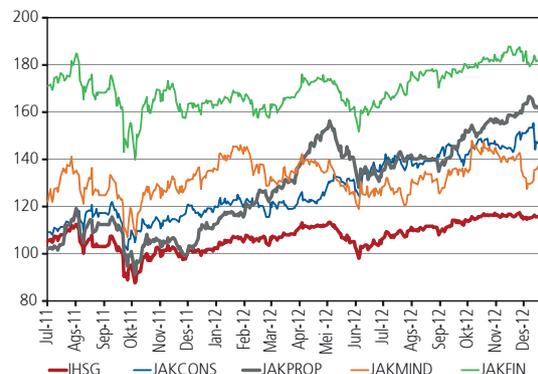
Selain itu, pergerakan kinerja saham sektoral domestik pun menunjukkan arah peningkatan yang sama dengan elevasi peningkatan tertinggi terjadi pada saham properti. Sementara itu, saham sektor keuangan kembali melanjutkan kinerjanya seperti semester I 2012 dan cenderung meningkat tipis dibandingkan kinerja saham sektoral secara keseluruhan (Grafik 2.41 dan 2.42). Situasi ini sangat terkait dengan kinerja perbankan yang terpantau stabil dan situasi sektor finansial yang masih terjaga. Namun demikian, diantara kinerja saham sektoral lainnya, kinerja saham sektor pertambangan cenderung tertahan laju pergerakannya.

Grafik 2.40. IHSG dan Indeks Harga Saham Global



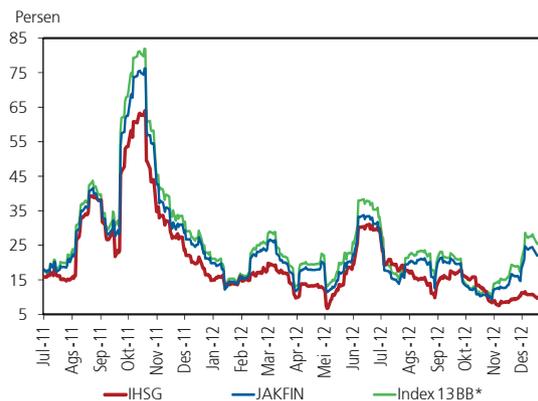
Sumber : Bloomberg diolah

Grafik 2.41. IHSG Sektoral



Sumber : Bloomberg diolah

Grafik 2.42. Volatilitas Saham Sektor Perbankan



Sumber : Bloomberg diolah

Faktor risiko untuk pasar saham domestik terhadap beberapa pasar global selama semester II 2012 mengalami penurunan. Dibandingkan dengan volatilitas bursa saham luar negeri, risiko IHSG pada akhir semester II 2012 mengalami penurunan dan berlangsung kontinyu (Grafik 2.43). Dalam hal ini, partisipasi investor asing dan

domestik sangat mempengaruhi besarnya transaksi pada lantai bursa domestik. Disamping itu, penurunan risiko yang searah terutama pada bursa regional turut berperan dalam meningkatkan *demand global* untuk mengarahkan radar investasinya pada kawasan Asia.

Otoritas keuangan pemerintah dan Bank Indonesia berupaya merespon kondisi tersebut guna meredam eksese ketidakseimbangan *demand global* dan dampak risiko yang muncul pada pasar saham domestik dan stabilitas perekonomian nasional. Kebijakan yang kondusif dan terintegrasi masih diperlukan guna memanfaatkan momentum peningkatan demand internasional agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Grafik 2.43
Volatilitas Bursa Saham Kawasan



Sumber : Bloomberg diolah

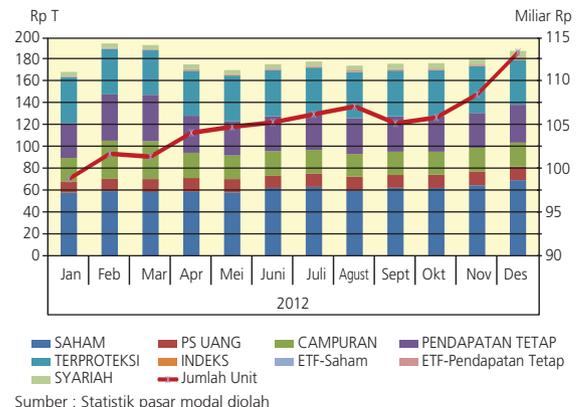
Kinerja Reksadana

Kinerja reksadana pada semester II 2012 membaik, yang tercermin dari NAB reksadana yang meningkat dibandingkan dengan NAB pada semester I 2012.

Selama semester II 2012, NAB reksadana naik sebesar 6,91% dari Rp17,47 triliun pada Juni 2012 menjadi Rp187,59 triliun per Desember 2012 (Grafik 2.44). Peningkatan NAB diiringi dengan peningkatan jumlah saham dari unit yang beredar dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja saham yang membaik dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jenisnya, proporsi

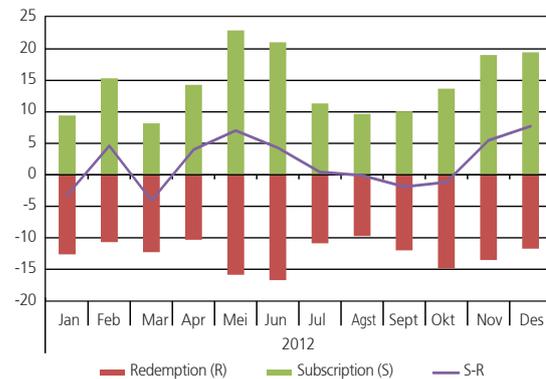
jenis reksadana selama semester II 2012 tidak banyak berubah dibandingkan dengan semester I 2012. Proporsi jenis reksadana masih didominasi oleh Reksadana Saham dengan pangsa 37,08%, dan diikuti oleh Reksadana Terproteksi (pangsa 21,77%), Reksadana Pendapatan Tetap (pangsa 18,43%), Reksadana Campuran (pangsa 11,70%), dan Reksadana Pasar uang dengan pangsa 6,58%.

Grafik 2.44
Kinerja Reksadana



Sumber : Statistik pasar modal diolah

Grafik 2.45
Aktivitas Reksadana



Sumber : Statistik pasar modal diolah

Aktivitas reksadana selama semester II 2012 menunjukkan bahwa net penjualan atau *redemption* yang lebih besar dari *subscription* terjadi pada Agustus hingga Oktober 2012. Sedangkan pada Juli, November dan Desember 2012 terjadi net pembelian atau *subscription* lebih besar dari *redemption* (Grafik 2.45 Aktivitas Reksadana), dimana lonjakan net pembelian atau *subscription* paling tinggi terjadi pada bulan November 2012 (38,99%).

Peningkatan kinerja reksadana tidak lepas dari peningkatan kinerja saham yang tercermin dari tren peningkatan IHSG. Mengingat saham merupakan salah satu bauran investasi (*underlying*) dalam portofolio reksadana saham, kinerja saham yang berfluktuasi akan mempengaruhi kinerja reksadana sehingga risiko pasar merupakan simpul risiko yang signifikan terhadap reksadana. Walaupun demikian, instrumen reksadana adalah instrumen keuangan yang bermanfaat karena memiliki fungsi lindung nilai (*hedging*) terhadap portofolio dana investasi.

2.3.2 Pembiayaan Melalui Pasar Modal dan Perusahaan Pembiayaan

Penerbitan Saham dan Obligasi Korporasi

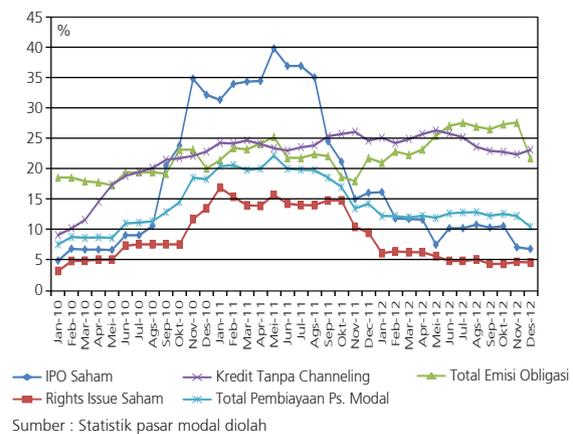
Selama semester II 2012, sumber pembiayaan dari pasar modal mengalami peningkatan sehingga turut mendukung perekonomian nasional. Jumlah pembiayaan sampai dengan akhir semester II 2012 telah mencapai Rp 2.742 triliun, meningkat dibandingkan akhir semester II 2011 sebesar Rp2.407 triliun (Tabel 2.12). Porsi instrumen pembiayaan pasar modal pada semester II 2012 tetap didominasi oleh saham diikuti oleh obligasi korporasi. Besarnya dominasi saham terhadap total pembiayaan pasar modal tidak mengalami perubahan, dan tetap sama seperti semester sebelumnya.

Pada semester II 2012, penerbitan obligasi, obligasi berkelanjutan dan obligasi sukuk telah mencapai Rp57,4 T dan 20 juta USD yang diterbitkan oleh 45 perusahaan. Dari sektor perbankan, penerbitan obligasi dan obligasi berkelanjutan berasal dari sektor perbankan meningkat, masing-masing sebesar Rp4,2 triliun dan Rp11,3 triliun dari 11 bank emiten. Dibandingkan dengan semester sebelumnya, penerbitan obligasi dan obligasi berkelanjutan masing-masing mengalami peningkatan sebesar 3,5 T dan 6,3 T, meskipun pada akhir semester mengalami stagnasi penerbitan. Hal ini didukung oleh proses emisi obligasi

berkelanjutan yang lebih mudah dari sisi birokrasi dan biaya penerbitan yang lebih murah.

Sumber pembiayaan yang masih mengandalkan pada sektor perbankan yang sangat *highly regulated* tentunya akan sangat terekspos pada risiko sistemik bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk itu, stimulus paket kebijakan dari sisi fiskal dan moneter dalam meningkatkan sumber pembiayaan alternatif untuk sistem keuangan di Indonesia sangat diperlukan. Upaya pendalaman pasar (*financial deepening*) dengan rambu kebijakan yang tepat penting untuk dipertimbangkan. Pengembangan instrumen pembiayaan yang efektif dan efisien dalam pasar modal merupakan pilihan dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan dalam pasar modal. Bertambahnya pilihan investasi dalam pasar modal tentunya akan mempermudah upaya diversifikasi risiko dan mitigasi internal terhadap krisis global.

Grafik 2.46
Perkembangan pembiayaan kredit dan pasar modal



Pada semester II 2012, IPO saham dan *right issue* mengalami peningkatan yang memadai seperti semester sebelumnya. Secara total, peningkatan IPO saham telah mencapai 9,1 T dan 18,3 T untuk *right issue* (Grafik 2.47). Namun demikian, pertumbuhan *Initial Public Offering* (IPO) saham dan *right issue* sektor perbankan masih cenderung tipis sepanjang semester II 2012, masing-masing hanya berkisar 1,3 T dan 6,4 T. Untuk itu, peran pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan perbankan memiliki

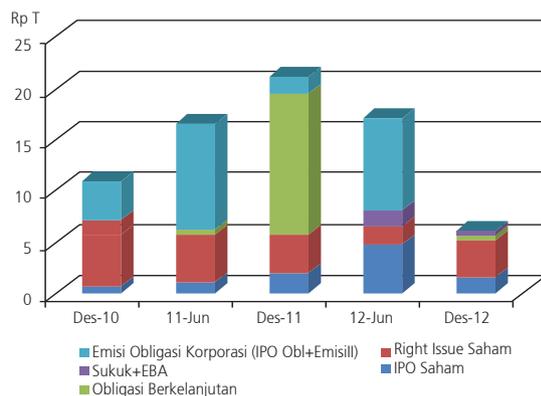
Tabel 2.12
Sumber Pembiayaan dari Pasar Modal

Posisi (Rp Miliar)	Desember 2011		Juni 2012		Desember 2012	
1 Saham	2.091.205	92,30%	2.216.406	92,09%	2.525.005	92,09%
2 Obligasi Korp. (Rp)	141.918	6,26%	161.174	6,70%	181.404	6,62%
Obligasi Korp. (USD)	725	0,03%	758	0,03%	967	0,04%
3 MTN (Rp)	11.934	0,53%	12.009	0,50%	11.881	0,43%
MTN (USD)	7.419	0,33%	4.731	0,20%	9.452	0,34%
4 Sukuk	5.876	0,26%	6.669	0,28%	6.883	0,25%
5 Warran	4.460	0,20%	2.695	0,11%	3.114	0,11%
6 EBA	1.447	0,06%	1.247	0,05%	1.982	0,07%
7 Mutual Fund (Rp)	488	0,02%	1.004	0,04%	1.252	0,05%
8 Right	238	0,01%	1	0,00%	47	0,00%
Jumlah	2.265.711	100%	2.406.694	100%	2.741.988	100%

Sumber : Statistik pasar modal diolah

potensi untuk dikembangkan dan memiliki prospek untuk memanfaatkan momentum pada meningkatnya minat investasi asing dalam sistem keuangan Indonesia.

Grafik 2.47
Penerbitan surat-surat berharga melalui pasar modal



Sumber : DSM diolah

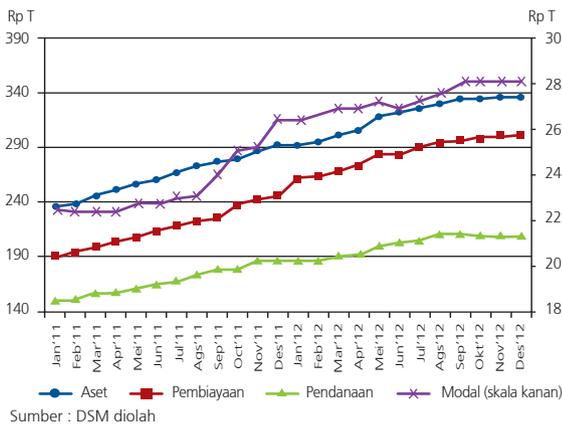
Kinerja dan Risiko Perusahaan Pembiayaan (Finance Companies)

Selama semester II 2012, Perusahaan Pembiayaan (PP) memiliki kinerja yang baik seperti semester sebelumnya namun dari sisi pembiayaannya cenderung melambat. Peningkatan kinerja PP tetap didorong oleh berkembangnya pembiayaan pada skala kecil/retail yang sebagian besar merupakan skema pembiayaan konsumen yang harus bersaing dengan

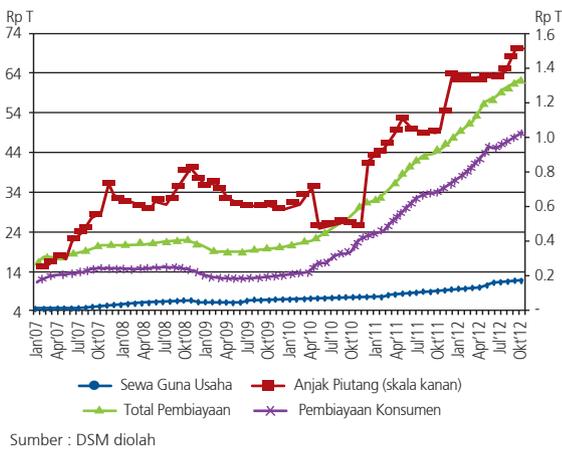
fasilitas pembiayaan yang sama dari entitas keuangan perbankan. Untuk itu, skema pembiayaan dari perusahaan pembiayaan lebih menawarkan kemudahan persyaratan dalam memperoleh pembiayaan dengan persyaratan minimum. Namun demikian, kemudahan pembiayaan tersebut pada Juni 2012 telah dibatasi dengan beberapa persyaratan yang antara lain tertuang dalam kebijakan *Loan to Value ratio* (LTV) dan kebijakan terkait yang diterbitkan oleh otoritas keuangan lainnya. Perkembangan PP terlihat dari peningkatan asetnya sebesar Rp19,24 triliun dari semester lalu (Rp322 triliun) menjadi Rp342 triliun, yang berasal dari peningkatan tipis pada kegiatan pembiayaan, pendanaan dan peningkatan modal (Grafik 2.48).

Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha (leasing) masih tetap mendominasi kegiatan penyaluran pembiayaan dari PP. Porsi penyaluran pembiayaan terbesar masih disalurkan pada pembiayaan segmen otomotif dan kendaraan bermotor karena proses persyaratan kredit yang sangat mudah yaitu persyaratan *collateral* yang lebih rendah dibandingkan perbankan dan juga upaya pemasaran lebih luas. Pembiayaan PP selama semester II 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp13 triliun dibandingkan dengan semester I 2012 (Rp179 triliun) menjadi Rp192 triliun (Grafik 2.49).

Grafik 2.48.
Kinerja Perusahaan Pembiayaan



Grafik 2.49
Pangsa Pembiayaan PP

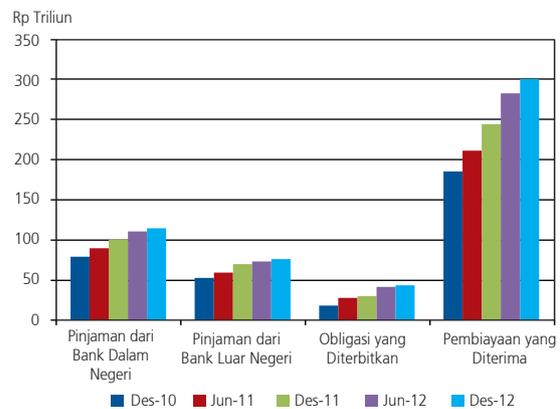


Dari sisi pendanaan, penerbitan surat-surat berharga terutama obligasi korporasi yang dilakukan PP maupun pinjaman dari bank dalam negeri dan luar negeri selama semester II 2012 cenderung menurun. Penurunan dari sisi pendanaan PP ditengarai merupakan dampak dari pesimisme pelaku pasar pada penurunan prospek pembiayaan yang disalurkan oleh PP. Walaupun kemudahan persyaratan perijinan penerbitan obligasi berkelanjutan yang dikeluarkan pemerintah akan mempermudah PP untuk mendapatkan pendanaan dengan biaya yang lebih murah, namun stimulus tersebut belum signifikan untuk meningkatkan pendanaan PP melalui penerbitan obligasi.

Secara nominal, pendanaan PP melalui obligasi mengalami peningkatan tipis sebesar Rp42 triliun pada semester I 2012 menjadi Rp44 triliun pada semester II

2012. Pendanaan PP melalui pinjaman bank dalam negeri juga meningkat tipis dari 111 triliun pada semester I 2012 menjadi 115 triliun pada semester II 2012, sementara pendanaan melalui pinjaman luar negeri hanya meningkat dari 73 triliun pada semester I 2012 menjadi 76 triliun pada semester II 2012. Secara total, porsi pinjaman PP terhadap bank dalam negeri dan luar negeri mengalami perlambatan pertumbuhan selama semester II 2012 karena hanya bertambah sekitar 7 triliun. (Grafik 2.50).

Grafik 2.50.
Sumber Pendanaan PP



Rasio keuangan PP selama semester II 2012 menunjukkan tingkat rentabilitas dan efisiensi yang cenderung stabil seperti semester sebelumnya (Tabel 2.13). Peningkatan tersebut merupakan dampak dari meningkatnya jumlah pembiayaan yang berkategori lancar dan relatif stabilnya skema penyaluran pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha pada aktivitas pembiayaan PP.

Besarnya persentase *Non Performing Loan* (NPL) pembiayaan PP menunjukkan peningkatan tipis dibandingkan semester sebelumnya, sehingga risikonya sedikit bertambah. Namun demikian, kondisi tersebut masih didukung oleh indikator rasio keuangan yang cukup terjaga pada semester II 2012. Kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan domestik untuk memitigasi risiko perlu diperhatikan agar PP lebih berhati-hati dalam penyaluran kegiatan pembiayaannya.

Tabel 2.13.
Indikator Keuangan PP

Triliun Rp	Des 2011	Jun 2012	Sem I 2012	Des 2012	Sem I 2012
Asset	291	322	11%	342	6%
Kewajiban	235	263	12%	275	5%
o/w Debt	218	245	12%	255	4%
Modal	56	60	6%	67	11%
o/w Profit Before Tax	12	8	-34%	16	102%
o/w Profit After Tax	9	6	-34%	12	102%
Rasio Keuangan (%)					
ROA (%)	4,44	5,03		4,86	
ROE (%)	18,14	20,45		19,80	
BOPO (%)	78,90	75,97		76,35	
Dept/Equity	3,88	4,09		3,84	
Obligations/Equity	4,19	4,75		4,54	

Sumber : DSM diolah

Meningkatnya persentase NPL PP secara agregat menjadi 1,14% pada semester II 2012 dibandingkan dengan semester sebelumnya yang mencapai 1,11 % dikontribusi oleh meningkatnya NPL dari semua segmen pembiayaan (Tabel 2.14). Kebijakan LTV yang diterbitkan Bank Indonesia dan kebijakan peningkatan uang muka yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan diharapkan dapat meningkatkan aspek kehati-hatian PP dalam menyalurkan pembiayaannya dan juga menurunkan dampak sistemik terhadap sektor perbankan (terutama bagi PP yang terafiliasi dengan bank).

Kinerja dan Risiko Perusahaan Asuransi

Kinerja perusahaan 10 asuransi yang go public sampai dengan posisi September 2012 mengalami pertumbuhan yang sedikit menurun namun masih memiliki potensi untuk berkembang seperti tahun sebelumnya. Pola penempatan aset dan diversifikasi investasi perusahaan asuransi yang dilakukan pada tahun 2011 cenderung melambat namun terjadi pergeseran pola penempatan sampai dengan triwulan III 2012 (dimana

Tabel 2.14.
Total Pembiayaan dan NPL Per Jenis Pembiayaan

Pembiayaan PP Triliun Rp	Des 2011	Jun 2012	Sem II 2011	Des 2012	Sem II 2011
Total Pembiayaan	245,30	284,16	16%	302,05	6%
Sewa Guna Usaha	76,59	101,50	33%	105,08	4%
Anjak Piutang	3,91	3,99	2%	5,15	29%
Kartu Kredit	0,00	0,00	-25%	0,00	0%
Pembiayaan Konsumen	164,79	178,66	8%	191,82	7%
NPL (%)					
Total pembiayaan	1,21	1,11		1,14	
Sewa Guna Usaha	0,32	0,22		0,29	
Anjak Piutang	2,81	3,35		1,51	
Kartu Kredit	0,00	0,00		0,00	
Pembiayaan Konsumen	1,59	0,02		1,60	

Sumber : DSM diolah

terjadi penurunan pertumbuhan total aset investasi sebesar 6% namun masih berpotensi meningkat sampai akhir tahun). Indikator profitabilitas selama tiga triwulan tahun 2012 cukup meningkat dibanding tahun 2011. Besarnya profitabilitas sangat didukung oleh strategi penempatan aset investasi yang lebih spekulatif dibanding tahun lalu antara lain pada saham dan reksadana selain dari deposito berjangka dan obligasi. Jenis investasi perusahaan asuransi cukup terdiversifikasiantara penempatan di perbankan dan di pasar modal mengacu pada aturan KMK No.424/KMK.06/2003 untuk mitigasi risiko.

Peningkatan total aset selama tahun 2011 lebih pesat yaitu Rp3,18 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,32 triliun (dengan jumlah aset pada tahun 2011 sebesar Rp16,68 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp13,51 triliun). Walaupun penurunan total aset terjadi pada triwulan III 2012 sebesar Rp3,42 triliun (20,50%) dibanding akhir tahun 2011, namun total aset masih memiliki kemungkinan bertumbuh sampai dengan akhir tahun 2012 sepanjang kepastian prospek perekonomian domestik menjadi faktor terpenting.

Penempatan aset investasi perusahaan asuransi *go public* selama tahun 2011 mengalami penurunan dan pertumbuhan positif hanya terjadi pada investasi saham, namun selama triwulan III 2012 pola aset investasi 10 perusahaan asuransi yang *go public* didominasi oleh deposito berjangka yang diikuti oleh saham, obligasi dan reksadana. Instrumen *Medium Term Notes* (MTN) selama triwulan III 2012 kurang diminati oleh ke 10 perusahaan asuransi tersebut. Namun demikian, investasi reksadana mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibanding instrumen investasi lainnya selama tahun 2012 (sampai dengan bulan September). Mengingat besarnya porsi aset investasi pada saham dan reksadana cukup signifikan, maka volatilitas harga saham akan berpengaruh pada perkembangan investasi perusahaan asuransi dan tentunya akan terekspos oleh risiko pasar.

Tabel 2.15.
Perkembangan 11 Perusahaan Asuransi yang Listing pada KSEI

Perkembangan Aset 10 Perusahaan Asuransi yang Go Public							
ASET INVESTASI (Triliun)	2009	2010	Δ (%yoy)	2011	Δ (%yoy)	Sep-12	Δ (%ytm)
1 REKSADANA	1.51	0.29	-80.89	0.11	-60.87	0.19	67.62
2 OBLIGASI	0.43	1.17	171.82	0.90	-22.47	0.90	-0.58
3 DEPOSITO BERJANGKA	1.74	2.81	61.89	2.51	-10.54	2.81	11.61
4 SAHAM	6.59	0.86	-86.90	0.90	3.92	1.34	49.16
5 MTN	0.07	0.21	182.91	0.13	-39.13	0.00	-100.00
JUMLAH ASET INVESTASI	9.99	12.13	21.44	14.16	16.69	10.93	-22.80
JUMLAH ASET NON INVESTASI	1.20	1.37	14.58	2.53	84.04	2.34	-7.60
TOTAL ASET	11.19	13.51	20.71	16.68	23.54	13.27	-20.50
INDIKATOR PROFITABILITAS							
ROA	5.19%	6.24%		8.67%		10.39%	
ROE	12.35%	14.57%		13.72%		15.02%	
ROI	13.33%	11.68%		9.31%		12.61%	

Sumber : Bursa Efek Indonesia diolah

Per Desember 2012 terdapat 135 perusahaan asuransi yang terdiri dari 46 asuransi jiwa, 85 asuransi kerugian, 5 asuransi sosial, dan empat reasuransi (Tabel 2.16). Dari seluruh perusahaan asuransi tersebut terdapat 10 yang telah *go public* dengan total aset investasi per September 2012 sebesar Rp13,27 triliun atau turun 20,50% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20,17 triliun. Dari 10 perusahaan asuransi yang *go public*

tersebut pangsa aset terbesar hanya didominasi oleh satu perusahaan asuransi yaitu mencapai 47% (Grafik 2.51).

Peningkatan total aset pada 11 perusahaan asuransi yang *go public* pada triwulan I 2012 tidak diikuti dengan meningkatnya aset investasi. Hal ini disebabkan karena aset investasi pada saham mengalami penurunan yang signifikan sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian global. Sementara penempatan pada aset investasi yang lebih rendah risikonya seperti obligasi, deposito berjangka dan reksadana mengalami peningkatan (Tabel 2.15).

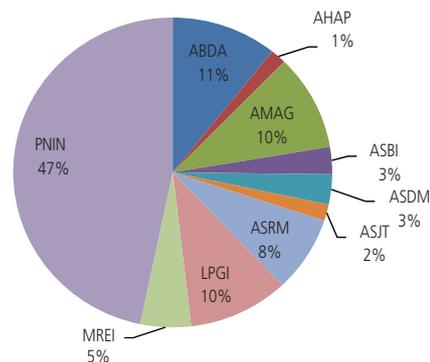
Selama triwulan III 2012, 10 perusahaan asuransi yang telah *go public* tersebut menunjukkan kenaikan indikator profitabilitas baik pada ROA, ROE dan ROI sebesar 1,72%, 1,30% dan 3,30%.

Tabel 2.16
Profil Asuransi

Profil Asuransi	Jumlah Perusahaan*			
	Konv	UUS	Full Syariah	Total
Asuransi Jiwa	43	17	3	46
Asuransi Kerugian	83	19	2	85
Asuransi Sosial	5	0		5
Reasuransi	4	4		4
Total	135	40	5	140

*per Desember 2012

Grafik 2.51
Pangsa 10 Perusahaan Asuransi Go Public



Sumber : Bursa Efek Indonesia diolah

Bab 3

Tantangan dan Prospek Stabilitas Sistem Keuangan

halaman ini sengaja dikosongkan

Stabilitas sistem keuangan pada semester I 2013 dan 2013 diperkirakan masih tetap terjaga. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan perbankan yang cukup tinggi dengan tekanan terhadap perbankan yang relatif rendah. Kondisi ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang meningkat, pertumbuhan Indonesia masih tinggi dan kondisi makroekonomi yang masih terjaga. Meskipun beberapa potensi dan peluang untuk meningkatkan kinerja sistem keuangan masih terbuka, namun terjaganya stabilitas sistem keuangan ini masih diselimuti oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang perlu terus diwaspadai. Sementara itu, stress test yang dilakukan terhadap industri perbankan menunjukkan bahwa perbankan Indonesia masih dalam kondisi yang baik dengan ketahanan yang tetap terjaga.

3.1 TANTANGAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

3.1.1 Peluang dan Tantangan Eksternal

Secara umum perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan 2012. Lebih stabilnya fundamental ekonomi negara berkembang dan pemulihan dari beberapa negara yang terkena krisis akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Berdasarkan data *World Economic Outlook*¹ oleh IMF, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan meningkat menjadi 3,5% pada 2013, lebih tinggi dari tahun 2012 (3,2%). Perkiraan pertumbuhan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang terutama di wilayah Asia dan Amerika Latin, serta pemulihan ekonomi pada negara-negara yang terkena krisis seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia diperkirakan masih menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan negara maju pada 2013. Hal ini terutama didorong oleh peningkatan produktivitas yang diakibatkan kebijakan ekspansif dari pemerintah beberapa negara berkembang. Perekonomian Cina diperkirakan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan 2012. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kebijakan pertumbuhan konsumsi domestik dan adanya peningkatan kembali permintaan produk Cina yang didorong oleh pemulihan ekonomi dunia. Jepang, yang telah mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan IV 2012, menetapkan target dan kebijakan yang optimis bagi perekonomiannya di 2013. Pemerintah Jepang berencana mengeluarkan stimulus sebesar 10 Triliun Yen untuk keluar dari deflasi dengan penetapan target inflasi sebesar 2% pada 2013. Dengan stimulus tersebut, Jepang berharap dapat mendorong pertumbuhan ekspor melalui penurunan nilai tukar.

¹ IMF-World Economic Outlook, Januari 2013

Sementara itu, beberapa negara yang terkena krisis diperkirakan mengalami pemulihan meskipun berjalan lambat. Pada periode akhir 2012, beberapa indikator perekonomian Amerika Serikat memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kembali meningkatnya permintaan produk ekspor, kondisi pasar tenaga kerja yang membaik dan kinerja sektor perumahan yang memberikan harapan di tahun 2013. Namun demikian, pemerintah Amerika Serikat masih harus berhadapan dengan krisis fiskal, dan adanya kebijakan pemotongan anggaran yang akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemulihan krisis ekonomi di wilayah Eropa pada 2013 diperkirakan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Dampak beberapa kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh otoritas di beberapa negara Eropa selama tahun 2012 menunjukkan kemajuan pada sektor keuangan dan diperkirakan akan terus berlanjut di 2013. Hal tersebut terlihat dari membaiknya anggaran beberapa Negara di kawasan tersebut. Meskipun penetapan kebijakan pemulihan terus dilakukan, hasil dari kebijakan tersebut masih dirasa kurang dan di beberapa negara masih terdapat ketidakjelasan dalam penyelesaian krisis.

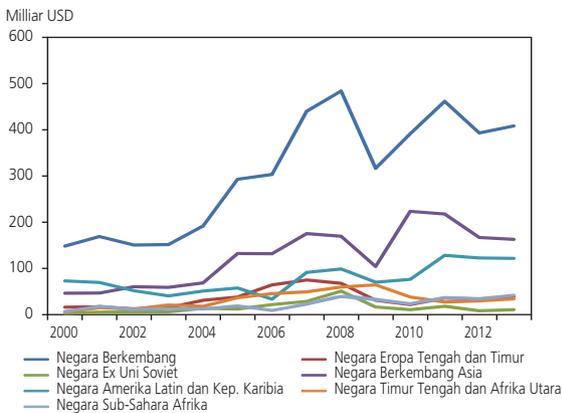
Tabel 3.1
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia

	WEO-IMF			World Bank			Asia-Pacific Consensus Forecast			Asian Development Bank		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
World Output	3.9	3.2	3.5	2.7	2.3	2.4						
Advanced Economcs	1.6	1.3	1.4	1.6	1.3	1.3				1.2	1.2	1.3
Amerika Serikat	1.8	2.3	2.0	1.8	2.2	1.9	1.8	2.2	1.9	1.8	2.2	2.1
Jepang	-0.6	2.0	1.2	-0.7	1.9	0.8	-0.7	1.9	1.2	-0.7	1.7	1.6
Eropa	1.4	-0.4	-0.2	1.5	-0.4	-0.1	1.5	-0.3	0.1			
Developing Asia*	8	6.6	7.1							7.2	6.0	6.6
China	9.3	7.8	8.2	9.3	7.9	8.4	9.3	7.8	8.2	9.3	7.7	8.1
India	7.9	4.5		6.9	5.1	6.1	6.9	5.3	6.3	6.5	5.4	6.5
ASEAN 5	4.5	5.7	5.5							4.5	5.9	5.8
Indonesia	-	-	-	6.5	6.1	6.3	6.5	6.2	6.2	6.5	6.3	6.6
Malaysia	-	-	-					5.3	5.0	5.1	4.6	4.8
Philipina	-	-	-					6.6	5.9	3.9	5.5	5.0
Thailand	-	-	-	0.1	4.7	5.0	0.1	5.6	4.6	0.1	5.2	5.0
Vietnam	-	-	-							5.9	5.1	5.7
Latin America and the Caribbean	4.5	3	3.6	4.3	3	3.5	4.3					
Middle East and Nothr Africa	3.5	5.2	3.4	-2.4	3.8	3.4						
Sub-Saharan Africa	5.3	4.8	5.8	4.5	4.6	4.9						

Sumber: IMF - World Economic Outlook Update January 2013, WB - Global Economic Prospect January 2013, Asia Pasific Consensus Forecast Maret 2013, ADB - Asian Development Outlook Supplement Desember 2012

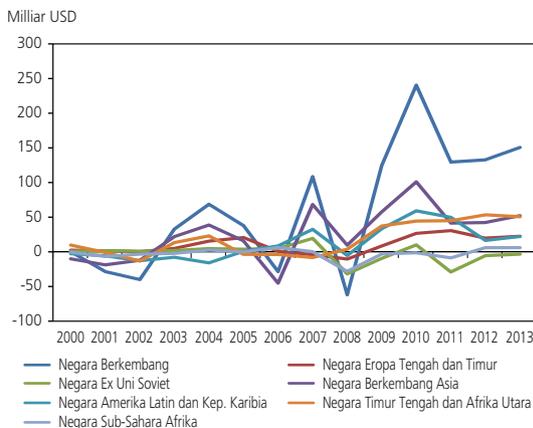
Dalam kondisi lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada negara maju memunculkan potensi bagi negara berkembang. Hal ini akan mendorong investor global untuk menempatkan dana investasinya ke negara-negara berkembang dengan fundamental ekonomi yang lebih baik. IMF memperkirakan pada 2013 akan terus terjadi peningkatan aliran *Foreign Direct Investment* dan investasi portofolio ke negara berkembang. Hal tersebut didukung oleh tren peningkatan *Foreign Direct Investment* dan investasi portofolio semenjak krisis dunia 2008. Selain itu, peningkatan tersebut juga didorong oleh kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian negara berkembang kedepan.

Grafik 3.1
Perkembangan Aliran Investasi Langsung
(Private Direct Investment)



Sumber: IMF - World Economic Outlook Database, Oktober 2012

Grafik 3.2
Perkembangan Aliran Investasi Portofolio
(Private Portfolio)



Sumber: IMF - World Economic Outlook Database, Oktober 2012

3.1.2 Peluang dan Tantangan Internal

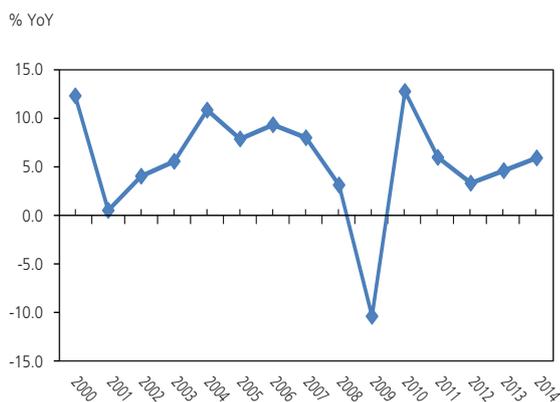
Sementara itu dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh 6,3% - 6,8% di tahun 2013. Konsumsi dan investasi domestik masih kuat dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sementara ekspor diharapkan akan membaik seiring dengan pemulihan perekonomian dunia dan kenaikan harga komoditas internasional.

Konsumsi dalam negeri didukung oleh jumlah penduduk kelas menengah Indonesia yang terus meningkat. Peningkatan ini mendorong semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat terutama untuk barang-barang konsumsi tahan lama dan telekomunikasi. Selain itu, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) pada 2014 mendatang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi sejak 2013. Hal ini disebabkan konsumsi domestik akan meningkat dibanding tahun lainnya.

Dari sisi investasi, proyek infrastruktur pemerintah dan swasta yang diperkirakan mencapai nilai Rp 458 triliun pada 2013. Proyek infrastruktur ini memiliki efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan meningkatkan *marginal productivity of private capital* dan mengurangi biaya produksi. Proyek infrastruktur juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan tingkat konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. Peningkatan investasi di 2013 ini juga didukung oleh Survei Kegiatan Dunia Usaha triwulan IV 2012 yang memperlihatkan terjadinya peningkatan nilai investasi semester I 2013. Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai investasi pada semester I 2013 lebih besar dibandingkan semester II 2012. Sektor yang paling banyak berencana melakukan investasi pada semester I 2013 adalah sektor industri pengolahan, sektor keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan.

Sementara itu, tekanan defisit pada transaksi berjalan yang cukup tinggi di 2012 diperkirakan akan menurun di 2013. Penurunan tersebut seiring dengan ekspektasi pemulihan ekonomi dunia serta kinerja perdagangan non migas yang membaik. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekspor non migas Indonesia diperkirakan akan tumbuh melebihi pertumbuhan impor non migas didorong oleh meningkatnya volume perdagangan dunia. Di sisi lain, Transaksi Modal dan Finansial diperkirakan masih mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan *Foreign Direct Investment* dan penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta dibandingkan tahun 2012.

Grafik 3.3
Volume Perdagangan Dunia



Sumber: IMF - World Economic Outlook Database, Oktober 2012

Pada tahun 2013, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan di dalam Neraca Pembayaran Indonesia, diantaranya adalah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia. Selain itu bertambahnya penduduk kelas ekonomi menengah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mendorong peningkatan permintaan barang impor, salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak. Kenaikan impor BBM yang tidak diringi dengan kenaikan produksi minyak dalam negeri dapat mempengaruhi kesinambungan fiskal dikarenakan pemerintah harus mengeluarkan subsidi yang cukup besar

untuk menutupi peningkatan konsumsi BBM, sementara pendapatan pemerintah dari *lifting* minyak berkurang akibat menurunnya produksi minyak domestik.

Salah satu solusi untuk mengurangi tekanan pada fiskal ini adalah pengurangan subsidi pemerintah kepada masyarakat diantaranya melalui rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik, bahan bakar gas serta BBM. Rencana tersebut di satu sisi dapat mengurangi beban APBN, di sisi lain dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi dan sentimen negatif termasuk mengurangi minat masuk investasi asing kedalam Indonesia yang dapat mempengaruhi Transaksi Modal dan Finansial di Neraca Pembayaran Indonesia. Apabila hal ini terus berlanjut dapat menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan Indonesia.

Meskipun beberapa indikator makroekonomi mengalami perbaikan, beberapa kondisi lainnya akan menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rencana Kenaikan Tarif Dasar Listrik, Gas dan BBM serta kenaikan Upah Minimum Provinsi dapat menimbulkan kenaikan biaya produksi. Hal tersebut akan meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu perekonomian Indonesia juga dihadapkan oleh tekanan Inflasi dari sektor bahan pangan.

Dari sisi perbankan, risiko likuiditas akan mengalami peningkatan pada semester I 2013 meskipun masih dalam kondisi normal. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2013 masih menunjukkan angka yang optimis. Pada umumnya bank menargetkan tingkat pertumbuhan kreditnya sebesar 22,0%. Sementara itu dari sisi penghimpunan dana, bank menargetkan pertumbuhan DPK-nya sebesar 14,1%. Meskipun pertumbuhan DPK masih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan kredit, Secara nominal kondisi likuiditas perbankan diperkirakan masih akan memadai. Sementara itu dari sisi likuiditas valas, defisit Transaksi Berjalan dapat memberi tekanan terhadap ketersediaan likuiditas valas di perbankan Indonesia.

3.2 DAMPAK TERHADAP SISTEM PERBANKAN

3.2.1 Penilaian Risiko

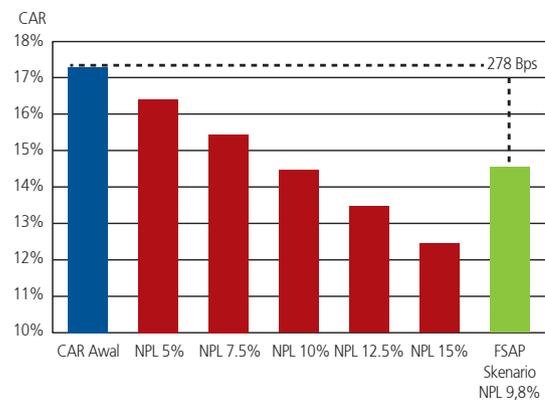
Ketahanan perbankan dalam menghadapi potensi peningkatan risiko Kredit dan risiko Pasar cukup baik didukung CAR yang lebih tinggi dibandingkan semester I 2012. *Stress test* yang dilakukan berdasarkan *sensitivity* dan *scenario analysis* (khusus *stress test* risiko Kredit) sesuai metodologi yang digunakan dalam FSAP 2009 menunjukkan bahwa pada akhir 2012, perbankan masih mampu menyerap potensi peningkatan risiko Kredit dan risiko Pasar. Dalam hal ini, risiko pasar mencakup kenaikan suku bunga rupiah, penurunan harga obligasi negara dan pelemahan nilai tukar.

3.2.2 Penilaian Risiko Kredit

Pada *stress test* risiko kredit, skenario FSAP 2009 yang digunakan yaitu GDP diasumsikan menjadi 0%, berpotensi meningkatkan NPL perbankan dari 1,87% (triwulan IV 2012) menjadi 9,8% (pada triwulan IV 2013). Dengan menggunakan skenario tersebut, CAR perbankan berpotensi turun sebesar 278 bps yaitu dari 17,32% menjadi 14,54%.

Berdasarkan kelompok bank, kelompok BPD, Persero dan Swasta terindikasi paling rentan terhadap peningkatan risiko Kredit dengan masing-masing CAR setelah *stress test* sebesar 13,45%, 13,12% dan 12,87%. Adapun secara historis, dalam 5 tahun terakhir NPL perbankan tidak pernah melebihi 5% dengan rata-rata historis persentase NPL selama 10 tahun terakhir sebesar 4,5%. Dengan skenario kenaikan NPL menjadi 5%, CAR perbankan hanya turun sebesar 92 bps menjadi sebesar 16,40%.

Grafik 3.4
Stress Test Risiko Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 3.2
Delta CAR setelah *Stress Test*

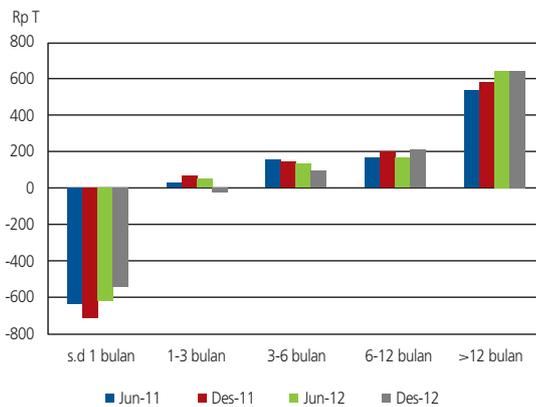
	CAR Desember 2012 (%)				
	Persero	Swasta	BPD	Campuran	KCBA
CAR Awal	16,17%	15,41%	18,11%	19,45%	31,89%
CAR stlh Kenaikan NPL	13,12%	12,87%	13,45%	17,11%	29,26%
CAR stlh Kenaikan Suku Bunga Rupiah	13,83%	13,97%	14,49%	19,04%	30,14%
CAR stlh Pelemahan Harga Obligasi	14,24%	14,61%	17,90%	18,86%	29,19%
CAR stlh Pelemahan Nilai Tukar Rupiah	16,19%	15,38%	18,13%	19,24%	30,54%
	Delta CAR setelah <i>Stress Test</i> (dlm bps)				
	Persero	Swasta	BPD	Campuran	KCBA
Kenaikan NPL	-305	-245	-466	-234	-163
Kenaikan Suku Bunga Rupiah	-234	-144	-362	-41	-75
Pelemahan Harga Obligasi	-193	-80	-21	-59	-170
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah	2	-3	2	-21	-35

Sumber: Bank Indonesia, diolah

3.2.3 Penilaian Risiko Pasar

Dari sisi risiko pasar, eksposur aset dan liabilities perbankan berjangka pendek yang rentan terhadap perubahan suku bunga mengalami penurunan selama semester II 2012. Berdasarkan *tenor maturity profile* rupiah yang berjangka pendek, per Desember 2012, perbankan mencatat posisi *short* (Net Kewajiban) yang lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan akhir semester I 2012 yaitu sebesar Rp275,15 T. Mayoritas *maturity bucket* dalam posisi *short* berada pada tenor sampai dengan 1 bulan dan cenderung mengalami penurunan dibandingkan dua semester sebelumnya.

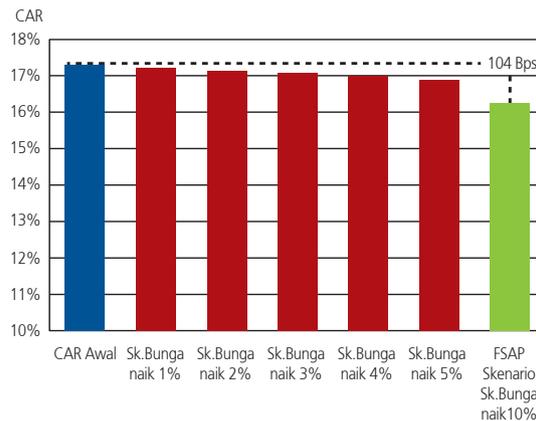
Grafik 3.5
Maturity Profile Rupiah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Stress test suku bunga rupiah dilakukan menggunakan skenario FSAP yaitu suku bunga rupiah naik sebesar 10% secara paralel pada seluruh *maturity bucket* yang berjangka waktu dibawah 1 tahun. Dengan skenario tersebut, CAR perbankan berpotensi turun sebesar 104 bps menjadi 16,28%. Berdasarkan kelompok bank, BPD, Persero dan Swasta kembali terindikasi paling rentan terhadap risiko peningkatan suku bunga rupiah. Adapun CAR setelah *stress test* masing-masing kelompok bank tersebut turun menjadi sebesar 14,49%, 13,83% dan 13,97%.

Grafik 3.6
Stress Test Suku Bunga



Sumber: Bank Indonesia, diolah

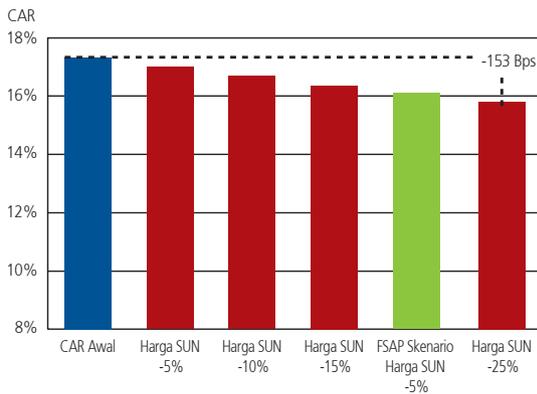
Peningkatan risiko pasar selain dapat bersumber dari peningkatan suku bunga rupiah juga dapat berasal dari penurunan harga obligasi negara yang berdampak pada turunnya nilai *mark to market portfolio Available for Sale* (AFS) dan *Trading* perbankan sebagaimana sempat terjadi pada periode awal krisis 2008. Per Desember 2012, eksposur perbankan terhadap risiko penurunan harga obligasi negara turun dibandingkan dengan semester I-2012 seiring berkurangnya portofolio obligasi negara AFS dan *Trading* menjadi Rp181,22 T (turun 6,08% dari semester I 2012).

Skenario FSAP yang digunakan pada *stress test* penurunan harga obligasi negara yaitu penurunan sebesar 20%. Dengan skenario tersebut, CAR perbankan berpotensi turun sebesar 153 bps menjadi 16,09%. Berdasarkan kelompok bank, Persero dan KCBA yang memiliki portofolio obligasi negara terbesar berpotensi mengalami penurunan CAR paling signifikan yaitu masing-masing sebesar 193 bps dan 170 bps, sementara CAR kelompok bank lainnya hanya turun kurang dari 100 bps.

Gejolak nilai tukar yang dapat mempengaruhi eksposur valas perbankan terutama posisi valas jangka pendek pada saat nilai tukar Rp melemah juga menjadi salah satu risiko pasar yang berpotensi menekan CAR

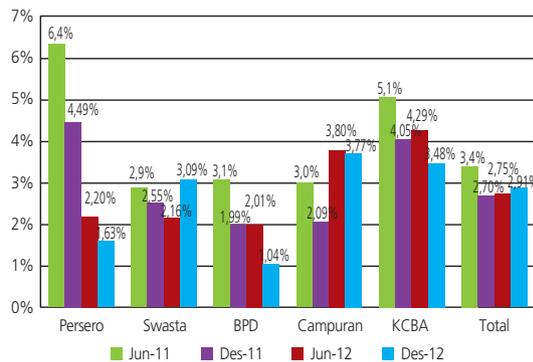
perbankan. Secara total, PDN² perbankan pada akhir tahun 2012 terindikasi sedikit meningkat, namun masih dalam level yang rendah yaitu hanya 3% dari 20% level maksimum yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan. Berdasarkan kelompok bank, Campuran dan KCBA mencatat eksposur risiko nilai tukar paling signifikan dengan PDN masing-masing mencapai 3,77% dan 3,48%. Bank Persero yang sempat mencatat PDN tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya semakin mengurangi eksposurnya.

Grafik 3.7
Stress Test Harga Obligasi Negara



Sumber: Bank Indonesia, diolah

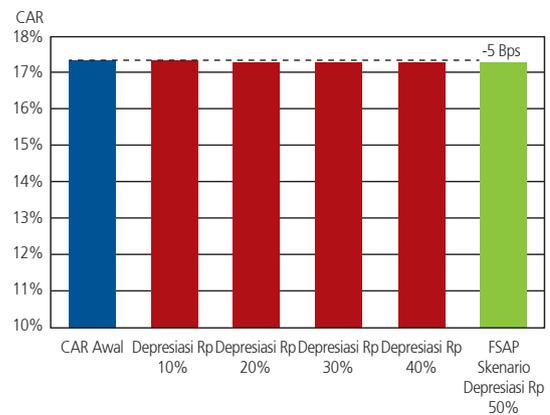
Grafik 3.8
Posisi Devisa Netto per Kelompok Bank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Pada *stress test* nilai tukar, Skenario FSAP yang digunakan yaitu pelemahan nilai tukar sebesar 50%. Dengan skenario tersebut, CAR perbankan hanya turun sebesar 5 bps menjadi 17,27% atau tidak signifikan berpengaruh terhadap ketahanan modal dikarenakan eksposur perbankan yang relatif kecil. Berdasarkan kelompok bank, KCBA dan Campuran berpotensi mengalami penurunan CAR paling signifikan yaitu masing-masing sebesar 35 bps dan 21 bps. Meski kedua kelompok bank tersebut mengalami penurunan paling signifikan, namun CAR masih tercatat tinggi yaitu masing-masing sebesar 30,54% dan 19,24%. Sementara itu, terdapat dua kelompok bank yang CAR-nya naik tipis dikarenakan kelompok bank tersebut mencatat posisi *long Valas*.

Grafik 3.9
Stress Test Nilai Tukar

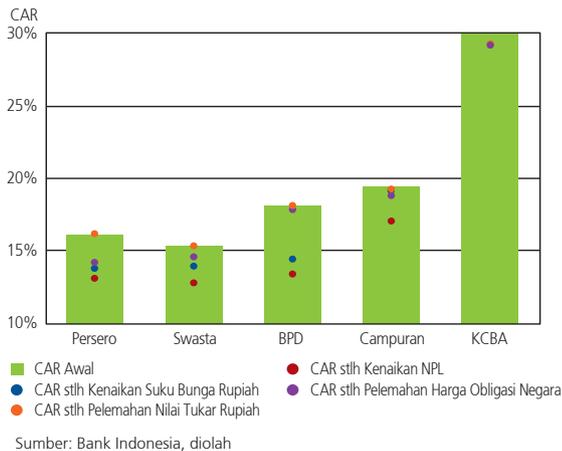


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Secara umum, masing-masing kelompok bank masih cukup mampu menyerap eksposur risiko Kredit dan risiko Pasar. Hal ini ditunjukkan oleh baiknya ketahanan CAR hingga semester II 2012. Namun demikian, perlu diwaspadai peningkatan eksposur risiko khususnya risiko Kredit, kenaikan suku bunga Rupiah dan penurunan harga obligasi negara pada bank Persero mengingat CAR-nya telah berada dalam kisaran yang sama dengan Swasta yang mencatat eksposur risiko lebih rendah.

2 PDN belum memperhitungkan posisi TD Valas perbankan

Grafik 3.10
Hasil Stress Test Kelompok Bank



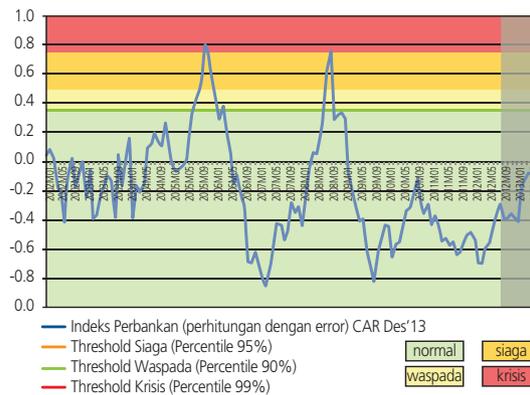
3.2.4 Tekanan terhadap Industri Perbankan

Stress test terhadap tekanan pada industri perbankan yang dicerminkan oleh Indeks Tekanan Perbankan (ITP) dilakukan dengan menggunakan skenario PDB yang turun sampai dengan 0% sepanjang tahun 2013. Hasil simulasi *stress test* ITP menunjukkan potensi tekanan pada tiga variabel pembentuk ITP dengan potensi tekanan terbesar terjadi pada risiko kredit, kemudian diikuti tekanan pada likuiditas dan tekanan pada profitabilitas perbankan. Sedangkan pada permodalan, tekanan tidak terlalu dirasakan.

Peningkatan risiko kredit terlihat dari peningkatan NPL dari 2,29% di akhir 2012 menjadi 5,39% pada akhir semester I 2013 atau meningkat 310 bps. Sementara itu, peningkatan tekanan likuiditas terjadi pada triwulan I 2013. Potensi tekanan terbesar pada likuiditas tercermin pada penurunan sebesar 154 bps pada Januari 2013 dibandingkan pada Desember 2012 dari -2,56% menjadi -4,10%. Akan tetapi potensi penurunan likuiditas masih berada di atas *threshold* waspada ITP, dimana *threshold* likuiditas waspada ITP adalah -6.85%. Sedangkan dari sisi profitabilitas, ROA berpotensi tertekan terutama pada bulan Maret 2013 dengan penurunan sebesar 42 bps. Sehingga total penurunan ROA sebesar 94 bps dari 3,08% di akhir 2012 menjadi 2,14% di akhir semester I 2013.

Dari tekanan beberapa variabel pembentuk ITP tersebut dan relatif stabilnya permodalan bank maka tekanan terhadap industri perbankan akan mengalami peningkatan yang tercermin dari semakin meningkatnya ITP pada semester I 2013. Namun demikian, peningkatan ITP ini masih dalam batas normal.

Grafik 3.11
Proyeksi Indeks Tekanan Perbankan Setelah Stress Test



Tabel 3.3
Heatmap ITP dan Indikator Pembentuk ITP

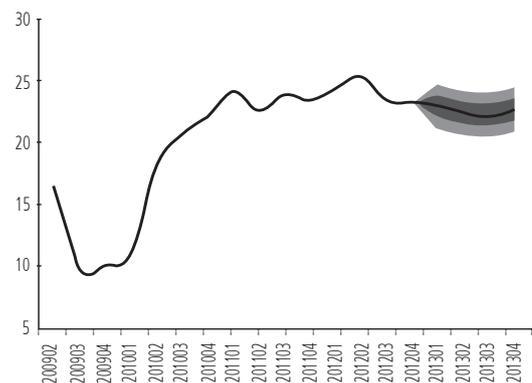
Parameter	Threshold	2012												2013					
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni
Indeks Tekanan Perbankan	0.35																		
	0.50	(0.80)	(0.77)	(0.60)	(0.56)	(0.44)	(0.37)	(0.29)	(0.40)	(0.39)	(0.35)	(0.39)	(0.46)	(0.18)	(0.11)	(0.08)	(0.08)	(0.00)	(0.03)
	0.75																		
NPL (%)	3.00																		
	5.00	2.79	2.78	2.79	2.76	2.71	2.49	2.52	2.57	2.44	2.50	2.38	2.29	3.01	3.51	4.00	4.48	4.49	5.39
	7.00																		
CAR (%)	13.00																		
	10.50	18.44	18.45	18.28	17.97	17.87	17.49	17.33	17.24	17.33	17.22	17.46	17.32	17.54	17.29	17.32	17.32	17.11	17.29
	8.00																		
ROA (%)	2.00																		
	1.00	2.94	2.83	3.05	2.98	3.05	3.16	3.07	3.04	3.06	3.06	3.06	3.08	2.84	2.74	2.32	2.29	2.20	2.14
	0.00																		
Alat Likuid (%)	-6.85																		
	-7.35	(0.13)	0.00	(1.10)	(1.17)	(2.32)	(3.08)	(3.60)	(2.39)	(2.66)	(2.89)	(2.79)	(2.56)	(4.10)	(3.94)	(3.31)	(2.85)	(2.87)	(2.24)
	-9.85																		

*tahun 2013 menggunakan skenario Penurunan PDB 0%

3.3 PROSPEK KETAHANAN PERBANKAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

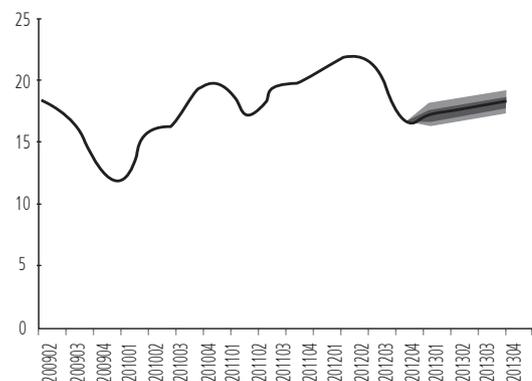
Dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2013 yang masih tinggi, terjaganya beberapa indikator makroekonomi yang tetap baik serta beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi, perbankan diperkirakan akan masih tumbuh cukup tinggi dengan ketahanan yang masih tetap terjaga. Pertumbuhan kredit sampai dengan akhir semester I 2013 diperkirakan akan berada pada kisaran 21,5% - 23,3%. Sedangkan pertumbuhan kredit sampai dengan akhir 2013 diperkirakan berkisar antara 21,8% - 23,6%. Sementara itu pertumbuhan DPK sampai dengan akhir semester I 2013 dan akhir 2013 masing-masing diperkirakan akan berada pada kisaran 16,3% -17,3% dan 17,0% - 18,0%. Kondisi makro yang tetap terjaga menyebabkan rasio NPL (gross) sampai dengan akhir semester I 2013 dan akhir 2013 masing-masing diperkirakan akan terus mengalami penurunan sampai pada kisaran 1,8% - 2,2% dan 1,6% - 2,0%.

Grafik 3.12
Pertumbuhan Kredit (%yoy)



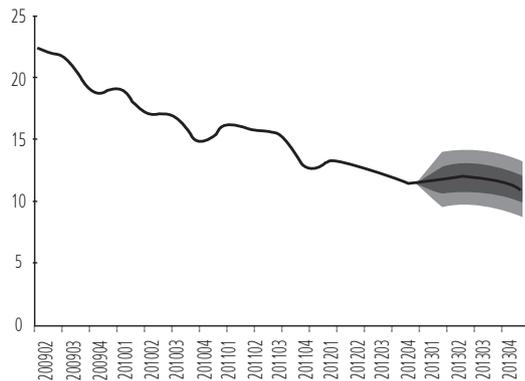
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.13
Pertumbuhan DPK (%yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.14
Perkembangan NPL (%)

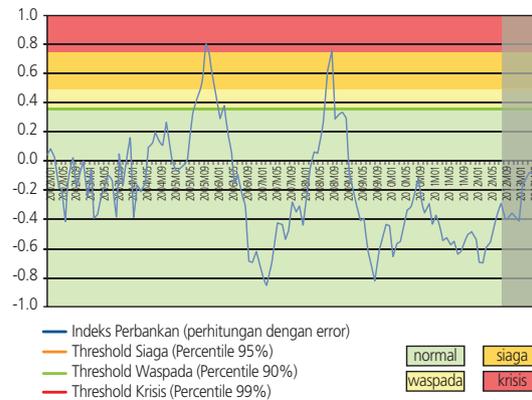


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Rendahnya ITP pada 2013 diperkirakan akan terus terjaga sampai dengan akhir semester I 2013. ITP masih dalam kondisi normal dan cenderung stabil. Kondisi ini didukung oleh peningkatan profitabilitas, permodalan dan penurunan risiko kredit akibat dari kondisi makroekonomi yang lebih baik. Sementara itu, alat likuid diperkirakan

akan sedikit mengalami penurunan namun dalam batas yang masih terkendali. Dengan mempertimbangkan masih rendahnya tekanan terhadap institusi perbankan dan masih tingginya pertumbuhan perbankan, stabilitas sistem keuangan Indonesia akan tetap terjaga pada semester I 2013.

Grafik 3.15
Proyeksi Indeks Tekanan Perbankan



— Indeks Perbankan (perhitungan dengan error)
 — Threshold Siaga (Percentile 95%)
 — Threshold Waspada (Percentile 90%)
 — Threshold Krisis (Percentile 99%)

normal siaga
waspada krisis

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Bab 4

Topik Khusus

halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 4 Topik Khusus

4.1. KERANGKA PENGAWASAN DAN PENGATURAN SHADOW BANKING

Shadow banking system didefinisikan sebagai sistem intermediasi kredit yang melibatkan aktivitas dan entitas di luar sistem perbankan reguler atau tradisional. Zoltan Pozsar, et. al. (2010)¹ mendefinisikan intermediasi kredit sebagai proses dimana bank merubah simpanan nasabah menjadi pinjaman. Lebih lanjut, intermediasi kredit melibatkan 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu: transformasi kredit, transformasi jangka waktu (*maturity*), dan transformasi likuiditas.

1. Transformasi kredit

Transformasi kredit mencakup aktivitas yang memungkinkan peningkatan kualitas kredit atas hutang yang diterbitkan oleh suatu lembaga intermediasi melalui penggunaan prioritas klaim. Sebagai contoh: simpanan, yang memiliki prioritas klaim utama (*senior*), memiliki kualitas kredit yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio pinjaman yang mendasarinya karena adanya ekuitas pada lembaga intermediasi yang bersangkutan. Transformasi kredit juga dapat dilakukan melalui mekanisme subordinasi pada efek beragun aset.

2. Transformasi jangka waktu

Transformasi jangka waktu mengacu kepada penggunaan instrumen jangka pendek untuk mendanai pinjaman/aset jangka panjang.

3. Transformasi likuiditas

Transformasi likuiditas mengacu pada penggunaan instrumen likuid untuk mendanai aset yang tidak likuid. Sebagai contoh, penerbitan efek likuid yang dijamin dengan kumpulan pinjaman yang tidak likuid.

Shadow banking dapat dilakukan oleh suatu entitas yang berperan sebagai lembaga intermediasi antara penyedia-akhir dana dan peminjam-akhir dana, dan dapat pula melibatkan beberapa entitas dan aktivitas yang membentuk suatu rantai intermediasi kredit.

Sistem perbankan tradisional dapat terkait dengan sistem *shadow banking* melalui beberapa cara. Rantai intermediasi kredit dapat terdiri dari satu atau lebih entitas yang berbentuk bank atau entitas yang disponsori bank. Bank juga dapat terekspos kepada sistem *shadow banking* melalui penyediaan dana, dan/atau pemberian fasilitas kredit pendukung kepada entitas *shadow banking*. Sementara dari sisi kewajiban, bank dapat memperoleh dana dari reksadana pasar uang atau *money market funds* (MMFs) yang menjanjikan Nilai Aktiva Bersih (NAB) konstan. Sebagai gambaran, dapat dilihat contoh kasus *shadow banking* di Cina (Box 4.1).

Belajar dari pengalaman krisis di AS tahun 2008, pengawasan dan pengaturan *shadow banking* yang relatif lemah dibandingkan dengan pengawasan dan pengaturan perbankan menyebabkan terjadinya arbitrase peraturan dan pengambilan risiko berlebihan di luar sistem perbankan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko secara luas di sistem keuangan. Oleh karena itu, *Financial Stability Board* (FSB) memandang perlunya langkah-langkah untuk

¹ Zoltan Pozsar, et. al., #Shadow Banking: . Federal Reserve Bank of New York Staff Reports No.458. 2010.

memperkuat pemantauan dan pengaturan aktivitas intermediasi kredit yang dilakukan oleh entitas *shadow banking*.

Pendekatan pemantauan yang diusulkan adalah pendekatan *macro perspective*, yaitu mengidentifikasi aktivitas/entitas *shadow banking* yang meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu melalui antara lain analisis data neraca arus dana, dan pendekatan *micro perspective* (Gambar 4.1).

Gambar 4.1.
Kerangka Pemantauan Shadow Banking



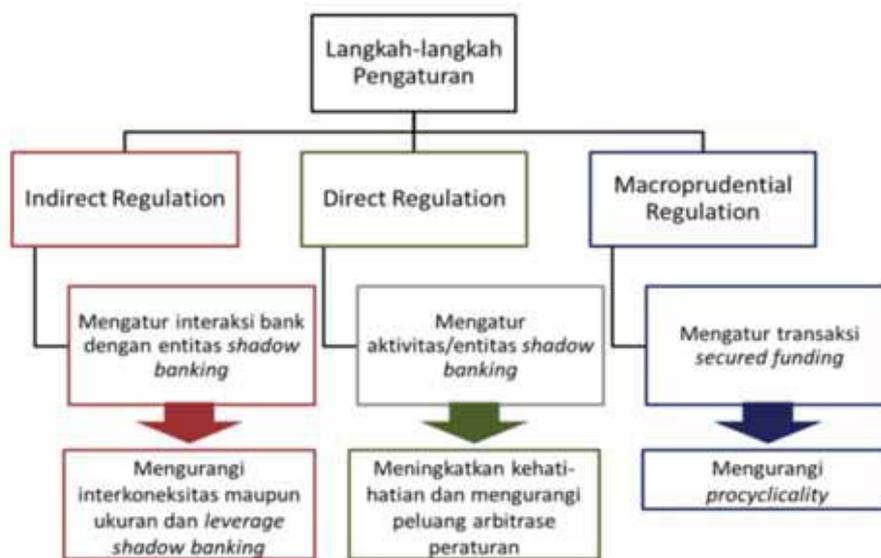
Pendekatan *micro perspective* mencakup beberapa kegiatan, yaitu: melakukan analisis atas aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan risiko sistemik (transformasi jangka waktu/likuiditas, transfer risiko kredit yang tidak

sempurna, dan *leverage*), mengidentifikasi kemungkinan arbitrase peraturan, serta menilai potensi spill over pada sistem keuangan. Potensi spill over dapat dilihat antara lain dari ukuran serta keterkaitan antara entitas/aktivitas *shadow banking* dan bank.

FSB selanjutnya mengusulkan langkah-langkah pengaturan (Gambar 4.2) yang secara garis besar mencakup: 1. pengaturan tidak langsung, dengan mengatur interaksi bank dengan entitas *shadow banking*; 2. pengaturan langsung terhadap aktivitas/entitas *shadow banking*; dan 3. pengaturan yang bersifat macroprudential, yang dititikberatkan kepada langkah-langkah untuk mengurangi *procyclicality* di pasar *secured funding*.

Bank Indonesia telah menerapkan beberapa aturan yang dapat membatasi interaksi sistem perbankan dengan sistem *shadow banking*, antara lain aturan yang mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dan membatasi penyediaan dana kepada pihak terkait dan bukan pihak terkait. Untuk lebih memperkuat langkah-langkah pengaturan interaksi bank dengan *shadow bank*, FSB antara lain mengusulkan penguatan persyaratan modal bagi entitas/aktivitas *shadow banking* di luar aktivitas sekuritisasi.

Gambar 4.2.
Kerangka Pengaturan Shadow Banking



Boks 4.1 Bentuk *shadow banking* di Cina

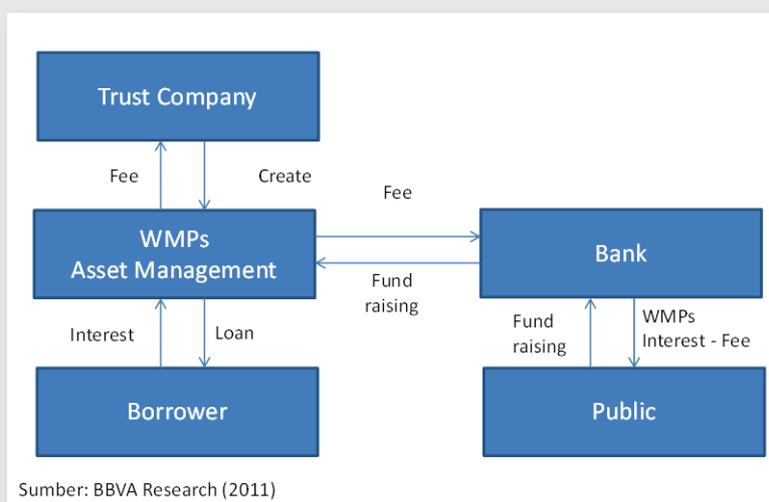
Menurut Wall Street Journal Asia (2011)², merupakan hal yang umum bagi bank-bank di Cina untuk memindahkan sebagian portfolio pinjaman dari pembukuan mereka dengan jalan mengemas pinjaman-pinjaman tersebut menjadi *wealth management products* (WMPs). Menurut BBVA (2011)³, WMPs merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh lembaga *trustee*. Lebih dari 90% surat hutang yang diterbitkan memiliki jangka waktu kurang dari enam bulan. *Trust companies* menerbitkan WMPs kepada nasabah melalui bank dan selanjutnya menggunakan dana yang diperoleh untuk membeli kredit-kredit bank komersil.

Nasabah bank tertarik berinvestasi melalui WMPs karena tawaran imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga simpanan. Di sisi lain, bank memperoleh pendapatan berbasis komisi. Menurut Wall Street Journal Asia (2011), ekspansi kredit

informal didorong oleh potensi perolehan pendapatan berbasis komisi bank-bank di Cina, yang secara historis mengandalkan pinjaman untuk memperoleh pendapatan bunga. Sebagian besar bank-bank publik Cina melaporkan pertumbuhan pendapatan berbasis komisi sebesar 30% pada kuartal kedua 2011, yang mendorong pencapaian laba keseluruhan mencapai rekor tertinggi.

Menurut riset HSBC (2011)⁴, meskipun di dalam perjanjian disebutkan bahwa risiko investasi ditanggung oleh investor, bank tetap terekspos kepada risiko kredit dan *maturity mismatch* dari WMPs. HSBC memperkirakan bank-bank di Cina, terutama bank-bank besar, akan mengambil alih kerugian untuk menjaga reputasi dan basis nasabah mereka berdasarkan pengalaman krisis *minibonds* Lehman yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2008.

Grafik Boks 4.1.1
Model operasional bisnis *bank-trust*



2 Lingling Wei, et.al.. China Moves to Support Small Firms. Wall Street Journal Asia. 2011.

3 Alicia Garcia Herrero, et.al.. China's Shadow Bank Lending: A Threat to Financial Stability. BBVA Research.

4 Yi Hu, et.al.. Shadow Banking Conundrum. HSBC Global Research. 2011.

4.2. PENGUATAN INFRASTRUKTUR SISTEM KEUANGAN

Terselenggaranya sistem pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan merupakan faktor penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan moneter serta memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

Selama semester II 2012 keandalan infrastruktur sistem keuangan tetap terpelihara dengan baik sehingga dapat mendukung aktivitas di sistem keuangan dan perekonomian. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan sistem pembayaran selama semester II 2012 yang berjalan dengan aman dan lancar. Selain itu tingkat ketersediaan (*availability*) sistem pembayaran sebagai ukuran kinerja sistem pembayaran memenuhi *service level* yang telah ditetapkan. Kinerja sistem pembayaran untuk mendukung stabilitas keuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk memitigasi risiko sistem pembayaran dan setelmen yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, seperti Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) serta sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh pihak selain Bank Indonesia seperti Kartu ATM, Kartu ATM/Debet, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik. Upaya mitigasi risiko dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan dan ketentuan di bidang sistem pembayaran, pengembangan sistem pembayaran, dan penyempurnaan prosedur operasional.

4.2.1. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagai Infrastruktur Sistem Keuangan

a. Upaya Mitigasi Risiko dan Manajemen Likuiditas

1) Sistem BI-RTGS

Aktivitas operasional Sistem BI-RTGS secara umum selama semester II 2012 berjalan dengan aman dan lancar. Sama seperti semester sebelumnya, gangguan pada

jaringan komunikasi data merupakan gangguan yang umum terjadi, khususnya pada bulan September 2012. Namun demikian risiko operasional yang disebabkan oleh gangguan tersebut telah dimitigasi dengan adanya *Business Continuity Plan* (BCP)/*Disaster Recovery Plan* (DRP). Selain itu, Bank Indonesia menyediakan fasilitas Guest Bank untuk bank peserta BI-RTGS yang karena mengalami gangguan teknis tidak dapat mengirimkan data transaksinya ke RTGS *Central Computer* (RCC). Terkait dengan kesinambungan dan kesiapan *back-up system* tersebut, telah dilakukan uji coba secara berkala terhadap *back-up system*. Selain itu, dalam upaya mengatasi gangguan pada jaringan komunikasi telah dilakukan pengkinian sistem jaringan komunikasi data yang semula *System Network Architecture* (SNA) menjadi *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Beralihnya sistem jaringan komunikasi data tersebut sejalan dengan trend pertumbuhan jumlah transaksi yang sangat tinggi, sehingga diperlukan teknologi yang mampu menampung kapasitas yang lebih besar, mengingat teknologi SNA hanya mempunyai kapasitas 64kb dan saat ini sudah tidak terdapat dukungan terkait aspek teknis.

Terkait dengan manajemen likuiditas, selama semester II 2012 kondisi likuiditas pada Sistem BI-RTGS dapat dikatakan dapat terjaga dengan baik yang tercermin dari indikator *turn over ratio*^[5], jumlah transaksi yang *queue*, transaksi *unsettled*, *throughput guideline*^[6] dan FLI. Indikator *turn over ratio* selama semester II 2012 secara rata-rata adalah 1,01. Jumlah transaksi yang mengalami antrian (*queuing*) selama semester II 2012 adalah sebanyak 1.851 dengan total nilai sebesar Rp18,4 triliun. Walaupun terdapat transaksi yang mengalami antrian namun pada

[5] Turn over ratio merupakan perbandingan antara outgoing transaction yang diselesaikan melalui saldo rekening bank yang disediakan pada awal hari. Rasio turn over tinggi dapat diartikan bahwa bank lebih banyak membayar kewajibannya dengan menunggu incoming transfer dari bank lain dari pada menggunakan modalnya sendiri, sehingga perilaku transaksi tercermin pada rasio turn over yang semakin tinggi.

[6] Throughput guideline adalah suatu target dimana Peserta diharapkan telah menyelesaikan persentase tertentu dari total pembayaran selama 1 hari dengan mengacu pada graduated payment schedule < 10.30 WIB ; 10.30 s/d 14.30 WIB ; 14.30 s/d 16.30 diharapkan 30% : 30% : 40%

akhir hari seluruh transaksi dapat diselesaikan (*settled*). Selanjutnya pola transaksi berdasarkan *throughput* yang terjadi selama semester II 2012 menunjukkan pola 43%: 19%: 38%. Berdasarkan pola distribusi tersebut, dapat dikatakan bahwa transaksi yang diselesaikan pada waktu-waktu tertentu oleh para peserta sudah sesuai dengan *throughput guideline*. Dengan demikian semester II 2012 tidak terjadi penumpukan transaksi pada akhir hari sehingga potensi risiko terjadinya *gridlock* yang dapat mengganggu kelancaran sistem pembayaran dapat diminimalisir.

Selain itu, selama semester II 2012 terdapat tidak terdapat bank yang memanfaatkan fasilitas likuiditas intrahari Sistem BI-RTGS (FLI-RTGS), sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi likuiditas peserta BI-RTGS tetap terjaga. Penyediaan FLI merupakan upaya mitigasi risiko yang disediakan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan sementara yang dihadapi oleh bank peserta BI-RTGS yang terjadi selama jam operasional agar tidak terjadi kemacetan pembayaran (*gridlock*).

2) BI-SSSS

Aktivitas operasional Sistem BI-SSSS selama semester II 2012 berjalan dengan aman dan lancar. Terjaganya ketersediaan Sistem BI-SSSS selama semester II 2012 tidak terlepas dari keandalan sistem utama BI-SSSS dan tersedianya infrastruktur *back up system* yang dapat menggantikan setiap saat bila terjadi gangguan pada sistem utama. Dengan pengkinian jaringan komunikasi dari SNA menjadi TCP/IP maka gangguan teknis pada BI-SSSS terkait jaringan komunikasi dapat lebih termitigasi.

3) SKNBI

Secara umum, operasional penyelenggaraan SKNBI selama 2012 berjalan baik dan lancar yang ditunjukkan dengan tidak adanya *system down*. Meski secara harian terdapat beberapa kasus perpanjangan waktu yang diakibatkan permasalahan teknis, namun hal tersebut

tidak mengganggu penyelenggaraan SKNBI secara keseluruhan. Untuk menjaga kelancaran operasional SKNBI, Bank Indonesia juga memiliki prosedur *contingency* yang didukung dengan infrastruktur *back-up* yang andal.

Likuiditas peserta SKNBI selama semester II 2012 secara umum juga dapat terjaga dilihat dari beberapa indikator antara lain, pemenuhan kewajiban penyediaan *prefund*, penggunaan *prefund*, *top up prefund* dan transaksi yang tidak dapat diperhitungkan. Sepanjang semester II 2012, tidak ada bank yang mengalami ketidakmampuan memenuhi penyediaan *prefund* di awal hari sebagai syarat untuk dapat mengikuti kliring harian.

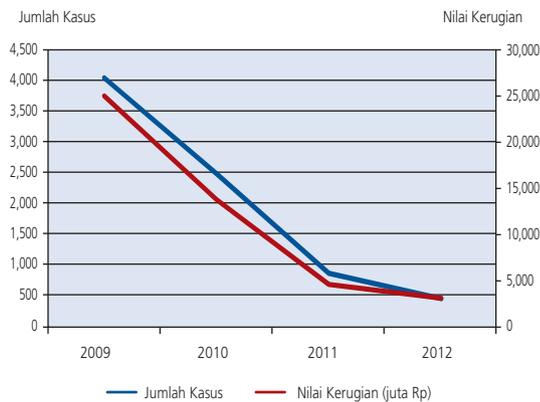
Total *prefund* Kliring Debet dan Kliring Kredit yang disediakan peserta selama tahun 2012 mencapai Rp2.200,85 triliun dengan total nilai transaksi sampai dengan Desember 2012 sebesar Rp1.121,21 triliun. Dengan demikian rata-rata penggunaan *prefund* sepanjang tahun 2012 adalah 50,95%. Hal ini menunjukkan bahwa *prefund* yang tersedia masih jauh lebih besar dari kewajiban yang harus dipenuhi peserta.

4) Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Sebagai instrumen pembayaran non tunai yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, penggunaan APMK yang terdiri dari Kartu ATM, Kartu ATM/Debet, dan Kartu Kredit terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini tercermin dari relatif tingginya rata-rata perkembangan nilai transaksi pembayaran yang menggunakan APMK selama 4 tahun terakhir, yaitu sebesar 18,93%. Namun demikian di tengah pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut, sering terjadi keluhan dan pengaduan masyarakat terkait dengan dengan *fraud* yang terjadi, khususnya *fraud* dengan modus pemalsuan kartu. Pada 2009 sebelum teknologi *chip* digunakan pada Kartu Kredit, tingkat *fraud* dengan modus pemalsuan kartu relatif tinggi. Sejak implementasi teknologi *chip* untuk Kartu Kredit pada 2010 tingkat *fraud*

pemalsuan kartu mengalami penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu sebagaimana tabel dan grafik berikut.

Grafik 4.1
Perkembangan *Fraud* Pemalsuan Kartu Kredit Sebelum dan Sesudah Penggunaan Teknologi *Chip*



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Menurunnya tingkat *fraud* tersebut berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai. Berkaca dari keberhasilan menurunkan jumlah *fraud* melalui penggunaan teknologi chip pada Kartu Kredit, Bank Indonesia menempuh kebijakan penggunaan teknologi *chip* pada Kartu ATM/Debet mengingat pesatnya pertumbuhan jumlah Kartu ATM/Debet yang mencapai 76,99 juta kartu sampai dengan akhir 2012.

Penggunaan teknologi chip untuk Kartu ATM/Debet mengacu pada standar yang telah disepakati oleh industri. Mengingat besarnya jumlah Kartu ATM/Debet beredar dan perlunya investasi industri untuk migrasi ke teknologi *chip*, maka implementasi penggunaan teknologi *chip* pada Kartu ATM/Debet dilakukan secara bertahap dengan batas waktu implementasi secara keseluruhan adalah pada 31 Desember 2015.

b. Perkembangan Transaksi Melalui Sistem Pembayaran

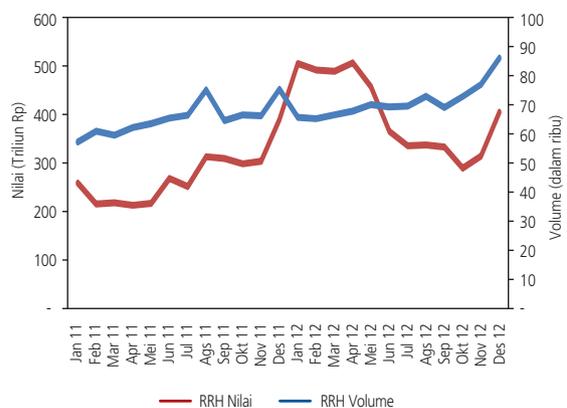
Aktivitas transaksi keuangan melalui sistem pembayaran selama semester II 2012 mengalami peningkatan baik dari sisi volume maupun nilai.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-o-y), peningkatan dari sisi nilai dan volume masing-masing adalah 23,31% dan 8,55%. Dari sisi nilai, transaksi keuangan melalui sistem pembayaran non tunai masih didominasi oleh transaksi yang melalui Sistem BI-RTGS, dengan porsi mencapai 74,79% dari keseluruhan nilai transaksi keuangan yang melalui sistem pembayaran. Selanjutnya transaksi BI-SSSS dengan porsi 21,05%, dan SKNBI dengan porsi 2,62%. Sementara itu, dari sisi volume transaksi, porsi terbesar masih berasal dari penggunaan Kartu ATM dan ATM/Debet, yang mencapai 84,78% dari seluruh volume transaksi sistem pembayaran non-tunai.

1) Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS

Aktivitas transaksi pembayaran melalui Sistem BI-RTGS selama semester II 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.2). Selama semester II 2012, rata-rata harian nilai dan volume transaksi Sistem BI-RTGS sebesar Rp336,28 triliun dan 74.961 transaksi dengan total nilai dan volume transaksi selama semester II 2012 mencapai Rp40.453,44 triliun dan 9,03 juta transaksi. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) baik dari sisi nilai dan volume, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 4,92% dan 5,21%.

Grafik 4.2
Perkembangan Transaksi Sistem BI-RTGS

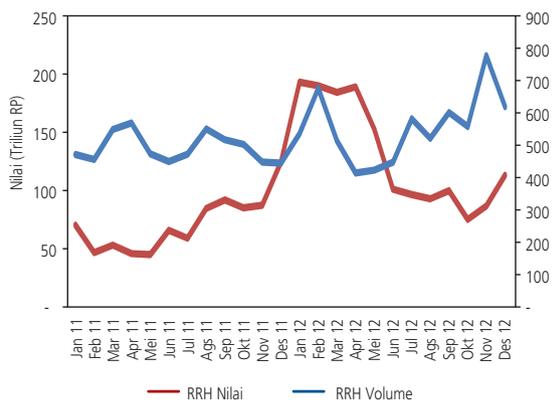


Sumber: Bank Indonesia, diolah

2) Perkembangan Transaksi BI-SSSS

Transaksi melalui BI-SSSS pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 4.3). Nilai transaksi melalui BI-SSSS pada tahun 2012 mencapai 32,50 ribu triliun atau meningkat sebesar 81,99% dengan volume transaksi tercatat sebanyak 137,16 ribu transaksi atau meningkat sebesar 12,27% dibandingkan dengan tahun 2011. Dengan demikian rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui Sistem BI-SSSS tahun 2012 mencapai nilai 131,89 triliun dengan volume sebesar 558 transaksi.

Grafik 4.3
Perkembangan Transaksi BI-SSSS

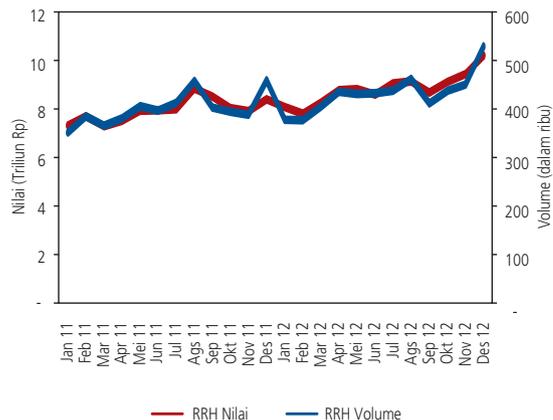


Sumber: Bank Indonesia, diolah

3) Perkembangan Transaksi SKNBI

Aktivitas transaksi pembayaran melalui SKNBI selama semester II 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.4). Selain itu, rata-rata harian nilai dan volume transaksi SKNBI sebesar Rp9,29 triliun dan 455,32 ribu transaksi dengan total nilai dan volume transaksi selama semester II 2012 mencapai Rp1.121,21 triliun dan 54,87 juta transaksi. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) baik dari sisi nilai dan volume, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 8,40% dan 4,74%.

Grafik 4.4
Perkembangan Transaksi SKNBI

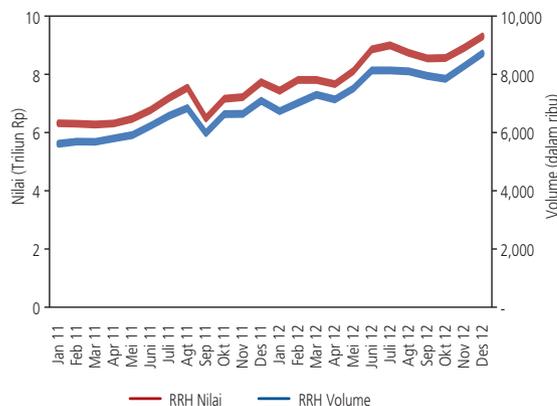


Sumber: Bank Indonesia, diolah

4) Perkembangan Transaksi Menggunakan Kartu ATM dan ATM/Debet

Aktivitas transaksi pembayaran menggunakan Kartu ATM dan ATM/Debet selama semester II 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.5). Selama semester II 2012, rata-rata harian nilai dan volume transaksi Kartu ATM dan ATM/Debet sebesar Rp8,82 triliun dan 8,15 jt transaksi dengan total nilai dan volume transaksi selama semester II 2012 mencapai Rp1.623,78 triliun dan 1,5 miliar transaksi. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) baik dari sisi nilai dan volume, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 22,69% dan 23,44%.

Grafik 4.5
Perkembangan Transaksi Kartu ATM/Debet

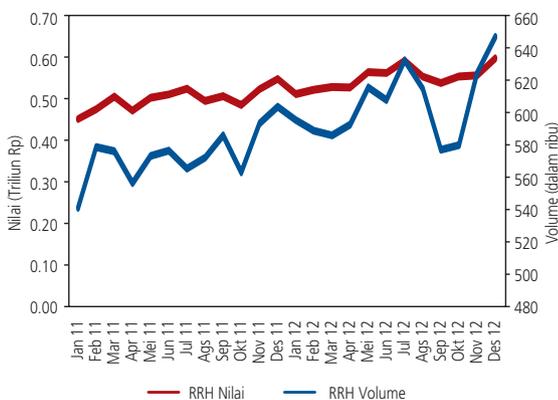


Sumber: Bank Indonesia, diolah

5) Perkembangan Transaksi Menggunakan Kartu Kredit

Aktivitas transaksi pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit selama semester II 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.6). Selama semester II 2012, rata-rata harian nilai dan volume menggunakan Kartu Kredit sebesar Rp566,06 miliar dan 612,77 ribu transaksi dengan total nilai dan volume transaksi selama semester II 2012 mencapai Rp104,19 triliun dan 112,77 juta transaksi. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) baik dari sisi nilai dan volume, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 10,15% dan 5,6%.

Grafik 4.6
Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



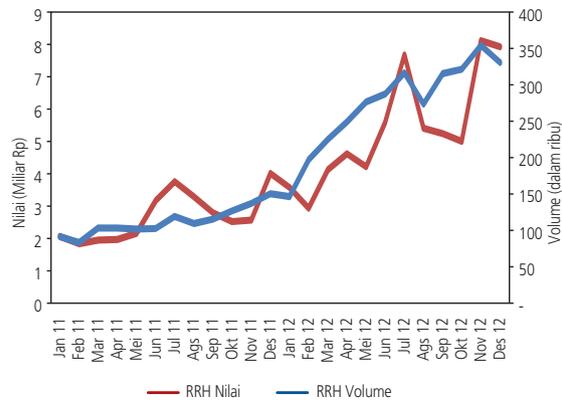
Sumber: Bank Indonesia, diolah

6) Perkembangan Transaksi Menggunakan Uang Elektronik

Aktivitas transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik selama semester II 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.7). Selama semester II 2012, rata-rata harian nilai dan volume transaksi menggunakan Uang Elektronik sebesar Rp6,57 miliar dan 318,98 ribu transaksi dengan total nilai dan volume transaksi selama semester II 2012 mencapai Rp1,21 triliun dan 58,66 juta transaksi. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (y-o-y) baik dari sisi nilai dan

volume, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 107,21% dan 151,73%.

Grafik 4.7
Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.2.2. Pengembangan Sistem Pembayaran untuk Memperkuat Infrastruktur Sistem Keuangan

Terpeliharanya keandalan dan keamanan sistem pembayaran tidak terlepas dari upaya untuk memitigasi risiko sistem pembayaran dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan dan moneter. Dalam kaitan ini, fokus utama kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran diarahkan untuk menjaga keamanan, meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, dan mendukung perluasan akses sistem pembayaran. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan agar penyelenggaraan sistem pembayaran di Indonesia memperhatikan aspek perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran.

Kebijakan dimaksud antara lain dilakukan melalui pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II dalam upaya menerapkan *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs), tahapan pengembangan gerbang pembayaran nasional (*National Payment Gateway*), perluasan akses BPR dalam sistem pembayaran, dan penyempurnaan ketentuan untuk lebih meningkatkan penerapan aspek perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran.

a. Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

Dalam rangka meningkatkan performa layanan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sebagai financial market infrastructures (FMI) yang telah memainkan peranan penting dalam sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, Bank Indonesia melakukan pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II yang telah mengacu pada *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMIs).

Latar belakang pengembangan tersebut antara lain prospek pertumbuhan transaksi di pasar keuangan Indonesia dan transaksi ekonomi lainnya di masa depan yang sangat signifikan, sehingga menuntut operasionalisasi infrastruktur sistem pembayaran dengan kapasitas pemrosesan yang dapat terus ditingkatkan. Selain itu, tren penyelenggaraan FMI di beberapa negara adalah telah menggunakan standar internasional yang bertujuan menyelenggarakan FMI domestik yang semakin efisien dan aman. Hal ini penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan, serta memfasilitasi integrasi dengan pasar keuangan di negara lainnya, baik integrasi pada level regional seperti MEA maupun global.

Sistem BI-RTGS Generasi II dilengkapi dengan fasilitas *gridlock detection* dan *resolution* yang lebih andal, yang dapat mendeteksi dan mencegah risiko sistemik, yang dapat terjadi karena adanya transaksi pembayaran yang belum dapat diselesaikan karena saldo rekening giro peserta tidak mencukupi.

Dengan fitur baru tersebut, Sistem BI-RTGS Generasi II akan dapat mengefisienkan penggunaan likuiditas untuk setelmen dan memiliki pilihan perangkat mitigasi risiko sistemik yang semakin lengkap, serta memiliki ketahanan (*resilience*) yang semakin tinggi terhadap *liquidity shock*.⁷

⁷ Terjadinya *Liquidity shock* pada Sistem BI-RTGS disebabkan oleh adanya *liquidity shock* pada level perekonomian negara sebagai akibat dari kondisi pasar keuangan/perekonomian negara lain.

BI-SSSS Generasi II adalah FMI untuk sarana setelmen dan penatausahaan SBN, instrumen operasi moneter Bank Indonesia serta instrumen keuangan lainnya. Seperti halnya Sistem BI-RTGS Generasi II, BI-SSSS Generasi II juga memiliki fitur fasilitas *gridlock detection* dan *resolution* guna meningkatkan kapabilitas BI-SSSS dalam memitigasi risiko sistemik. Selain itu terdapat modul *collateral management*⁸ untuk memitigasi risiko kredit dan risiko pasar surat berharga yang digunakan sebagai collateral dalam transaksi antara dua pihak.

Selanjutnya PFMIs juga akan diterapkan pada penyelenggaraan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II pada saat implementasi nantinya.

b. Tahapan Pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway)

Interkoneksi sistem pembayaran ritel menjadi cita-cita bersama Bank Indonesia dan para pengguna layanan jasa sistem pembayaran di Indonesia. Inisiatif untuk mewujudkan interkoneksi diperkenalkan melalui *National Payment Gateway*. Bank Indonesia dan pelaku industri sistem pembayaran nasional telah memiliki kesepakatan bahwa terdapat kebutuhan masyarakat untuk menggunakan jasa sistem pembayaran ritel secara lebih efisien.

Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, perlu diupayakan untuk mengembangkan suatu sistem yang dapat menghubungkan antar penyelenggara sistem pembayaran. Sementara itu, kondisi saat ini penyelenggara jasa sistem pembayaran ritel masih mengembangkan sistem masing-masing dan belum saling terhubung satu sama lain.

⁸ Memiliki fungsi-fungsi:

- *price monitoring* (monitoring harga-harga surat berharga terkini);
- *pledge evaluation* (re-kalkulasi jaminan/collateral berdasarkan harga pasar terkini);
- *margin calls*, baik notifikasi otomatis untuk meminta pemberi jaminan (*collateral giver*) menambah surat berharga/uang karena penurunan harga pasar surat berharga yang digunakan sebagai collateral maupun untuk meminta penerima jaminan (*collateral taker*) *me-release* surat berharga kepada *collateral giver* karena kenaikan harga pasar collateral.

Dalam rangka mewujudkan interkoneksi secara nasional diawali dengan upaya mendorong dua bank yang selama ini mendominasi transaksi pembayaran ritel yaitu Bank Mandiri dan BCA. Dengan interkoneksi tersebut, nasabah pemegang kartu ATM Bank Mandiri dapat menggunakan kartunya di ATM BCA atau sebaliknya untuk fitur informasi saldo, tarik tunai dan transfer. Kerja sama ini sangat mendukung upaya perluasan akses layanan ATM di kedua bank tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya *trend* peningkatan transaksi antar kedua bank tersebut melalui ATM.

Manfaat interkoneksi dua bank tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada industri penyelenggara jasa sistem pembayaran ritel, khususnya dalam membangun kesadaran dan kebutuhan adanya interkoneksi layanan. Hal tersebut dapat mendorong terwujudnya NPG yang tidak hanya mengkoneksikan penyelenggaraan ATM, namun dapat mengkoneksikan penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang elektronik.

Manfaat lain yang diperoleh dari interkoneksi adalah optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang disediakan industri perbankan. Dengan saling interkoneksi, bank tidak perlu lagi menyediakan infrastruktur berupa mesin ATM dan EDC di suatu tempat yang sama. Selain itu, penyelenggara sistem pembayaran dapat menempatkan infrastruktur secara lebih merata sehingga dapat meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran non tunai oleh masyarakat dapat lebih luas. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mengharapkan peran industri untuk mendistribusikan infrastruktur yang dimiliki sampai ke lokasi yang terpencil.

Melalui NPG diharapkan arus informasi transfer dana dapat lebih terpantau, sehingga Bank Indonesia akan mudah mengontrol pergerakan dana baik domestik maupun antarnegara. Selain itu, NPG juga dapat digunakan untuk memantau kondisi likuiditas industri sistem pembayaran,

sehingga melalui NPG tersebut bank sentral dapat melakukan pendeteksian dini dalam rangka mendukung stabilitas industri sistem pembayaran nasional.

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengembangan NPG yaitu menyusun kajian aspek hukum mengenai lembaga yang berwenang menyelenggarakan NPG. Dari hasil kajian, diperoleh kesimpulan bahwa secara ketentuan Bank Indonesia dapat bertindak sebagai penyelenggara NPG karena kegiatan NPG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan kliring dan penyelesaian akhir. Di samping itu, telah dilakukan kajian kebijakan NPG yang antara lain meliputi aspek keanggotaan, cakupan penyelenggaraan, mekanisme kliring dan setelmen. Selanjutnya guna memperoleh masukan dari industri terkait dengan pengembangan NPG, Bank Indonesia melakukan diskusi dengan industri yang diwakili oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) serta beberapa bank terkait.

c. Implementasi Sistem Transfer Kredit Elektronik (STKE) untuk BPR di Wilayah Jawa Timur

Dalam upaya meningkatkan perluasan akses dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia turut aktif dalam pengembangan sistem transfer kredit elektronik (STKE). Akses BPR dalam sistem pembayaran semakin luas karena 18 BPR di wilayah Jawa Timur, baik untuk kepentingan BPR sendiri maupun nasabahnya telah dapat memanfaatkan layanan sistem pembayaran yang cepat dan aman dengan biaya relatif murah melalui sistem transfer kredit elektronik (STKE). STKE dikembangkan oleh Bank Jatim sebagai bank pengayom BPR (APEX BPR) di wilayah Jawa Timur bekerjasama dengan Bank Indonesia.

STKE merupakan suatu sistem yang digunakan dalam penyelenggaraan transfer dana antar anggota APEX BPR dan/atau dengan bank umum melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sebagai infrastruktur

sistem pembayaran, STKE banyak memberikan manfaat baik bagi BPR, nasabah BPR, maupun Bank Jatim sebagai penyelenggara STKE tersebut. Bagi BPR, STKE dapat meningkatkan loyalitas nasabah BPR dan meningkatkan daya saing BPR dengan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan *fee based income* BPR. Bagi nasabah BPR, STKE dapat memberikan layanan transfer dana yang cepat, aman, dan efisien, sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi. Bagi Bank Jatim sendiri, penyelenggaraan STKE dapat meningkatkan peran Bank Jatim sebagai APEX BPR dan memperkuat Bank Jatim sebagai BPD *Regional Champion*.

Faktor utama pengembangan STKE oleh Bank Jatim didasarkan pada pertimbangan adanya kebutuhan untuk melakukan kegiatan transfer dana baik oleh BPR maupun nasabahnya. Sebelum adanya STKE, untuk mengakomodir kegiatan transfer dana, BPR harus membuka rekening di beberapa bank umum. Dengan implementasi STKE, kegiatan transfer dana di BPR menjadi lebih efisien karena BPR tidak perlu lagi membuka rekening di beberapa bank umum untuk keperluan transfer dana tersebut, namun cukup pada satu Bank penyelenggara STKE. Layanan yang diberikan STKE antara lain berupa transfer dana antar-nasabah BPR peserta, transfer dana dari nasabah BPR peserta ke nasabah bank umum dan sebaliknya. Dengan cakupan layanan yang lebih luas, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi BPR dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Sebagai *pilot project*, 18 BPR di wilayah Jawa Timur telah siap untuk turut serta dalam penyelenggaraan STKE. Dengan adanya sinergi BPR dan Bank Jatim diharapkan perluasan layanan keuangan dapat ditingkatkan sampai pada wilayah dimana masyarakatnya belum terlayani oleh jasa perbankan. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung kebijakan Bank Indonesia terkait *financial inclusion* yang pada ujungnya akan mempercepat terwujudnya akses

yang mudah bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menikmati layanan perbankan.

d. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Prinsip Kehati-hatian dalam Upaya Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran selalu mengedepankan aspek perlindungan konsumen dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat pengguna jasa sistem pembayaran. Sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan aspek kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap instrumen APMK, pada tahun 2012 Bank Indonesia telah menyempurnakan kebijakan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang diformalkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.14/17/DASP tanggal 7 Juni 2012. Selain itu Bank Indonesia juga telah menerbitkan SEBI No.14/34/DASP tanggal 27 November 2012 perihal Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit.

Secara garis besar penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan APMK yang terkait dengan upaya meningkatkan perlindungan konsumen adalah :

1) Penyampaian Informasi

Pengaturan sebelumnya yang telah memuat kewajiban penyampaian informasi mengenai prosedur penggunaan kartu, hak dan kewajiban pemegang kartu, mekanisme penyampaian keluhan, risiko penggunaan kartu dan biaya yang dikenakan, disempurnakan dengan adanya kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme penutupan kartu, rincian transaksi tahunan, informasi kurs untuk transaksi di luar negeri dan kualitas kredit bagi pemegang kartu kredit.

Tata cara penyampaian informasi ini pun dirinci, termasuk dimuatnya pengaturan mengenai tata cara dan waktu penyampaian rincian tagihan untuk pemegang kartu kredit. Dengan bertambahnya cakupan informasi yang harus disampaikan ini diharapkan pemegang kartu menjadi lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan kartunya.

2) Penyeragaman Pola Penghitungan Tagihan Kartu Kredit

Langkah penyeragaman yang dilakukan adalah dengan menentukan bahwa penghitungan bunga dimulai sejak tanggal posting transaksi, bukan tanggal transaksi dilakukan. Tanggal posting adalah tanggal dimana penerbit kartu kredit benar-benar melakukan pembayaran atau penalangan dana kepada acquirer atas transaksi yang telah dilakukan oleh pemegang kartu. Selain itu penyeragaman juga dilakukan dengan membatasi pengenaan bunga hanya terhadap sisa (*outstanding*) tagihan kartu kredit yang belum dibayar dan ditambah dengan penegasan bahwa biaya, denda dan bunga terutang dilarang untuk dikenakan bunga lagi, sehingga pola penghitungan tagihan *‘bunga berbunga’* resmi tidak dapat dilakukan lagi.

3) Etika Penagihan Kartu Kredit

Secara umum penyempurnaan ketentuan APMK menambahkan dan menegaskan beberapa unsur baru yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penagihan, antara lain bahwa penagihan hanya dapat dilakukan di alamat penagihan dan dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat. Penagihan dilarang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, tidak boleh dilakukan dengan menggunakan tekanan, serta dilarang dilakukan kepada pihak lain yang bukan merupakan pemegang yang bersangkutan. Khusus untuk penagihan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga,

terdapat beberapa tambahan pengaturan lainnya, yaitu penagihan oleh pihak ketiga ini hanya dapat dilakukan bila kualitas kredit sudah masuk kategori *‘macet’*, kerjasama wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai alih daya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa kualitas penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sama dengan jika penagihan dilakukan oleh penerbit sendiri.

4) *Transaction Alert*

Untuk melindungi pemegang kartu kredit yang sah dari transaksi yang tidak dilakukannya, penyempurnaan ketentuan APMK selain mewajibkan penggunaan PIN enam digit, juga mewajibkan penyampaian *transaction alert* setelah terdapat transaksi yang memenuhi kondisi tertentu. *Transaction alert* ini disampaikan melalui *short message service* (SMS) atau sarana lainnya yang dipilih oleh pemegang kartu. Apa isi dari *transaction alert* ini? Pada prinsipnya *transaction alert* berisikan notifikasi bahwa telah terjadi transaksi dengan menggunakan kartu kredit pemegang, dan menginformasikan pemegang nomor telepon yang dapat dihubungi bila pemegang tidak merasa melakukan transaksi tersebut. Kapankah *transaction alert* dikirimkan? Terdapat beberapa kondisi, diantaranya adalah saat terdapat transaksi di *merchant* yang masuk kategori berisiko tinggi, terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan profil pemegang, terdapat transaksi berkali-kali dengan nilai sama, atau saat kartu kredit digunakan untuk pertama kalinya.

5) Penetapan Suku Bunga Maksimum Kartu Kredit

Salah satu pengaturan baru lainnya terkait penyempurnaan ketentuan APMK adalah mengenai kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan

batas maksimum suku bunga kartu kredit. Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit, Bank Indonesia telah menetapkan bahwa batas maksimum suku bunga kartu kredit yang dapat ditetapkan oleh penerbit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun. Suku bunga tersebut dapat diubah oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan indikator perekonomian yang ada, struktur biaya dalam kegiatan kartu kredit serta praktek suku bunga yang dikenakan oleh penerbit selama ini.

Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan APMK yang terkait dengan peningkatan aspek kehati-hatian adalah:

1) **Persyaratan Kepemilikan Kartu Kredit**

Dari sisi kepemilikan kartu kredit, Bank Indonesia mengatur kembali mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu untuk dapat menjadi pemegang kartu kredit. Persyaratan ini dimulai dengan persyaratan bersifat dasar berupa syarat minimum usia 21 tahun bagi pemegang kartu utama, dan 17 tahun bagi pemegang kartu tambahan. Syarat usia ini diharapkan dapat menyaring agar individu yang memegang kartu kredit adalah individu-individu yang telah dewasa, dan matang dalam memahami risiko penggunaan kartu kredit. Syarat dasar berikutnya adalah minimum pendapatan sebesar tiga juta rupiah per bulan. Syarat ini dimaksudkan agar memastikan bahwa individu pemegang kartu kredit merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk diberikan dan mengelola fasilitas kredit yang diberikan melalui kartu kredit. Dalam hal ini pendapatan ini harus dibuktikan dengan dokumen resmi berupa slip gaji bagi individu yang bekerja pada perusahaan atau lembaga, atau

bukti setoran pajak bagi individu yang memiliki usaha sendiri. Kedua syarat ini disebut syarat dasar karena individu-individu yang tidak memenuhi kedua syarat diatas pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk memegang kartu kredit.

2) **Penerapan Manajemen Risiko Pemberian Kredit**

Setelah pengaturan persyaratan kepemilikan Kartu Kredit, untuk memperkuat aspek kehati-hatian dalam pemberian kredit, dalam penyempurnaan ketentuan APMK terdapat pengaturan persyaratan mengenai plafond kredit dan jumlah penerbit yang dapat memberikan Kartu Kredit. Persyaratan ini hanya berlaku bagi pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan antara Rp3 juta-Rp10 juta. Bagi pihak yang masuk dalam kategori tersebut, maka batas maksimal plafond kredit yang dapat diberikan oleh seluruh penerbit kartu kredit adalah sebesar tiga kali pendapatan bulannya. Batas maksimal plafond ini berlaku secara industri, artinya total plafond seluruh kartu kredit yang dimiliki oleh pemegang kartu akan dijumlahkan, dan jumlah tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan. Pembatasan selanjutnya adalah mengenai jumlah penerbit, dimana untuk pemegang kartu yang masuk kategori diatas akan dibatasi hanya dapat menerima kartu kredit dari dua penerbit yang berbeda.

halaman ini sengaja dikosongkan

Artikel

halaman ini sengaja dikosongkan

Penetapan Suku Bunga Kredit Dalam Kerangka Basel II di Pasar Perbankan Indonesia

Amri Anjas Asmara¹

Penelitian ini menganalisis perilaku penetapan suku bunga kredit oleh bank umum di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2004 hingga awal tahun 2012. Penelitian ini mempertimbangkan implementasi ketentuan Basel II serta struktur industri yang memiliki dampak potensial terhadap perilaku bank dalam maksimisasi profit, dan pada gilirannya memiliki dampak terhadap perilaku bank dalam penetapan suku bunga kredit. Dengan menggunakan pendekatan General Method of Moment (GMM), penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum melakukan penetapan suku bunga kredit dengan sensitivitas yang relatif tinggi terhadap risiko. Penelitian ini juga menunjukkan indikasi bahwa bank cenderung menargetkan penerimaan margin bunga. Hal ini membuat besarnya tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan harus bisa mengkompensasi biaya dana yang dikeluarkan bank di pasar sekunder.

JEL Classification : C36, E43, G21

Keywords: Loan Pricing, Basel II Capital Requirement, General Method of Moment (GMM)

1. PENDAHULUAN

Penyaluran kredit merupakan lini bisnis utama bagi sebagian besar bank umum di Indonesia. Hal ini setidaknya diindikasikan oleh besarnya kontribusi pendapatan bunga atas kredit terhadap pendapatan operasional perbankan. Sepanjang tahun 2004 sampai awal 2012, rata-rata proporsi pendapatan atas kredit adalah sekitar 53,52% dari total pendapatan operasional bank. Proporsi tersebut cenderung meningkat secara progresif dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,83% setiap tahun.

Besarnya kontribusi pendapatan bunga atas kredit memberikan pemahaman bahwa penetapan suku bunga

kredit merupakan fungsi yang penting dalam kegiatan operasional bank. Terkait dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Haddad et al., (2003) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit yang ditetapkan bank umum di Indonesia relatif tinggi (*overprice*). Dalam perkembangan aktual, rata-rata suku bunga kredit di Indonesia tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan suku bunga kredit di beberapa negara-negara Asia Tenggara.

Penetapan suku bunga kredit dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kecukupan modal bank. Terkait dengan hal ini, kerangka ketentuan Basel II yang dirumuskan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) telah mengatur tingkat

¹ Penulis adalah Alumnus Universitas Gadjah Mada

kecukupan modal yang diperlukan oleh bank untuk menyerap risiko kredit)²⁾. Ketentuan tersebut secara implisit mendorong bank untuk memastikan bahwa penetapan suku bunga kredit sudah memperhitungkan tingkat kecukupan modal yang digunakan untuk menyerap risiko. Hal ini berarti, bank harus mengimplementasikan mekanisme penetapan suku bunga kredit berbasis risiko (*risk-adjusted price*).

Implementasi ketentuan kecukupan modal untuk risiko kredit oleh perbankan di Indonesia, dilakukan secara bertahap hingga tahun 2012. Seiring dengan upaya tersebut, bank juga dihadapkan pada beberapa ketentuan terkait upaya pemetaan perbankan nasional, dimana ketentuan tersebut turut mempengaruhi perubahan skala ekonomi masing-masing bank dan juga perubahan tingkat konsentrasi industri perbankan)³⁾. Dalam hal ini, terdapat 5 bank komersial harus ditutup dan 11 bank umum yang harus melakukan proses merger di sepanjang tahun 2004 sampai akhir 2011. Proses merger sebagian besar dilakukan oleh bank-bank menengah dan kecil dalam rangka mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal dan persyaratan minimum modal baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku penetapan suku bunga kredit oleh bank di bawah ketentuan Basel II. Upaya identifikasi tersebut juga mempertimbangkan struktur pasar kredit perbankan di Indonesia. Dalam hal ini, struktur pasar kredit perbankan di Indonesia adalah *Cournot-oligopolistic*)⁴⁾.

2. KAJIAN LITERATUR

Berdasarkan ketentuan Basel II, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan bank dalam menentukan kebutuhan modal bagi penyerapan risiko kredit. Pertama, *Standard Approach*, yaitu pendekatan yang mengakomodasi penggunaan bobot risiko dari Basel I yang dikompilasi dengan dengan bobot risiko dari pemeringkat eksternal. Kedua, *Internal Rating Based (IRB)*, yaitu pendekatan yang memungkinkan bank untuk menghitung sendiri biaya modal untuk penyerapan risiko kredit dengan didasarkan pada model perhitungan risiko internal.

Bank diharapkan untuk secara bertahap beralih pada penggunaan pendekatan IRB karena pendekatan tersebut relatif lebih canggih. Dalam hal ini, terdapat dua varian dari pendekatan IRB, yaitu *IRB Foundation* dan *IRB Advanced*. Dengan beralih ke pendekatan yang lebih canggih, bank akan mendapatkan potensi keuntungan dari pengurangan alokasi modal yang harus disisihkan untuk menyerap risiko kredit.

Repullo dan Suarez (2004) menganalisis dampak dari ketentuan kecukupan modal baru terhadap penetapan suku bunga kredit dalam dalam pasar persaingan sempurna. Mereka menemukan bahwa bank yang menggunakan pendekatan IRB akan dapat menetapkan suku bunga kredit yang relatif rendah, terutama bagi kreditur yang mempunyai profil risiko yang rendah. Di sisi lain, bank yang menggunakan *standard approach* akan menetapkan suku bunga yang relatif tinggi, terutama untuk kreditur yang mempunyai profil risiko yang tinggi. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Ruthenberg dan Landskroner (2008). Hasil ini memiliki implikasi langsung terhadap distribusi risiko antar bank. Secara khusus, bank-bank besar dan berkualitas tinggi, yang mengadopsi pendekatan IRB, akan cenderung untuk melayani kreditur dengan pofil risiko rendah, sementara bank-bank kecil, yang mengadopsi pendekatan standar, akan cenderung untuk melayani kreditur yang lebih berisiko.

2) Ketentuan Basel II merumuskan dua pendekatan yang dapat digunakan oleh bank untuk menentukan kecukupan modal bagi penyerapan risiko kredit, yaitu (i) *Standard Approach* dan (ii) *Internal Rating Based (IRB)*.

3) Ketentuan tersebut merujuk pada perumusan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Setidaknya terdapat 2 kebijakan dibawah API yang berpotensi untuk mempengaruhi skala ekonomi dan bank dan juga tingkat konsentrasi industri perbankan di Indonesia, yaitu (i) kebijakan jumlah modal minimum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2005 dan (ii) kebijakan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) yang diatur dalam Peraturan Bank Sentral No.8/16/PBI/2006

4) Berdasarkan literature teori industri, pasar kredit dapat digolongkan sebagai pasar oligopoli karena Concentration Ratio (CR4) pasar kredit di Indonesia memiliki rata-rata nilai diatas nilai 40%. Selain itu, Nuryakin dan Warjiyo (2006) menunjukkan beberapa argumen yang mampu memberikan justifikasi bahwa struktur pasar kredit perbankan di Indonesia adalah oligopoli.

Hasan dan Zazzara (2006) menjelaskan estimasi tingkat suku bunga kredit berbasis risiko (*risk adjusted risk*) untuk kredit korporasi di bawah ketentuan Basel II. Tingkat suku bunga berbasis risiko tersebut dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu (1) komponen teknis, yang memperhitungkan baik kerugian yang diperhitungkan maupun kerugian tak terduga serta biaya oportunitas dari pemberian kredit, dan (2) komponen komersial, yang mencakup komisi, biaya operasional, dan biaya alokasi subyektif lainnya.

3. METODOLOGI

3.1. Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka matematis yang diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ruthenberg dan Landskroner (2008). Dalam hal ini, terdapat beberapa asumsi yang digunakan. Pertama, bank bersifat *risk neutral*⁵⁾. Kedua, bank komersial beroperasi baik di pasar primer maupun di pasar sekunder. Bank beroperasi di pasar primer dalam rangka meningkatkan simpanan dari masyarakat dan memperluas kredit. Bank juga beroperasi di pasar sekunder dalam rangka untuk menjembatani antara kondisi surplus dan defisit dari cadangan yang dimiliki bank. Kegiatan di pasar sekunder tersebut mencakup transaksi dengan bank komersial lainnya (deposito antar bank), transaksi dengan bank sentral (pinjaman uang atau deposito dengan bank sentral), dan transaksi di pasar keuangan (pembelian dan penjualan surat berharga). Ketiga, bank mempunyai tingkat kecukupan modal yang diperlukan untuk menyerap risiko, sebagaimana diwajibkan oleh bank sentral.

Persamaan dari *expected profit* dari setiap bank dalam jangka pendek dirumuskan sebagai berikut:

$$(3.1) E(\pi_i) = (1 - PD)(1 + R_L)L_i(R_L, \bar{\alpha}) - (1 + R_d)D_i(R_d, \bar{\beta}) - (1 + R)Z - k_i K_i^*(L_i) - F_i$$

5) Asumsi ini berkaitan dengan preferensi risiko dari agen ekonomi. Apabila semua agen ekonomi bersifat *risk neutral*, maka mereka hanya tertarik pada *expected value* dari pembiayaan berisiko.

dimana:

PD : *probability of default*,

$L_i(R_L, \bar{\alpha})$: fungsi permintaan kredit bank yang

berkaitan dengan suku bunga kredit (R_L),

$\bar{\beta}$: *shift parameter*

Di bawah asumsi *risk neutrality*, maka didapatkan suatu hubungan antara suku bunga kredit R_L dengan *free-risk rate* R_f :

$$R_L = \frac{(1 + R_f)}{(1 - PD)} - 1 \text{ dan } \frac{\partial R_L}{\partial PD} > 0$$

$D_i(R_d, \bar{\beta})$ fungsi penawaran deposito kepada masyarakat yang dipengaruhi oleh suku bunga deposito (R_d) dan juga shift parameter $\bar{\beta}$

Z_i , didefinisikan sebagai $Z_i = [L_i - (1 - r)D_i]$, yang merupakan aktifitas suatu bank i di pasar sekunder, dimana $r = \text{reserve requirements}$ dari deposito masyarakat

- Apabila $Z_i > 0$, maka bank mengalami kekurangan dana di pasar primer, sehingga bank akan mencari dana dipasar sekunder melalui *discount-window borrowing* atau *interbank borrowing*, sehingga bank harus membayar pada tingkat bunga tertentu R_w
- Apabila $Z_i < 0$, maka bank mengalami kelebihan dana dan akan membeli aset-aset di pasar sekunder, seperti deposito bank sentral, *treasury securities*, dimana bank akan mendapatkan penerimaan tingkat bunga R_b .

Berdasarkan aktivitas di pasar sekunder tersebut, maka suku bunga, R , dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$R = R_b + I(R_w - R_b), \text{ dimana } I = \begin{cases} 1, & Z_i > 0 \\ 0, & Z_i < 0 \end{cases}$$

Sementara itu, beberapa variabel lain dalam persamaan (3.1) yaitu

F_i : *operating cost function* dari bank, yang

diasumsikan konstan dalam jangka pendek,

K_i : biaya ekuitas (*cost of equity*), dan

K_i^* : *required regulatory capital*.

Lebih lanjut, untuk mendapatkan persamaan maksimisasi laba (*profi*), maka dicari *derivatif* pertama terhadap jumlah kredit L_i dari persamaan (3.1),

sebagaimana ditunjukkan persamaan berikut ini:

$$(3.2) \frac{\partial \pi}{\partial L} = (1 - PD)(1 + R_L) \frac{\partial L(\cdot)}{\partial L} + L(\cdot)(1 - PD) \frac{\partial (1 + R_L)}{\partial L} - (1 + R_w) \frac{\partial L(\cdot)}{\partial L} - k \cdot \frac{\partial K^*}{\partial L} = 0$$

Persamaan (3.2) di atas menunjukkan bahwa suku bunga kredit R_L merupakan fungsi dari permintaan kredit L dan shift parameter β , atau ditulis $R_L(L, \beta)$, dimana $L = \sum_{i=1}^N L_i$ merupakan total kredit perbankan dan N adalah jumlah bank.

Untuk mendapatkan persamaan eksplisit mengenai suku bunga kredit, R_L , maka persamaan (3.2) di atas ditransformasi menjadi persamaan berikut ini:

$$(3.3) (1 - PD) \left[\frac{\partial R_L(L)}{\partial L} L + (1 + R_L(L)) \right] = (1 + R_w) + k \cdot \frac{\partial K^*}{\partial L}$$

Dengan mempertimbangkan persamaan berikut ini, dimana η adalah elastisitas permintaan kredit dan H adalah tingkat konsentrasi industri,

$$(3.4) \frac{\partial R_L}{\partial L} L \frac{L}{R_L} = -R_L \cdot \frac{1}{\eta}$$

maka diperoleh persamaan suku bunga kredit sebagai berikut:

$$(3.5) (1 - PD) \left[1 + R_L \left(1 - \frac{H}{\eta} \right) \right] = (1 + R_w) + k \frac{\partial K^*}{\partial L}$$

Merujuk pada asumsi struktur pasar yang telah disampaikan di awal, yaitu *Cournot-oligopolistic*, maka persamaan (3.5) di atas mengindikasikan persamaan antara *marginal revenue* (MR) dengan *marginal cost* (MC).

Pada akhirnya, model suku bunga kredit di bawah ketentuan Basel II ditunjukkan oleh persamaan berikut ini:

$$(3.6) (1 + R_L) = \theta + (1 + R_f) \frac{H}{\eta} + (1 + R_w) + k \frac{\partial K^*}{\partial L}$$

dimana $\theta = R_L - R_f$ merupakan *yield differential* antara R_L (suku bunga kredit bank) dan R_f (*risk free rate*). Parameter tersebut dapat didefinisikan juga sebagai *risk premium*.

3.2. Tahap Estimasi

Sebagaimana disampaikan dalam kerangka matematis di bagian sebelumnya, model suku bunga kredit ditunjukkan oleh persamaan (3.6) dimana suku bunga kredit bank (R_L) ditentukan oleh *risk premium* (θ); tingkat konsentrasi industri (H); elastisitas permintaan kredit (η); *risk free rate* (R_f); biaya penerbitan

dana di pasar sekunder - *cost of debt* (R_w); and perkalian antara *cost of capital (equity)* (k) dengan sensitivitas dari modal yang dibutuhkan atas setiap perubahan jumlah kredit yang disalurkan.

Lebih lanjut, dalam persamaan *expected profits* (3.1), permintaan kredit merupakan fungsi dari suku bunga kredit (R_L) dan shift parameter (β). Dengan demikian, persamaan permintaan kredit dapat ditulis sebagai berikut:

$$(3.7) L(R_L, \alpha)$$

dimana shift parameter, β , merepresentasikan faktor makroekonomi seperti perubahan pada *Gross Domestic Product*-GDP (atau dapat digunakan sebagai proksi *income effect*) dan juga kondisi di pasar modal (digunakan sebagai proksi bagi *substitution effect*).

Model suku bunga kredit dan permintaan kredit diestimasi secara simultan dengan menggunakan sistem persamaan. Adapun model suku bunga kredit ditunjukkan oleh persamaan (3.8) di bawah ini. Dalam persamaan tersebut, semua variabel dalam model diubah dalam *transformasi ln* (1+x).

$$(3.8) \ln(1 + R_L) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(1 + LLP) + \alpha_2 \ln(1 + HHI) + \alpha_3 \ln(1 + SPN) + \alpha_4 (\ln(1 + k) + \ln(1.08)) + \epsilon_t$$

Dimana

RL : suku bunga kredit (R_L);

LLP : komponen risiko (*risk premium*) uang diukur dari rasio antara *loan loss provisions* terhadap rata-rata jumlah kredit (proksi dari *probability of default PD*);

HHI : *Herfindahl-Hirschman Index* yang menghitung tingkat konsentrasi pasar kredit di Indonesia

SPN : *cost of debt* dari kegiatan di pasar sekunder yang diukur dari *yield to maturity* surat perbendaharaan negara Indonesia 1 tahun (*1-year Treasury Bills*) sebagai proksi dari R_w ;

$\ln(1+k)+\ln(1+0.08)$:

cost of equity (k) dan sensitivitas dari modal yang dibutuhkan atas setiap perubahan jumlah

kredit yang disalurkan ⁶⁾. Nilai sensitivitas tersebut diasumsikan sebesar 8 persen sesuai dengan ketentuan tingkat kecukupan modal minimum yang diatur oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, model permintaan kredit ditunjukkan oleh persamaan (3.9) di bawah ini. Beberapa variabel diubah dalam transformasi $\ln(1+x)$ kecuali variabel permintaan kredit.

$$(3.9) \ln(L_d) = \gamma_0 + \gamma_1 \ln(1 + R_L) + \gamma_2 \ln(1 + \%GDP) + \gamma_3 \ln(1 + \sigma_p) + \gamma_4 \ln(1 + \% \Delta F) + \epsilon_t$$

dimana

L_d : jumlah permintaan kredit;

R_L : suku bunga kredit (R_L);

$\% \Delta GDP$: *income effect* yang diukur dari persentase perubahan pada GDP;

σ_p : *substitution effect* yang diukur dari *deviasi standar expected inflation* sepanjang periode 24 bulan;

$\% \Delta F$: *substitution effect* yang diukur dari *percentage change in funds (bonds)* yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan serangkaian data perbankan dan keuangan bulanan yang mencakup periode Januari 2004 hingga Februari 2012. Dengan menggunakan data tersebut, model suku bunga kredit dan jumlah permintaan kredit diestimasi menggunakan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM). Perumusan model GMM dalam menganalisis model *dynamic asset-pricing*, pada awalnya dilakukan oleh Hansen dan Singleton (1992). Perumusan tersebut telah

memberikan dampak yang besar bagi penelitian empiris dalam topik *asset pricing*. Dalam hal ini, model GMM dapat mengakomodasi evaluasi ekonometrik terhadap model *asset-pricing* dengan asumsi yang lebih realistis, terkait dengan perubahan dari variabel eksogen (Jaganathan, et al., 2002).

4. HASIL ESTIMASI

Hasil estimasi model suku bunga kredit dengan model permintaan kredit dengan menggunakan pendekatan GMM diklasifikasikan berdasarkan jenis kredit bank, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi model suku bunga kredit. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, variabel *loan-loss provision* bernilai positif dan signifikan terhadap suku bunga kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa bank-bank cenderung menetapkan suku bunga kredit yang relatif tinggi kepada kreditur yang mempunyai profil risiko yang relatif tinggi. Suku bunga yang tinggi tersebut digunakan untuk mengkompensasi risiko kredit.

Variabel HHI yang merepresentasikan tingkat konsentrasi pasar kredit di Indonesia memiliki dampak positif namun tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan asumsi model *Cournot*, bahwa bank-bank berkompetisi pada kuantitas (jumlah) kredit yang ditawarkan bukan pada harga (tingkat bunga). Kondisi ini pada dasarnya lazim terjadi pada perusahaan jasa seperti perbankan, yang cenderung memilih *non-price competition*.

Cost of debt di pasar sekunder memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga kredit. Interaksi ini mengindikasikan bahwa bank masih berupaya untuk mengejar target pendapatan bunga (*profit margin*). Dalam jangka pendek, ketika bank memiliki kekurangan dana di pasar primer, bank harus mencari dana di pasar sekunder, seperti melalui *discount window borrowing* atau *interbank borrowing*. Dengan demikian, bank harus membayar tingkat suku bunga dari pinjaman tersebut. Jika

6) Ide yang mendasari perhitungan *cost of equity* dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Ruthenberg dan Landskroner, (2008). Dalam hal ini, meskipun komposisi *economic capital* dari bank terdiri dari 2/3 *core equity capital* (tier 1) dan 1/3 *subordinated debt* (tier 2), namun diasumsikan bahwa *cost of capital* dari bank didasarkan pada *cost of equity capital*. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan *single-factor capital asset pricing model* - CAPM. Metode tersebut lazim digunakan untuk mengestimasi *cost of equity* dari suatu perusahaan, sebagaimana dilakukan oleh Brunner et al (1998) dan Graham dan Harvey (2001). Berdasarkan metode tersebut, *nominal cost of equity* - k (atau *expected return* - R) merupakan kombinasi linier dari *nominal risk-free rate*, R_f , dan *firm-specific risk premium*:

$$k = E[R_i] = R_f + \beta_{im}(E[R_m] - R_f)$$

Dalam konteks perbankan Indonesia, R_f merupakan *risk free rate* yang direpresentasikan oleh rata-rata *yield to maturity* dari obligasi pemerintah, R_m merupakan *market yield* yang direpresentasikan oleh rata-rata imbal hasil dari Indeks Harga Saham Gabungan; dan β_i merupakan beta (β) dari setiap bank i . β_i dikenal sebagai *CAPM beta* dan diukur dari *covariance* antara *bank's stock return* dengan *market return*, dibagi dengan *variance* dari *market return*.

tingkat suku bunga di pasar sekunder cenderung tinggi, bank akan menetapkan suku bunga kredit yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengkompensasi tingginya tingkat suku bunga yang harus dibayar oleh bank dalam operasinya di pasar sekunder.

Cost of equity sensitivity, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat suku bunga kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku variabel tersebut konsisten dengan hipotesis bahwa di bawah ketentuan Basel II, kecukupan modal bank bersifat *pro-cyclical*. Namun, dalam model kredit konsumsi, variabel tersebut memiliki pengaruh negatif meskipun tidak signifikan. Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena kredit konsumsi merupakan pilihan utama bagi bank dalam penyaluran kredit jangka pendek.

Di sisi lain, tabel 2 menunjukkan hasil estimasi model permintaan kredit. Hasil estimasi tersebut menunjukkan dua temuan utama. Pertama, ekpektasi inflasi memiliki

pengaruh positif terhadap permintaan kredit. Hal ini terjadi karena kredit merupakan sumber pembiayaan utama dari beberapa aktivitas perekonomian. Kedua, sumber pembiayaan alternatif dari pasar modal, seperti obligasi, berpotensi menjadi substitusi bagi kredit perbankan, terutama untuk pembiayaan modal kerja. Namun sumber pembiayaan alternatif tersebut belum dapat menggantikan peran kredit investasi, sebagai sumber pembiayaan kegiatan investasi jangka panjang.

Dalam konteks pemodelan GMM, over-identifying restriction dapat diuji melalui kalkulasi J- statistic Hansen (1982). J-statistic tersebut digunakan untuk mengevaluasi suitability dari model. Terkait dengan hal ini, hasil kalkulasi J-statistic dari model suku bunga maupun model permintaan kredit cenderung lebih kecil dari 0,1 yang mengindikasikan bahwa beberapa property condition dari sistem persamaan GMM tersebut telah terpenuhi.

Tabel Artikel 1.1
Hasil Regresi Model Suku Bunga Kredit

Variabel dependen : Suku bunga kredit	General Method of Moments (GMM)		
	Suku bunga kredit Modal Kerja	Suku bunga kredit Investasi	Suku bunga kredit Konsumsi
Intersep	2.096 {29.192}*	2.026 {30.481}*	2.170 {37.083}*
<i>Loan Loss Provisions</i> (LLP)	1.366	3.295	3.273
<i>ln</i> (1+LLP)t-1	{2.584}**	{6.627}*	{9.846}*
HHI	0.0004	0.025	-0.017
<i>ln</i> (1+HHI) t	{0.019}	{1.138}	{-0.660}
SPN (<i>Cost of Debt</i>)	0.230	0.267	0.221
<i>ln</i> (1+SPN)t	{5.225}*	{5.320}*	{7.263}*
<i>Cost of Equity Sensitivity</i>	0.011	0.003	-0.002
<i>ln</i> (1+k)+ <i>ln</i> (1+0.08)t	{2.675}*	{1.398}	{-0.949}
Observasi	97	97	97
J-Statistic	0.0030	0.0000	0.0004

Koefisien yang terdapat pada tanda dalam kurung adalah t statistics
*, ** dan *** mengindikasikan tingkat signifikansi pada level 1, 5 dan 10 persen.

Table Artikel 1.2
Hasil Regresi Model Permintaan Kredit

Variabel Dependen: Permintaan Kredit	General Method of Moments (GMM)		
	Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi	Kredit Konsumsi
Intersep	34.912 {13.394}*	27.460 {34.803}*	30.750 {38.638}*
RL (Suku bunga kredit)	-8.456	-5.870	-6.595
$\ln(1+RL)_t$	{-8.206}*	{-18.900}*	{-21.951}*
% Δ GDP (<i>Income Effect</i>)	0.316	0.004	-0.0005
$\ln(1+\% \Delta \text{GDP})_{t-1}$	1.788***	{0.058}	{-0.062}
StdDev dari <i>expected inflation</i>	1.037	0.529	0.455
$\ln(1+\sigma)_t$	{4.956}*	{7.192}*	{8.190}*
<i>Change in Funds Raised</i>	-0.455	-0.123	-
$\ln(1+\% \Delta F)_{t-1}$	{-2.415}	{-1.642}	
Observasi	97	97	97
J-Statistic	0.0030	0.0000	0.0004

Koefisien yang terdapat pada tanda dalam kurung adalah t statistics
*, ** dan *** mengindikasikan tingkat signifikansi pada level 1, 5 dan 10 persen

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas temuan-temuan penting dalam penelitian ini pada bagian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat indikasi bahwa bank umum di Indonesia telah melakukan mekanisme penetapan suku bunga kredit berbasis risiko (*risk-adjusted*) sesuai dengan kerangka Basel II. Namun, bank sentral perlu memastikan efektifitas dari *risk management* tersebut, sehingga bank tidak membebani debitur dengan premi risiko yang relatif tinggi sehingga menyebabkan tingginya suku bunga kredit. Dalam hal ini, perlu dirumuskan instrumen yang dapat digunakan untuk mengawasi efektifitas proses tersebut.
- Sebagaimana ditunjukkan oleh perilaku *cost of debt*, terdapat indikasi bahwa *spread of interest rate* memainkan peran penting dalam penciptaan nilai ekonomi bagi bank. Namun demikian, penggunaan *spread* tersebut perlu dianalisis lebih dalam,

apakah *spread* tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan operasional yang kurang efisien atau untuk mencari keuntungan jangka pendek. Hal ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. #Basel II at a Glance: Implementation of Basel II in Indonesia. , <http://www.bi.go.id/>, 2006.
- Bank Indonesia. #Consultative Paper Basel III: Global Regulatory Framework For More Resilient Banks And Banking Systems. , <http://www.bi.go.id/>, 2012
- Bank Indonesia. # Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. , <http://www.bi.go.id/>, 2011.
- Basel Committee on Banking Supervision. #International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. , A Revised Framework Comprehensive Version. <http://www.bis.org/>, 2006.
- Baum, Christopher F., Schaer and Stillman. Instrumental variables and GMM: Estimation and Testing. , Boston

- College Economics Working Paper No.545, 2002.
- Bikker, J.A. and J.M. Groeneveld, "Competition and Concentration in the EU Banking Industry", *Kredit und Kapital*, Heft 1/2000, pp. 62-98.
- Bikker J.A, Saffer and Spierdijk. "Assessing Competition With the Panzar-Rosse Model: The Role of Scale, Cost and Equilibrium", *De Nederlandsche Bank Working Paper No. 225*, 2009.
- Claessens and Luc Laeven. "What Drives Bank Competition?: Some International Evidence". *Journal of Money, Credit, and Banking*, 36 (3), pp. 563-583.
- Curcio, D., and Gianfrancesco. "Bank Loans Pricing And Basel II: A Multi-Period Risk-Adjusted Methodology Under The New Regulatory Constraints", *Journal of Banks and Bank Systems*, Volume 4, Issue 4, 2009, pp. 66-75.
- Hadad, Muliaman D., Santoso W., D. S. Besar. "Studi Biaya Intermediasi Bank-Bank Besar di Indonesia: Apakah Bunga Kredit Bank Umum Overpriced?", *Research Paper*. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. 2003a.
- Hasan, I. and Zazzara, C. "Pricing risky Bank Loans in the New Basel II Environment", *Journal of Banking Regulation* Vol. 7, 3/4 (2006) pp.243-267.
- Heid, Benedikt. "Estimating Asset Pricing Models By GMM Using Eviews", *Mimeo*, Department Of Statistics, Econometrics, And Empirical Economics, University Of Tubingen, 2005.
- Jagannathan, R., Skoulakis, and Wang. "Generalized Method of Moments: Applications in Finance", *Journal of Business & Economic Statistics*, 2002, Vol. 20, No. 4, pp. 470-481.
- King, Michael. "The Cost Of Equity For Global Banks: A CAPM Perspective From 1990 To 2009", *BIS Quarterly Review*, <http://www.bis.org/>, 2009.
- Kontogeorgis, Olga. "Basel II And Lending Policies Of Danish Banks Under On-Going Economic Crisis", *Thesis*, Copenhagen Business School, 2010.
- Leuvensteijn, Bikker, Van Rixtel and Sorensen. "A New Approach To Measuring Competition In The Loan Markets Of The Euro Area", *Working Paper Series No. 768*, 2007
- Maccario, A., Sironi, A., Zazzara, C. "Is Banks' Cost of Equity Capital Different Across Countries? Evidence from the G-10 Countries Major Banks. *Mimeo*, Bocconi University, Milan, 2006.
- Mulyaningsih, Tri and Daly, Anne. "Competitive Conditions In Banking Industry: An Empirical Analysis Of The Consolidation, Competition And Concentration In The Indonesia Banking Industry Between 2001 And 2009". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 2011, pp. 151-186.
- Nuryakin, C., and Warjiyo. "Perilaku Penawaran Kredit Bank Di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001 - Juli 2005". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 9 No.2, 2006, pp. 21-55.
- Panzar J. C., and J. N. Rosse, "Testing for 'monopoly', equilibrium", *Journal of Industrial Economics*, 25, 1987, pp. 443-456.
- Repullo R., and Suarez. "Loan Pricing under Basel Capital Requirements", *Journal of Financial Intermediation*, 13(4), pp. 496-521.
- Rozas, Luis G. D., "Testing For Competition In The Spanish Banking Industry: The Panzar-Rosse Approach Revisited", *Banco De Espana Working Paper No. 0726*, 2007.
- Ruthenberg D., and Landskroner Y. "Loan Pricing under Basel II in an Imperfectly Competitive Banking Market", *Journal of Banking & Finance* 32, 2008, pp. 2725-2733.
- Setyowati, Rini. "Tingkat Persaingan Industri Perbankan di Indonesia", *Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Wooldridge, J.M., "Applications of Generalized Method Moments Estimation", *Journal of Economic Perspectives* 15:4, 2001, pp.87-100.

Artikel 2

Determinan Suku Bunga Kredit Modal Kerja Bank Umum di Indonesia

Lydia⁷

Evan Setiawan⁸

Penelitian ini menganalisis suku bunga kredit modal kerja pada Bank Umum di Indonesia periode tahun 2003 hingga 2011 dan bertujuan untuk mengetahui determinan suku bunga kredit modal kerja dengan menggunakan biaya dana, biaya operasional, margin keuntungan, dan risiko gagal bayar sebagai variabel independen. Terdapat dua kontribusi dari penelitian ini terhadap literatur. Pertama, penelitian ini menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi bank dalam menentukan suku bunga kredit modal kerja. Kedua, dengan menggunakan proksi untuk variabel yang diproyeksikan pada masa depan, peneliti mencoba untuk mengetahui apakah proyeksi masa depan juga digunakan dalam menentukan suku bunga kredit modal kerja. Dengan menggunakan data panel dan regresi berganda, pengujian determinan suku bunga kredit modal kerja dilakukan pada Bank Umum secara keseluruhan dan Bank Pemerintah Daerah secara terpisah. Hasil menunjukkan bahwa suku bunga kredit modal kerja Bank Umum pada umumnya dipengaruhi secara positif oleh suku bunga deposito sebagai biaya dana utama, biaya operasional masa lalu, proyeksi margin keuntungan masa depan, dan proyeksi risiko gagal bayar masa depan. Selain itu, suku bunga kredit modal kerja juga turut dipengaruhi secara negatif oleh margin keuntungan dan risiko gagal bayar masa lalu.

JEL: C32, C33, E43, G21

Kata kunci: biaya dana, biaya operasional, margin keuntungan, risiko gagal bayar, suku bunga kredit modal kerja

I. LATAR BELAKANG

Kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang paling banyak dikururkan di pasar kredit di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya kredit modal kerja bagi sektor usaha di Indonesia untuk memenuhi kecukupan modal kerja bagi keberlangsungan usaha.

Hal yang penting dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari penyaluran kredit terhadap perekonomian adalah jumlah dana yang disalurkan untuk kredit dan efisiensi dari penyaluran kredit itu sendiri (Beck, 2006).

Dilihat dari jumlah dana, kredit modal kerja memiliki porsi 49 persen dari keseluruhan kredit, sedangkan hingga 2011, rasio total kredit perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia baru mencapai 29 persen.⁹ Artinya, rasio jumlah kredit modal kerja yang disalurkan terhadap PDB hanya sebesar 15 persen. Jumlah ini dinilai belum optimal terlebih jika melihat masih banyaknya dana

⁷ Penulis adalah alumnus Prasetya Mulya Business School

⁸ Penulis adalah alumnus Prasetya Mulya Business School

⁹ Menurut Data Bank Dunia tentang PDB.

yang dimiliki bank. Hingga Desember 2011, terdapat 118 triliun rupiah dana Bank Umum yang disimpan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI, 2012).

Perbankan di Indonesia mengindikasikan intermediasi yang belum efisien dan berdampak pada tingginya suku bunga kredit modal kerja. Di tahun 2012, suku bunga kredit modal kerja masih berkisar antara 11 hingga 12 persen. Di satu sisi, tingginya suku bunga kredit modal kerja dapat menjelaskan rendahnya jumlah kredit modal kerja yang disalurkan. Suku bunga kredit modal kerja yang tinggi semakin sulit diserap sehingga pengembangan sektor usaha menjadi terhambat. Di sisi lain, tingginya suku bunga kredit modal kerja turut mempengaruhi daya saing industri dalam negeri. Beban bunga kredit yang tinggi menyebabkan pengusaha nasional menjadi kurang kompetitif dari segi biaya dibandingkan dengan pesaing asing dengan biaya modal yang lebih murah.

Perlu disadari bahwa diperlukan upaya untuk menurunkan suku bunga kredit modal kerja untuk menggerakkan sektor usaha dalam negeri. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga kredit modal kerja di Indonesia dapat menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan suku bunga kredit modal kerja Bank Umum di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan membantu regulator terkait upaya penurunan suku bunga kredit. Regulator dapat mengetahui besarnya pengaruh masing-masing komponen pembentuk suku bunga kredit, yang dapat berguna dalam menciptakan kebijakan yang efektif.

II. KAJIAN LITERATUR

II.1 Teori Bank Loan Rates Markup

Teori ini dikemukakan oleh Rouseas (1985), yang menyatakan bahwa suku bunga kredit bank adalah harga dari produk finansial yang dihasilkan oleh

industri keuangan. Dalam menghimpun dana, bank bersaing dalam pasar keuangan *wholesale*, sedangkan bank menentukan harga kredit sebagai pasar *retail*. Bank memiliki kemampuan sebagai *price setter* dengan menentukan besarnya markup yang diinginkan dalam penetapan harga atas kredit.

Dalam menentukan suku bunga kredit, bank memperhitungkan biaya dalam memperoleh *raw material* yang akan digunakan dalam proses produksi, yaitu suku bunga deposito, sedangkan biaya operasional lainnya seperti biaya tenaga kerja merupakan *fixed cost*. Suku bunga kredit juga ditentukan oleh besarnya *markup* yang diperlukan untuk mencapai target laba bank. Selanjutnya, risiko terjadinya gagal bayar pada kredit turut mempengaruhi besarnya *markup*. Timbulnya risiko kredit yang gagal dibayarkan dapat mengurangi marjin keuntungan masa depan, sehingga bank menetapkan *markup* yang lebih besar untuk melindungi besarnya keuntungan yang semula diinginkan. Hal ini dilakukan agar bank tetap dapat menjalankan usahanya dan memperoleh profit dengan optimal.

Dengan demikian, penetapan besarnya suku bunga kredit dilakukan dengan memasukkan suku bunga deposito sebagai faktor yang mendominasi biaya pokok, markup yang besarnya memperhitungkan marjin keuntungan yang diinginkan bank, dan risiko *bad loans* (Rouseas, 1985).

II.2 Determinan Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Bank melakukan kegiatan intermediasi yang dapat dianalogikan sebagai proses produksi dan menghasilkan output berupa kredit dengan suku bunga kredit sebagai harganya. Penetapan suku bunga kredit modal kerja tentu dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan intermediasi tersebut.

Agar dapat menyalurkan kredit, dana merupakan *input* yang paling utama bagi bank karena dana inilah

yang akan menjadi *loanable fund*. Untuk memperoleh dana sebagai input, bank memberikan sejumlah bunga kepada nasabah atau deposan sebagai imbalan telah menyimpan uangnya di bank tersebut. Sebagai harga atas *raw material*, besarnya biaya atas dana menjadi dasar dalam penentuan harga atas kredit. Teori ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Baugnet-Hradisky (2004) dan Villalpando-Guerrero (2007) bahwa penentuan suku bunga kredit dipengaruhi oleh besarnya biaya dana. Kaymaz-Kaymaz (2011) menyimpulkan bahwa sebagai biaya dana yang utama, bank menggunakan suku bunga deposito dalam menentukan suku bunga kredit. Semakin besar biaya dana, bank perlu menetapkan suku bunga kredit yang lebih tinggi pula untuk menghindari kerugian. Di sisi lain, pada satu titik tertentu, bank tidak dapat lagi menaikkan suku bunga kredit untuk menghindari dua hal. Pertama, kehilangan debitur dengan kemampuan dan kemauan membayar yang baik. Kedua, hilangnya *power bank* dalam persaingan.

Selain dana, bank juga membutuhkan sumber daya lainnya untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan intermediasi bank dalam menghimpun dana dan menyediakan kredit. Besarnya biaya operasional ditemukan berpengaruh positif pada efisiensi intermediasi bank, yang dapat diukur dari *spread* yang terbentuk (Hossain, 2012). Di mana implikasi dari meningkatnya *spread* cenderung menunjukkan suku bunga kredit yang semakin tinggi (Brock dan Suarez, 2000). Penelitian lainnya menemukan hal serupa, bahwa biaya operasional ditemukan secara positif mempengaruhi suku bunga kredit (Gambacorta, 2008). Sebagai sumber pendapatan utama, bank menaikkan suku bunga kredit untuk menyiasati peningkatan biaya dan melindungi profit. Sebaliknya, peningkatan efisiensi bank dapat menurunkan suku bunga kredit (Villalpando dan Guerrero, 2007).

Selanjutnya, bank menggunakan model *cost-plus* dalam penentuan suku bunga kredit (Ivaškevičiūtė

dan Mačerinskiene, 2008). Oleh karena itu, bank juga memasukkan komponen besarnya margin yang diinginkan untuk mencapai target laba (Rousseas, 1985). Penelitian lainnya menemukan bahwa salah satu komponen utama yang membentuk jarak antara suku bunga deposito dengan suku bunga kredit adalah besarnya margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank (Beck, 2006). *Net interest margin* merupakan salah satu indikator penting terkait laba dan performa bank, yaitu margin keuntungan bunga. Pada umumnya, semakin tinggi *net interest margin*, bank memperoleh profit yang semakin besar pula (Khrawish, 2011).

Selain komponen biaya dan keuntungan yang diinginkan, dalam menyalurkan kredit bank menghadapi *default risk*, yaitu risiko kredit yang tidak dibayarkan kembali oleh debitur. Penelitian oleh Angbazo (1997), Baugnet-Hradisky (2004), Gambacorta (2008) dan Castro-Santos (2010) menyatakan bahwa suku bunga kredit turut dipengaruhi oleh besarnya risiko gagal bayar (*default risk*). Saat menghadapi kredit yang lebih berisiko, bank cenderung menetapkan margin dan suku bunga kredit yang lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena bank mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (*high risk high return*). Bank menetapkan suku bunga kredit yang lebih tinggi untuk mengantisipasi kerugian dari semakin banyaknya kredit yang perlu dihapuskan. Bank dengan risiko gagal bayar yang lebih besar terbukti cenderung mencapai profit yang lebih rendah (Sufian dan Chong, 2008). Hal tersebut dapat ditimbulkan oleh ketidaksiapan bank dalam membentuk cadangan penghapusan kredit. Berlawanan dengan hasil penelitian sebelumnya, penurunan kualitas kredit justru ditemukan berpengaruh pada penurunan suku bunga kredit oleh Doliente (2005) dan Brock (2000).

Berdasarkan uraian di atas, diduga suku bunga kredit modal kerja di Indonesia dipengaruhi oleh variabel biaya dana, biaya operasional, margin keuntungan, dan risiko gagal bayar.

III. METODOLOGI DAN DATA

Penelitian ini dilakukan terhadap enam golongan Bank Umum berdasarkan klasifikasi Bank Indonesia. Enam golongan Bank Umum tersebut adalah Bank Persero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing.

Indikator yang digunakan untuk biaya dana dan biaya operasional adalah suku bunga deposito satu bulan dan rasio BOPO (Beban Operasional pada Pendapatan Operasional). Indikator marjin keuntungan dan risiko gagal bayar diproksikan oleh rasio NIM (*net interest margin*) dan rasio NPL (*non performing loan*). Seluruh data yang digunakan adalah data kuartalan pada periode tahun 2003 hingga 2011. Data diperoleh dari SPI (Statistik Perbankan Indonesia) dan SEKI (Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia) yang merupakan publikasi Bank Indonesia.

Pengujian empiris dilakukan pada dua level analisis. Subyek analisis level pertama adalah Bank Umum di Indonesia secara keseluruhan. Analisis pada level dua dibagi menjadi dua bagian, yaitu analisis pada lima golongan Bank Umum selain BPD dan analisis untuk BPD. Penggunaan metode data panel pada level satu didasarkan pada bentuk data yang terdiri dari data *cross-section* dan *time-series*. Pada analisis level dua untuk BPD, dilakukan pengujian dengan regresi berganda karena bentuk data hanya berupa *time-series* dengan variabel independen lebih dari satu.

Pada setiap level analisis digunakan lag satu dan lead satu untuk mengetahui pengaruh dari variabel masa lalu dan proyeksi masa depan terhadap suku bunga kredit modal kerja. Model dari kedua level analisis adalah sebagai berikut.

- a. Model Level Satu dan Level Dua untuk Lima Golongan Selain BPD

$$R_t = \alpha + \beta_1 CF_t + \beta_2 OC_{t-1} + \beta_3 OC_{t+1} + \beta_4 PM_{t-1} + \beta_5 PM_{t+1} + \beta_6 DR_{t-1} + \beta_7 DR_{t+1} + \varepsilon_t$$

- b. Model Level Dua untuk BPD

$$RBPD_t = \alpha + \beta_1 OC_{BPD_{t-1}} + \beta_2 OC_{BPD_{t+1}} + \beta_3 PM_{BPD_{t-1}} + \beta_4 PM_{BPD_{t+1}} + \beta_5 DR_{BPD_{t-1}} + \beta_6 DR_{BPD_{t+1}} + \varepsilon_t$$

dimana pada setiap model, R= Tingkat suku bunga pinjaman modal kerja, CF= biaya dana, OC= biaya operasional, PM= marjin keuntungan, DF= risiko gagal bayar, t dan t-1 menunjukkan periode data yang digunakan dan ε_t merupakan error term pada periode t.

Pada model level dua, biaya dana tidak dimasukkan karena BPD memiliki karakteristik khusus pada variabel biaya dana. Tidak dimasukkannya biaya dana pada model BPD ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

IV. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Analisis Level Satu untuk Bank Umum dan Analisis Level Dua untuk Lima Golongan Selain BPD

Tabel 1 menunjukkan hasil analisis level pertama dan kedua untuk lima golongan Bank Umum. Hasil *Adjusted R-squared* menunjukkan bahwa variasi pada variabel independen dalam model dapat menjelaskan variasi suku bunga kredit modal kerja Bank Umum sebesar 86,6 persen dan 87,3 persen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa biaya dana, biaya operasional masa lalu, proyeksi marjin keuntungan masa depan, dan risiko gagal bayar masa depan memiliki pengaruh dengan arah yang positif. Marjin keuntungan masa lalu dan risiko gagal bayar masa lalu berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit modal kerja. Hanya biaya operasional masa depan yang tidak mempengaruhi suku bunga kredit modal kerja secara signifikan.

Tabel Artikel 2.1
Regresi Data Panel GLS (Generalized Least Square) Fixed Effect

Analisis Level Satu - Bank Umum					Analisis Level Dua - Lima Golongan Selain BPD				
Variabel dependen : KMK	Koef.	Standard error	Nilai t statistik	Probabilitas	Variabel dependen : KMK	Koef.	Standard error	Nilai t statistik	Probabilitas
SBD	0,6757	0,0345	19,5628	0,0000***	SBD	0,6682	0,0355	18,8013	0,0000***
BOPO(-1)	0,0332	0,0125	2,6585	0,0085***	BOPO(-1)	0,0247	0,0128	1,9242	0,0561*
BOPO(+1)	-0,0095	0,0129	-0,7399	0,4603	BOPO(+1)	-0,0210	0,0133	-1,5783	0,1165
NIM(-1)	-0,3927	0,0798	-4,9219	0,0000***	NIM(-1)	-0,5121	0,0865	-5,9127	0,0000***
NIM(+1)	-0,2995	0,0739	4,0505	0,0001***	NIM(+1)	0,2833	0,0798	3,5505	0,0005***
NPL(-1)	-0,0653	0,0393	-1,6597	0,0986*	NPL(-1)	-0,0799	0,0411	-1,9450	0,0535*
NPL(+1)	0,1845	0,0452	4,0789	0,0001***	NPL(+1)	0,2007	0,0476	4,2145	0,0000***
C	6,2649	1,4592	4,2932	0,0000	C	8,2758	1,5375	5,3828	0,0000
SE of Regression		1,174719			SE of Regression		0,802862		
R-squared		0,873880			R-squared		0,881538		
Adjusted R-squared		0,865956			Adjusted R-squared		0,873291		

Keterangan:

***) = signifikan pada α 1%, **) = signifikan pada α 5%, *) = signifikan pada α 10%

Pengaruh Biaya Dana terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Suku bunga deposito ditemukan menjadi variabel yang paling mempengaruhi pergerakan suku bunga kredit. Data Statistik Perbankan Indonesia per Desember 2011 menunjukkan bahwa komposisi dana Bank Umum secara nasional masih didominasi oleh deposito sebesar 45 persen, sehingga deposito sangat berperan sebagai sumber dana bank.

Suku bunga deposito menunjukkan biaya yang ditanggung bank untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dalam penyaluran kredit. Semakin tinggi suku bunga deposito, bank menetapkan suku bunga kredit modal kerja yang lebih tinggi pula.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Peningkatan BOPO masa lalu sebagai komponen biaya turut mendorong bank untuk menaikkan suku bunga kredit modal kerja. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada perbankan di Indonesia. Melakukan efisiensi ataupun peningkatan produktifitas belum menjadi solusi utama yang dipilih oleh bank. Bank menaikkan suku bunga kredit untuk mendongkrak pendapatan dan melindungi profit.

Rendahnya efisiensi yang berpengaruh pada tingginya suku bunga kredit di Indonesia dapat menjadi salah satu bentuk *‘quiet life’* yang dikemukakan oleh Berger dan Hannan (1998). Bank menetapkan suku bunga kredit yang lebih tinggi bukan untuk mencapai profit yang lebih besar, melainkan untuk menciptakan *‘hidup yang tenang’ (quiet life)*. Yang dimaksud dengan *‘hidup yang tenang’* adalah dengan menaikkan harga, bank tidak

perlu bekerja keras untuk mengontrol atau menekan biaya. Hal ini dapat terjadi jika kekuatan pasar cenderung terkonsentrasi.

Pengaruh Marjin Keuntungan terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Marjin keuntungan masa lalu dan masa depan ditemukan memiliki pengaruh dengan arah yang berbeda terhadap suku bunga kredit modal kerja. Peningkatan NIM yang berhasil dicapai di masa lalu berpengaruh pada penurunan suku bunga kredit modal kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan profit di masa lalu yang mampu menambah modal bank. Peningkatan porsi dana yang berasal dari bank sendiri dalam struktur dana membantu bank untuk menekan biaya dana sehingga bank dapat menurunkan suku bunga kredit. Dengan suku bunga kredit yang lebih rendah, bank melakukan ekspansi kredit yang turut didukung oleh penambahan modal yang berasal dari laba.

Di sisi lain, proyeksi marjin keuntungan mempengaruhi suku bunga kredit modal kerja dengan arah positif. Bank cenderung meningkatkan suku bunga kredit modal kerja sebagai upaya mendorong pendapatan bunga terkait NIM masa depan yang diproyeksikan meningkat.

Pengaruh Risiko Gagal Bayar terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Risiko gagal bayar masa lalu dan masa depan juga ditemukan memiliki perbedaan arah pengaruh terhadap suku bunga kredit modal kerja, seperti halnya dengan marjin keuntungan. Saat terjadi penurunan kualitas kredit, bank justru menurunkan suku bunga kredit modal kerja. Hal ini dapat didasari oleh pertimbangan bank untuk menyelamatkan pendapatan bunga di masa mendatang dengan mengurangi tekanan di tengah kondisi pasar yang menghadapi kesulitan. Penelitian terdahulu oleh Doliente (2005) dan Brock (2000) juga menemukan hal yang sama,

yaitu penurunan suku bunga kredit dilakukan sebagai solusi untuk keluar dari permasalahan kualitas kredit yang memburuk.

Berbeda dengan jumlah risiko gagal bayar yang sudah terjadi, bank lebih dipengaruhi oleh risiko gagal bayar masa depan secara positif. Jika bank dapat memproyeksikan peningkatan risiko gagal bayar, bank akan meningkatkan suku bunga kredit modal kerja untuk mengantisipasi besarnya kredit yang harus dihapuskan di masa depan. Dengan risiko yang lebih besar, bank juga mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar pula dengan suku bunga kredit yang lebih tinggi (Gambacorta, 2008).

IV.2 Analisis Level Dua untuk Bank Pembangunan Daerah

Analisis level dua untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) menggunakan regresi berganda karena jumlah variabel independen yang lebih dari satu dan memiliki data yang bersifat time-series.

Hasil Adjusted R-squared menunjukkan bahwa variasi pada variabel independen dalam model analisis level dua untuk BPD dapat menjelaskan variasi suku bunga kredit modal kerja BPD sebesar 88,8 persen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen BPD berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit modal kerja BPD pada tingkat kepercayaan yang berbeda-beda. Berbeda dengan analisis level satu, pada BPD, biaya operasional masa depan juga turut berpengaruh signifikan terhadap suku bunga kredit modal kerja.

Koefisien yang diperoleh menjelaskan bahwa biaya operasional masa lalu, biaya operasional masa depan, proyeksi marjin keuntungan masa lalu, dan proyeksi marjin keuntungan masa depan memiliki pengaruh dengan arah yang positif. Risiko gagal bayar masa lalu dan risiko gagal bayar masa depan berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit modal kerja BPD.

Tabel Artikel 2.2
Regresi Berganda OLS (Ordinary Least Square) Analisis Level Dua - BPD

Variabel dependen : KMK	Koef.	Standard error	Nilai t statistik	Probabilitas
BOPOBPD(-1)	0,193562	0,042790	4,523565	0,0001***
BOPOBPD(+1)	0,135286	0,049367	2,740398	0,0107**
NIMBPD(-1)	0,230906	0,081804	2,822677	0,0088***
NIMBPD(+1)	0,190747	0,105884	1,801467	0,0828*
NPLBPD(-1)	-0,585545	0,187072	-3,118296	0,0043***
NPLBPD(+1)	-0,546140	0,146868	-3,718573	0,0009***
C	c	3,845892	1,722140	0,0965
SE of Regression				
	0,645019			
R-squared				
	0,908265			
Adjusted R-squared				
	0,887879			

Keterangan:

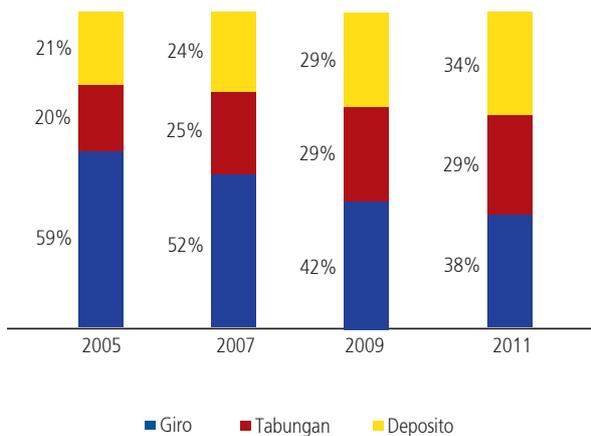
***) = signifikan pada α 1%, **) = signifikan pada α 5%, *) = signifikan pada α 10%

Pengaruh Biaya Dana terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja BPD

BPD memiliki karakteristik khusus terkait dengan struktur sumber dana pihak ketiga yang dimilikinya sehingga variabel biaya dana dengan indikator suku bunga deposito satu bulan tidak dimasukkan ke dalam model.

Komposisi dana pihak ketiga pada BPD didominasi oleh giro dan tabungan (Grafik 1). Dana pada BPD ditopang oleh anggaran pemerintah daerah (sekitar 70 persen) serta sisanya merupakan tabungan dari nasabah masyarakat lokal yang loyal, meskipun belum dihimpun secara optimal (Infobank, Maret 2012).

Grafik Artikel 2.1
Komposisi DPK BPD pada Tahun 2005, 2007, 2009, dan 2011



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, diolah

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja BPD

Berbeda dengan golongan Bank Umum lainnya, biaya operasional masa lalu dan biaya operasional masa depan pada BPD secara bersama-sama signifikan mempengaruhi penentuan suku bunga kredit modal kerja pada BPD dengan arah yang positif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gambacorta (2008) dan Hamadi (2012) bahwa biaya operasional turut berpengaruh secara positif terhadap penentuan suku bunga kredit modal kerja. Turut berpengaruhnya biaya operasional masa depan pada BPD dapat disebabkan oleh cakupan usaha BPD yang lebih kecil dibandingkan

golongan bank lainnya, sehingga pos-pos biaya yang ada dapat diproyeksikan dengan lebih tepat.

Dapat disimpulkan bahwa BPD cenderung bertindak responsif terhadap perubahan biaya operasional dalam menentukan suku bunga kredit modal kerja. Hal ini dapat terlihat dari koefisien variabel biaya operasional masa lalu yang lebih besar dibandingkan variabel biaya operasional masa depan.

Pengaruh Marjin Keuntungan terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja BPD

Marjin keuntungan masa lalu dan proyeksi marjin keuntungan masa depan pada BPD secara bersama-sama mempengaruhi penentuan suku bunga kredit modal kerja BPD. Hal ini sesuai dengan teori *Bank Loan Rates Markup* yang dikemukakan Rousseas (1985) bahwa marjin keuntungan yang ingin diperoleh bank menjadi faktor dalam penentuan suku bunga kredit. Namun, berbeda dengan analisis sebelumnya untuk golongan Bank Umum selain BPD, marjin keuntungan masa lalu BPD memiliki arah pengaruh yang positif. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki oleh BPD terkait komposisi dana pihak ketiga yang dimilikinya.

Dengan demikian, BPD akan cenderung lebih bertindak responsif terhadap marjin keuntungan masa lalu dalam penentuan suku bunga kredit modal kerja. Hal ini terjadi khususnya saat BPD menyikapi perubahan marjin keuntungan masa lalu dan masa depan yang cenderung sama jumlahnya.

Pengaruh Risiko Gagal Bayar terhadap Suku Bunga Kredit Modal Kerja BPD

Berdasarkan hasil regresi, variabel risiko gagal bayar, baik masa lalu maupun proyeksi masa depan, merupakan variabel yang paling mempengaruhi penentuan suku bunga kredit modal kerja dalam BPD. Hal ini dapat terlihat dari koefisien variabel risiko gagal bayar baik masa lalu maupun

masa depan yang lebih besar dibandingkan koefisien variabel marjin keuntungan dan biaya operasional.

Pengaruh variabel risiko gagal bayar masa lalu dan masa depan yang signifikan dengan arah yang negatif menunjukkan anomali dalam penelitian ini. Dalam menyikapi kenaikan risiko gagal bayar yang diproyeksi akan terus berlanjut, BPD justru memangkas suku bunga kredit modal kerja. Hal ini dapat didorong oleh pertimbangan strategi usaha BPD. Jika dibandingkan dengan golongan bank lainnya, suku bunga kredit modal kerja BPD memang tidak kompetitif. Per Desember 2011, suku bunga kredit modal kerja bank asing dan campuran berada di bawah sembilan persen saat BPD masih mengenakan bunga di atas 13 persen. Penurunan suku bunga kredit modal kerja dilakukan agar BPD dapat bersaing dengan bank lainnya dalam rangka berupaya menjadi regional champion yang dicanangkan oleh Bank Indonesia sejak 2008.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh variabel biaya dana, biaya operasional, marjin keuntungan, dan risiko gagal bayar terhadap suku bunga kredit modal kerja dengan menggunakan variabel masa lalu dan proksi variabel masa depan. Peneliti bertujuan untuk memberikan kontribusi secara empiris tentang faktor apa saja yang menjadi determinan suku bunga kredit, khususnya modal kerja pada Bank Umum di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit modal kerja pada Bank Umum dan lima golongan Bank Umum selain BPD dipengaruhi oleh biaya dana, biaya operasional masa lalu, marjin keuntungan masa lalu dan masa depan serta risiko gagal bayar masa depan. Suku bunga kredit modal kerja dipengaruhi oleh masing-masing variabel dengan arah yang berbeda. Biaya dana, biaya operasional masa lalu, marjin keuntungan masa depan dan risiko gagal bayar masa depan ditemukan berpengaruh secara positif. Marjin keuntungan masa lalu dan risiko

gagal bayar masa lalu berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit modal kerja.

Pada BPD, suku bunga kredit modal kerja dipengaruhi oleh biaya operasional masa lalu dan masa depan, margin keuntungan masa lalu dan masa depan, serta risiko gagal bayar masa lalu dan masa depan. Pada BPD, variable biaya dana tidak dimasukkan ke dalam analisis karena mayoritas dana pihak ketiga BPD berupa giro dan tabungan (SPI, 2012). Selain itu, 70 persen dana BPD berasal dari penyaluran dana Pemerintah Daerah (Infobank, Maret 2012). Pengaruh dengan arah positif ditimbulkan oleh biaya operasional dan margin keuntungan. Risiko gagal bayar baik masa lalu maupun masa depan ditemukan berpengaruh negatif terhadap suku bunga kredit modal kerja BPD.

Pada level Bank Umum dan lima golongan Bank Umum, faktor yang paling berpengaruh terhadap suku bunga kredit modal kerja adalah biaya dana yang diprosikan oleh suku bunga deposito berjangka satu bulan. Hasil pengujian menunjukkan adanya indikasi bank cenderung bersifat responsif terhadap biaya operasional dan margin keuntungan bunga dalam menentukan suku bunga kredit modal kerjanya. Di sisi lain, terdapat indikasi bahwa bank cenderung antisipatif terhadap risiko gagal bayar di masa depan dibanding risiko gagal bayar masa lalu dalam menentukan suku bunga kredit modal kerja saat ini.

Pada BPD, risiko gagal bayar merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap suku bunga kredit modal kerja. BPD cenderung bersifat responsif dibanding antisipatif baik terhadap biaya operasional, margin keuntungan yang diprosikan oleh NIM, maupun risiko gagal bayar dalam menentukan suku bunga kredit modal kerjanya. Salah satu anomali yang ditemukan adalah penurunan suku bunga kredit modal kerja secara terus menerus oleh BPD di saat risiko gagal bayar menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat disebabkan oleh strategi bisnis dan persaingan BPD. Suku bunga kredit BPD terbilang tidak

kompetitif dibanding suku bunga kredit pesaingnya seperti Bank Asing dan Campuran. Selain itu, dicanangkannya BPD untuk menjadi regional champion dapat menjadi faktor lainnya.

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan. Pertama, data yang digunakan sebagai proksi dari variabel-variabel masa depan yang diproyeksikan seperti BOPO(+1), NIM(+1) maupun NPL(+1) merupakan data historis yang bersifat actual sehingga data tersebut tidak dapat sepenuhnya menggambarkan proyeksi yang dilakukan oleh bank secara nyata. Kedua, peneliti tidak dapat mengakses data yang rinci mengenai indikator variabel dalam penelitian ini sehingga data yang digunakan merupakan proksi, seperti BOPO dan net interest margin. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data agregat per golongan bank sehingga hasil yang diperoleh merupakan generalisasi dari Bank Umum yang ada di Indonesia.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Ariyanto, T. †Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia. , Finance and Banking Journal, 2011, 13, hal. 34-46.
- Angbazo, L., 1997. †Commercial Bank Net Interest Margins, Default Risk, Interest-Rate Risk and Off-Balance Sheet Banking. , Journal of Banking and Finance, 21, hal. 55-87.
- Bank Indonesia. †Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. , <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Ekonomi+dan+Keuangan+Indonesia/Versi+HTML/Sektor+Moneter/>, 2012.
- Bank Indonesia. †Statistik Perbankan Indonesia. , <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Indonesia/>, 2012.
- Baugnet, V. dan Hradisky, M. †Determinants of Belgian Bank Lending Interest Rates. , NBB Working Papers, 2004.

- Beck, T. dan Demirgüç-Kunt, A. #Financial Institutions and Market Across Countries and Overtime-Data and Analysis· , The World Bank Policy Research Working Paper, 2009.
- Beck, T.H.L. #Efficiency in Financial Intermediation Theory and Empirical Measurement; in B. Balkenhol (Ed.) Microfinance and public policy: Outreach, performance and efficiency· . Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006.
- Berger, A. dan Hannan, T.H. #The Efficiency Cost of Market Power in the Banking Industry: A Test of the #Quiet Life· and Related Hypotheses· , Review of Economics and Statistics, 1998, 27(2), hal. 404-431.
- Brock, P. L. dan Suarez, L. R. #Understanding the Behavior of Bank Spreads in Latin America· , Journal of Economics and Finance, 2000, 9, hal. 105-109.
- Castro, G. dan Santos, C. #Bank Interest Rates and Loan Determinants· , Economic Bulletin: Economics and Research Department fi Banco de Portugal, 2010.
- Doliente, J.S. #Determinants of Bank Net Interest Margin in Southeast Asia· , Applied Financial Economic Letters, 2005, 1, hal. 53-57.
- Flamini, V., McDonald, C., dan Liliana, S. #The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa· , IMF Working Paper, 2009.
- Gambacorta, L. #How do Banks Set Interest Rates· , European Economic Review, 2008, 52, hal. 792fi 819.
- Gujarati, D., (2009), Basic Econometrics, Cambridge, McGraw Hill.
- Hamadi, H. dan Awdeh, A. #The Determinants of Bank Net Interest Margin: Evidence from The Lebanese Banking Sector· , Journal of Money, Investment and Banking. 2012, 23, hal. 84-98.
- Hossain, M. #Financial Reforms and Persistently High Bank Interest Spreads in Bangladesh: Pitfalls in institutional Development?· , Journal of Asian Economics, 2012, 23(4), hal. 395-408.
- Infobank, #Penabung Bank Jateng Loyal di Kelas BPD· , <http://www.infobanknews.com/2012/03/penabung-bank-jateng-loyal-di-kelas-bpd/>, 2012.
- Ivaškevičiūtė, L. dan Mačerinskiene, I. #The Evaluation Model of a Commercial Bank Loan Portfolio· , Journal of Business Economics, 2008, 9(4), hal. 269-277.
- Kaymaz, O. dan Kaymaz, O. #Using Deposit Interest Rates In Setting Loan Interest Rates: Evidence From Turkey· , The International Journal of Business and Finance Research, 2011, 5(3), hal. 45-53.
- Khrawish, H.A. #Determinants of Commercial Banks Performance: Evidence from Jordan· , International Research Journal of Finance and Economics, 2011, 81, hal. 148-159.
- Lains, A., (2003), Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Jilid I, Jakarta, Pustaka LP3S.
- Maudos, J. dan Solis, L. #The determinants of net interest income in the Mexican banking system: An integrated model· , Journal of Banking & Finance, 2009, 33(10), hal. 1920-1931.
- Olokoyo, F.O. #Determinants of Commercial Banks,, Lending Behavior in Nigeria· , International Journal of Financial Research, 2011, 2(2), hal. 61-72.
- Rousseas, S. #A Markup Theory of Bank Loan Rates· , Journal of Post Keynesian Economics, 1985, 8, hal. 135-144.
- Sufian, F. dan Chong, R.R. #Determinants of Bank Profitability in Developing Economy: Empirical Evidence From the Philippines· , Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 2008, 4(2), hal. 91fi112.
- Villalpando, M. dan Guerrero, R. #Determinants of Banking Interest Rates and the Bank Lending Channel in Mexico 2001-2006· . Banco de Mexico, 2007.

Kajian Stabilitas Keuangan

No.20, Maret 2013

PENGARAH

Mulya E. Siregar Filianingsih Hendarta Agusman Linda Maulidina

KOORDINATOR & EDITOR UMUM

Dwityapoetra S. Besar

KOORDINATOR & EDITOR BAB I

Wahyu Hidayat S

KOORDINATOR & EDITOR BAB II

Kurniawan Agung, Eka Vitaloka

KOORDINATOR & EDITOR BAB III

Iman Gunadi, Hero Wonida

TIM PENYUSUN

Elisabeth Sukowati, Yunita Resmi Sari, Ita Rulina, Arlyana Abubakar, Sri Noerhidajati, Nuraini Yunita, Risa Fadila, Reska Prasetya, Kartina Eka D, Frimayudha Ardyaputra, Mestika Widantri, Heny Sulistyaningsih, Abdul Rahman, Arsyah Helmi, Aditya Anta Taruna, Bimo Widiatmoko

KONTRIBUTOR

Departemen Riset dan Kebijakan Moneter

Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan

Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran

PENGOLAHAN DATA, LAYOUT & PRODUKSI

Syaista Nur, I Made Yogi, Dyta Tri Utami, Harris Dwi Putra, Akhmad Handra Maulana, Rafidha, Saprudin



BANK INDONESIA

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN